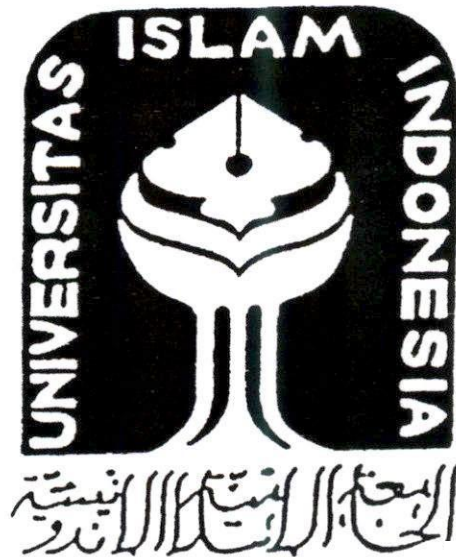


PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
TELAAH TRANSFORMASI SOSIAL DALAM PENDIDIKAN NASIONAL



Oleh:

Ahmad Sopian

NIM: 07913052

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2010

**PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
TELAAH TRANSFORMASI SOSIAL DALAM PENDIDIKAN NASIONAL**



Oleh:

Ahmad Sopian

NIM: 07913052

Pembimbing:

Drs. Hujair AH. Sanaky, M. SI.

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2010



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 655/PS-MSI/Peng./I/2010

TESIS berjudul : **PENDIDIKAN MULTI KULTURAL TELAAH
TRANSFORMASI SOSIAL DALAM PENDIDIKAN
NASIONAL**

Ditulis oleh : Ahmad Sopian

N. I. M. : 07913052

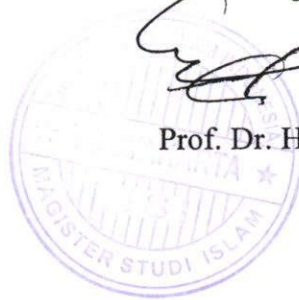
Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pendidikan Islam

Yogyakarta, 7 Januari 2010

Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS





**PROGRAM PASCASARJANA FIAI
 MAGISTER STUDI ISLAM
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
 Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
 Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

**TIM PENGUJI
 UJIAN TESIS**

Nama : Ahmad Sopian
 Tempat/tgl.lahir : Tanjung Lubuk, 01 Januari 1983
 N. I. M. : 07913052
 Konsentrasi : Pendidikan Islam
 Judul Tesis : **PENDIDIKAN MULTI KULTURAL TELAAH TRANSFORMASI
 SOSIAL DALAM PENDIDIKAN NASIONAL**

Ketua/Sekretaris: Drs. H. Asmuni, MA (.....) 
 Pembimbing : Drs. H. Hujair Ali Sanaky, MSI (.....) 
 Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....) 
 Penguji : Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA (.....) 

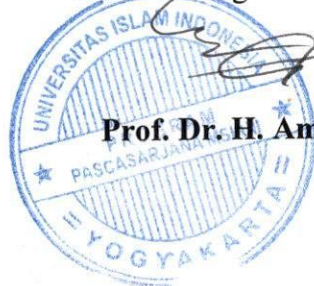
Diuji di Yogyakarta pada tanggal 30 Desember 2009

Pukul : 08.00–09.00 WIB

Hasil / Nilai : **85,00 / A**

**UNIVERSITAS
 ISLAM
 INDONESIA**

Mengetahui
 Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 808/PS-MSI/ND/XII/2009

TESIS berjudul : **PENDIDIKAN MULTI KULTURAL TELAAH
TRANSFORMASI SOSIAL; PENDIDIKAN NASIONAL**

Ditulis oleh : Ahmad Sopian

NIM : 07913052

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 30 Desember 2009

Ketua Program,

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

PERSETUJUAN

TESIS Berjudul : PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
TELAAH TRANSFORMASI SOSIAL; PENDIDIKAN
NASIONAL

Ditulis Oleh : Ahmad Sopian

NIM : 07913052

Konsentrasi : Kependidikan Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi
Islam Universitas Islam Indonesia



Yogyakarta, 11 Oktober 2009

Pembimbing,

~~UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA~~

Drs. Hujair AH. Sanaky, MSI.

PERSEMBAHAN

*Berangkat dari rasa syukur dan pengabdian kepada
TUHAN
yang masih memberikanku kehidupan.....
Ku persembahkan karya ini kepada :*

- ❖ *Almamaterku tercinta, Universitas Islam Indonesia*
- ❖ *Guru-guruku yang telah mengajarkanku berbagai dimensi kebenaran*
- ❖ *Ayah dan Ibundaku yang mulia, sosok yang tidak pernah menyerah menantang keadaan. “ Kucuran keringat dalam kerjamu, linangan air mata dalam do’amu, dan ketabahanmu terpatri dalam sanubari ananda.....”*
- ❖ *Ka’ Ali, Ka’ Amin, Ka’ Fai Beserta Keluarga, Adek Syam, Adek Awal, Adek Adi dan Keluarga besar Kanda Yusdani yang selalu memberi motivasi*
- ❖ *Titin Maryati yang selalu setia memberi dukungan dalam penulisan Tesis ini*

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

MOTTO

Menuntut ilmu sesaat (satu jam) lebih baik dari bangun ibadah satu malam, dan menuntut ilmu sehari lebih baik dari pada puasa tiga bulan"

(Dari Ibnu Abbas R.A, R. Addailami)

Hakekat pendidikan adalah adanya perkembangan pikiran setapak demi setapak melangkah dari pengalaman ilmiah menuju intelektual, kemudian menuju ke perasaan spiritual yang akhirnya berujung pada perjumpaan dengan Tuhan.

(Kahlil Gibran)



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabil 'alamin, segala puji kepada Allah SWT yang senantiasa membimbing dan memberi rahmat terhadap hambanya, khususnya terhadap penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya ila yaumul qiyamah.

Penelitian ini berjudul "Pendidikan Multikultural Telaah Transformasi Sosial; Pendidikan Nasional " Agar dapat dipergunakan sebagai sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan, dan juga sebagai bahan masukan bagi para pengelola pendidikan pada umumnya yang berorientasi pada perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat luas.

Tujuan penyusunan tesis ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Penulisan Tesis ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada Support (Motivasi), bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Dengan demikian patut kiranya penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan motivasi dalam penyelesaian Tesis ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M. Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak H. M. Fajar Hidayanto, MM, selaku Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Indonesia.


3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'alim, MIS. Selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Drs. H. Asmuni M. Tahir, MA. Selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dosen Pembimbing Bapak Drs. Hujair AH. Sanaky, MSI. Di sela-sela waktu sibuknya mengajar dan menyusun Desertasi masih memberikan waktu bagi penulis hingga selesainya Tesis ini.
6. Bapak-bapak dan Ibu dosen Program Pascasarjana Magister Studi Islam Konsentrasi Kependidikan Islam Universitas Islam Indonesia yang telah berkenan membagi disiplin keilmuan yang dimiliki.
7. Seluruh staf tata usaha Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu kelancaran proses administrasi selama perkuliahan berlangsung.
8. Keluarga besar kanda Yusdani, yang selalu memberikan saran, kritik dan motivasi, dan tempat berkonsultasi serta menjadi orang tua bagi penulis.
9. Keluarga Besar penulis: Bapak, Ibu, Kak Ali, Kak Amin, Kak Fai, beserta keluarga. Adek Sam, Adek Awal, Adek Adi. Yang telah memberi dukungan moril maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
10. Titin Maryati, yang selalu memberikan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan Tesis ini, semoga yang kuasa menyatukan kita dalam ridho-Nya dan terima kasih juga Penulis ucapkan buat mereka yang telah hilang dari dalam hidupku.

11. Semua rekan-rekan IKARUS dan Himpunan Mahasiswa Islam, Apartemen Jomblo, Wisma Griya Hatta dan Warga Pedak Baru RT 15 yang telah membantu mendorong dan memberi motivasi dalam penyusunan Tesis ini.
12. Buat sahabat Seperjuangan dan Mahasiswa Kependidikan Islam Universitas Islam Indonesia Angkatan 2007 (mas Nuryadin, mas Fauzi, mas Ihsan, mas Purwanto, mas Subri, mas Hanafi, mbak Hermi dan mbak Syamsiah) yang meraih Sukses bersama semoga tali persahabatan dapat terjalin selamanya.
13. Buat teman-teman yang slalu memberikan motivasi bagi penulis, Vanie Batam, Endang Bali, Ari Blora, Ida Bengkulu, Ifroh Palembang, Zulfa Jakarta, Syarnubi dan Marni Bersaudara, Zuhri, Pupah, Sri dan Elma.

Akhirnya penulis hanya berserah diri kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang agar dapat memberikan balasan terhadap mereka. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih sangat diperlukan saran, kritik, dorongan dan motivasi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Yogyakarta, 30 Desember 2009

Penulis



Ahmad Sopian

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	h,a'	h#	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s,ād	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	d#ad#	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	t,a'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	z,a'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	ʿ	dibawah)
غ	gain	g	koma terbalik di atas
ف	fa'	f	ge
ق	qāf	q	ef

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāt al fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd,

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur' ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawī al-furūd,
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	xix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
DAFTAR ISI	xix
ABSTRAKSI.....	xxi
ABSTRACT	xxii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian	27
H. Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II : PENDIDIKAN MULTIKULTURAL.....	31
A. Multikultural dan Multikulturalisme	31
A. Multikultural	31
B. Multikulturalisme	32

B. Sejarah dan Pergerakannya	35
C. Pendidikan Multikultural	23
D. Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural	42
E. Pandangan Islam tentang Pendidikan Multikultural.....	45
BAB III : TRANSFORMASI SOSIAL DAN PENDIDIKAN	49
A. Transformasi Sosial	52
B. Pola Perubahan Sosial.....	53
C. Teori-teori Modern Mengenai Perubahan Sosial	59
D. Pendidikan Sebagai Transformator Sosial	65
BAB IV : SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL	84
A. Pendidikan Nasional.....	84
B. Sistem Pendidikan Nasional Indonesia	88
C. Stándar Nasional Pendidikan	105
D. Pendidikan Demokratis.....	122
BAB V : PENUTUP	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran-saran	143
DAFTAR PUSTAKA	145
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL TELAAH TRANSFORMASI SOSIAL DALAM PENDIDIKAN NASIONAL

Oleh: Ahmad Sopian

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau cara lain yang di kenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat 3 menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntunan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan.

Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, diantaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; penyusunan standar pendanaan dan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multi makna.

Pembaruan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Pembaruan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Kata kunci: Pendidikan Multikultural, Transformasi Sosial dan Pendidikan Nasional

ABSTRACT

MULTICULTURAL EDUCATION STUDY OF SOCIAL TRANSFORMATION IN NATIONAL EDUCATION

By: Ahmad Sopian

People need education in life. Education is a business so that people can develop the potential of him through the learning process and other ways known to be recognized by the community. Basic laws of the Republic of Indonesia in 1945 Article 31 paragraph 1 states that every citizen has the right go get education, and paragraph, confirms that the government shall establish and conduct a national education system that enhances the faith and piety and noble character in the framework of the nation's intellectual life regulated by law. Therefore, all the components required the nation's intellectual life is one of the goals Indonesia country. Reform movement in Indonesia in general according to the application of democratic principles, decentralization, justice and uphold human right in these principles will provide a fundamental impact on the content, process an management of education system. In addition, science and technology flourished and led to new guidance in all aspects of life, including in the education system.

Demands are related to education system reform, including curriculum reform, the versification of curriculum to serve students an the potential for a variety of areas, versification of types of education which is done professionally, the preparation of graduate competency standards that apply nationally and regional adjust to local condition. Standard-setting educational qualifications and accordance with the guidance of a professional performance of duties, preparation and education funding standard for each unit of education according to the principles of equity and fairness, implementation of school-based education management and autonomy of universities, and education with open system and multi-meaning. Reform the education system also includes renewal of discrimination between state-run educational and community-managed education. And the distinction between an religion educational to general education.

Reform the national education system is to renew the vision, mission, and the national, education development strategy. National education system have a vision of education as the realization of strong social institutions and authority to empower all citizens of Indonesia developed into a quality human being, so they can proactively address challenges and changing times.

Keyword : Multicultural Education, Social Transformation and National Education

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Meluasnya disintegrasi sosial merupakan salah satu fenomena krusial yang telah membuat negeri ini terbengkalai. Konflik horisontal antar suku, agama, ras, misalnya, dan berbagai golongan sampai saat ini masih marak terjadi. Tragedi kekerasan antar kelompok yang meledak secara sporadis diakhir tahun 1990-an, misalnya, kemudian konflik kekerasan yang bernuansa politis, etnis dan agama seperti yang terjadi di berbagai wilayah Aceh, Maluku, Kalimantan Barat dan Tengah, merupakan salah satu fakta yang tidak terbantahkan bahwa dalam lingkaran sosial bangsa Indonesia masih kokoh semangat narsistik-egosentrisnya.¹

Sedikitnya selama tiga dasawarsa, kebijakan yang sentralistis dan pengawalan yang ketat terhadap isu perbedaan telah menghilangkan kemampuan masyarakat untuk memikirkan, membicarakan dan memecahkan persoalan yang muncul dari perbedaan secara terbuka, rasional dan damai. Kekerasan antar kelompok yang meledak secara sporadis di akhir tahun 1990-an di berbagai kawasan di Indonesia menunjukkan betapa rentannya rasa kebersamaan yang dibangun dalam negara-bangsa, betapa kentalnya prasangka antara kelompok dan betapa rendahnya saling pengertian antar kelompok. Konteks global setelah tragedi September 11 dan

¹A. Yusrianto Elga, *Memahami Cakrawala Pendidikan Multikultural*. <http://pmiikomfaksyahum.wordpress.com> di akses tanggal: 20-juli-2009, jam 20:24 wib

invasi Amerika Serikat ke Irak serta hiruk pikuk politik identitas di dalam era reformasi menambah kompleksnya persoalan keragaman dan antar kelompok di Indonesia.

Sejarah menunjukkan, pemaknaan secara negatif atas keragaman telah melahirkan penderitaan panjang umat manusia. Pada saat ini, paling tidak telah terjadi 35 pertikaian besar antar etnis di dunia. Lebih dari 38 juta jiwa terusir dari tempat yang mereka diami, paling sedikit 7 juta orang terbunuh dalam konflik etnis berdarah. Pertikaian seperti ini terjadi dari Barat sampai Timur, dari Utara hingga Selatan. Dunia menyaksikan darah mengalir dari Yugoslavia, Cekoslakia, Zaire hingga Rwanda, dari bekas Uni Soviet sampai Sudan, dari Srilangka, India hingga Indonesia. Konflik panjang tersebut melibatkan sentimen etnis, ras, golongan dan juga agama.²

Merupakan kenyataan yang tak bisa ditolak bahwa negara-bangsa Indonesia terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, agama dan lain-lain sehingga negara-bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat "multikultural". Tetapi pada pihak lain, realitas "multikultural" tersebut berhadapan dengan kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi kembali "kebudayaan nasional Indonesia" yang dapat menjadi "integrating force" yang mengikat seluruh keragaman etnis dan budaya tersebut.

² Muhaemin el-Ma'hady, *Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural*, <http://216.239.59.104/search?q=cach:RtXjr SL23sMJ> di akses tanggal 20-juli 2009, jam 20:30 wib

Perbedaan budaya merupakan sebuah konduksi dalam hubungan interpersonal. Sebagai contoh ada orang yang bila diajak bicara (pendengar) dalam mengungkapkan perhatiannya cukup dengan mengangguk-anggukan kepala sambil berkata "uh. huh". Namun dalam kelompok lain untuk menyatakan persetujuan cukup dengan mengedipkan kedua matanya. Dalam beberapa budaya, individu-individu yang berstatus tinggi biasanya yang memprakarsai, sementara individu yang statusnya rendah hanya menerima saja sementara dalam budaya lain justru sebaliknya. Beberapa psikolog menyatakan bahwa budaya menunjukkan tingkat intelegensi masyarakat. Sebagai contoh, gerakan lemah gemulai merupakan ciri utama masyarakat Bali. Oleh karena kemampuannya untuk menguasai hal itu merupakan ciri dari tingkat intelligensinya. Sementara manipulasi dan rekayasa kata dan angka menjadi penting dalam masyarakat Barat. Oleh karenanya "keahlian" yang dimiliki seseorang itu menunjukkan kepada kemampuan intelligensinya.³

Berdasarkan permasalahan seperti diatas maka pendidikan multikulturalisme menawarkan satu alternatif melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan berbasis pemanfaatan keragaman yang ada dimasyarakat. Khususnya yang ada pada siswa seperti: keragaman etnis, budaya ,bahasa ,agama, status sosial, gender, kemampuan umur dan ras. Menurut Tilaar,⁴ pendidikan multikultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang "interkulturalisme" seusai perang

³ *Ibid*, hal. 2

⁴ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan*, (Magelang: Indonesia Tera, 2003), hal. 124

dunia II. Kemunculan gagasan dan kesadaran "interkulturalisme" ini selain terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut HAM, kemerdekaan dari kolonialisme, dan diskriminasi rasial dan lain-lain, juga karena meningkatnya pluralitas di negara-negara Barat sendiri sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara baru merdeka ke Amerika dan Eropa.

Mengenai fokus pendidikan multikultural, Tilaar⁵ mengungkapkan bahwa dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama dan kultural domain atau mainstream. Fokus seperti ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya mainstream yang dominan, yang pada akhirnya menyebabkan orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat mainstream. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap "peduli" dan mau mengerti (difference), atau "politics of recognition" politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas.

Dalam konteks itu, pendidikan multikultural melihat masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap "indifference" dan "Non-recognition" tidak hanya berakar dari ketimpangan struktur rasial, tetapi paradigma pendidikan multikultural mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok-kelompok

⁵ *Ibid*, hal. 124

minoritas dalam berbagai bidang: sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Paradigma seperti ini akan mendorong tumbuhnya kajian-kajian tentang 'ethnic studies' untuk kemudian menemukan tempatnya dalam kurikulum pendidikan sejak dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tujuan inti dari pembahasan tentang subjek ini adalah untuk mencapai pemberdayaan (empowerment) bagi kelompok-kelompok minoritas dan disadventaged.⁶

Istilah "pendidikan multikultural" dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif dan normatif, yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh ia juga mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks deskriptif ini, maka kurikulum pendidikan multikultural mestilah mencakup subjek-subjek seperti: toleransi; tema-tema tentang perbedaan ethno-kultural dan agama: bahaya diskriminasi: penyelesaian konflik dan mediasi: HAM; demokratis dan pluralitas; kemanusiaan universal dan subjek-subjek lain yang relevan.

Dalam konteks teoritis, belajar dari model-model pendidikan multikultural yang pernah ada dan sedang dikembangkan oleh negara-negara maju, dikenal lima pendekatan, yaitu: pertama, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau multikulturalisme. Kedua, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau pemahaman kebudayaan. Ketiga, pendidikan bagi

⁶ Muhaemin el-Ma'hady, *Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural*, <http://216.239.59.104/search?q=cach:RtXjr SL23sMJ>, di akses tanggal 20-juli2009, jam 20:30 wib.

pluralisme kebudayaan. Keempat pendidikan dwi-budaya. Kelima, pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang tersebut diatas, timbul permasalahan-permasalahan menarik yang akan dikaji dan diteliti secara lebih intensif oleh peneliti. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan apa fungsi standar pendidikan nasional?
2. Bagaimana pendidikan multikultural dapat menjadi basis pendidikan nasional?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengungkapkan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, fungsi standar pendidikan nasional dan pendidikan multikultural menjadi basis pendidikan nasional.

Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam khazanah pemikiran khususnya pendidikan nasional dan mudah-mudahan penelitian ini akan mendorong peneliti-peneliti lain dikemudian hari untuk meninjaunya kembali.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sekurang-kurangnya :

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan yang terdapat dalam konsep pemikiran pendidikan secara umum dan khususnya pendidikan nasional.
2. Memberikan sumbangan ilmiah bagi pembaca dan peminat wacana pendidikan
3. Sebagai bahan pertimbangan terhadap pembacaan teks-teks pendidikan dan karya para ahli pendidikan.

E. Telaah Pustaka

Sebuah karya ilmiah mensyaratkan orisinalitas, oleh karena itu kajian terhadap penelitian sebelumnya sangat penting untuk dilakukan agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan penelitian yang telah dilakukan dengan permasalahan yang sama. Dengan melakukan kajian terhadap penelitian yang sudah dilakukan, juga mampu memberikan nuansa yang lain terhadap penelitian yang telah dilakukan.

Berdasarkan pada penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada karya ilmiah yang menulis tentang Transformasi Sosial dan Pendidikan Nasional upaya menuju Pendidikan Multikultural, akan tetapi ada beberapa buku ataupun skripsi yang telah menulis tentang pendidikan multikultural, diantaranya :

1. *H.A.R. Tilaar, (2004) berjudul Multikulturalisme Tantangan-Tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional* yang diterbitkan oleh penerbit Grasindo, Jakarta. Tulisan didalam buku ini merupakan suatu lukisan dari

secercah kehidupan masyarakat dan kehidupan bangsa Indonesia didalam eksistensi keberadaannya dalam tiga dimensi waktu yaitu masa lalu, kini, dan masa depan.

2. *Zakiyudin Baidhawi (2005) berjudul Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga, Jakarta. Dalam tulisannya Zakiyudin menegaskan pentingnya penanaman multikulturalisme dalam pendidikan agama untuk menghindari timbulnya klain kebenaran dari pemeluk agama tertentu sebagai akibat system pengajaran yang bersifat eksklusif.

3. *Choirul Mahfud, (2006) berjudul Pendidikan Multikultural*, yang diterbitkan oleh penerbit Pustaka Pelajar, Jogjakarta. Buku ini hadir dalam rangka merajut kebersamaan dan saling pengertian antar sesama bangsa dalam bingkai pendidikan berbasis multikulturalisme. Multikulturalisme adalah sebuah paham yang menekankan pada kesederajatan dan kesetaraan budaya-budaya lokal tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya lain.

4. *Ngainun Naim & Achmad Sauqi (2008) berjudul Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, yang diterbitkan oleh penerbit Ar-Ruzz Media, Jogjakarta.

Buku ini membahas dasar-dasar pendidikan pluralis-multikulturalbeserta segala aspek teori dan kerangka operasionalnya.

5. *Bikhu Parekh. (2000) Berjudul, Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, yang diterbitkan oleh penerbit Cambridge: Harvard University Press. Buku ini membahas bagaimana menumbuhkan

multiculturalisme pada masyarakat, penulis juga membedakan lima macam multikulturalisme.

6. *Azyumardi Azra (2007)* berjudul, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*, yang diterbitkan oleh penerbit Kanisius : Yogyakarta. Buku ini berisi kumpulan orasi budaya yang disampaikan oleh Azyumardi Azra tentang multikulturalisme.

7. *Lutfiyah (2004)* berjudul, *Pemikiran H.A.R. Tilaar tentang Reformasi Pendidikan Nasional dan Relevansinya dengan pendidikan Islam*, tesis UIN Sunan Kalijaga.

8. *Saipul Amin (2006)* berjudul, *Pendekatan Multikultural Dalam Pendidikan Pesantren (Studi Terhadap Pesantren Mahasiswa Hasyim As'ari Yogyakarta)* tesis, UII. Dalam pembahasannya penulis menyimpulkan bahwa pesantren mahasiswa Hasyim As'ari melakukan berbagai upaya untuk melakukan pemahaman tentang multikultural, salah satu upayanya adalah dengan mendatangkan bekerjasama dengan berbagai macam pihak yang berbeda dengan pesantren.

9. Artikel, ada beberapa artikel yang penulis temukan, diantaranya adalah dalam jurnal Ilmu Pendidikan, vol 4 yang ditulis oleh Fattah Hanurawan dan Pet Worth, dengan judul "*Multikultural Perspectives in Indonesia*", artikel ini kemudian dilanjutkan, di jurnal yang sama pada volume 5 edisi 1998 dengan judul, "*Multicultural Perspective in Indonesia Social And Studies Prejudices Reduction*". Artikel ini membahas bagaimana mengurangi prasangka dan

menerapkan perspektif multikultural dalam ilmu pendidikan sosial. Kemudian artikelnya S. Hamid Hasan, dengan judul, Pendekatan Multikultural Untuk Penyempurnaan Kurikulum Nasional, artikel ini membahas bagaimana pendidikan nasional yang mempunyai latar belakang bhineka tunggal ika, mempunyai pengembangan kurikulum yang berbasis multikultural.

Dari keseluruhan penelitian di atas belum menyentuh apa yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu *Pendidikan Multikultural (Telaah Transformasi Sosial; Pendidikan Nasional)*, sehingga di sinilah letak signifikansi penelitian ini dilakukan.

F. KERANGKA TEORI

Bagian terpenting dari suatu penelitian terletak pada awalnya, oleh karena itu penegasan judul tesis ini masih termasuk bagian awal suatu penelitian, maka peneliti mempertegas judul yang dimaksud dari penegasan judul ini, akan diperoleh pengertian tentang maksud suatu peristilahan, keluasan suatu termenologi pendidikan, sehingga dengan demikian judul terhindar dari penafsiran yang menyalahi pembahasan.

Pertama : Transformasi sosial adalah perubahan yang berkenaan dengan perubahan struktur sosial dan sistem dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Adapun pola-pola yang sering tampak dalam perubahan sosial (dalam arti bahwa pengaruh terhadap berubahnya struktur dan sistem sosial)⁷ antara lain adalah

⁷ Abu Ahmadi, *Sosiologi*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), hal. 113.

gangguan keseimbangan, perubahan bergelombang, perubahan kumulatif. Dalam proses perubahan sosial ini gerak kemasyarakatan dan proses-proses sosial seperti telah di uraikan di atas mempengaruhi perubahan sosial yang menyangkut perubahan sistem sosial dan struktur sosial.⁸

William F. Ogburn berusaha memberikan sesuatu pengertian tertentu, walaupun dia tidak memberi definisi tentang perubahan-perubahan sosial tersebut dia terutama mengemukakan bahwa ruang lingkup perubahan-perubahan sosial mencakup unsur-unsur kebudayaan baik yang materiil maupun yang immateriil, dengan terutama menekankan pengaruh yang besar dari unsur-unsur kebudayaan yang materiil terhadap unsur-unsur immateriil.⁹ *Kingsley Davis* mengartikan perubahan-perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat-masyarakat kapitalistis, menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dengan majikan yang kemudian menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik.¹⁰

Gillin mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, idiologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam

⁸ *Ibid*, hal. 113.

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Baru Keempat 1990)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), hal. 336

¹⁰ *Ibid*, hal. 336

masyarakat tersebut. Secara singkat *Samuel Koenig* mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi-modifikasi tersebut terjadi karena sebab-sebab intern maupun sebab-sebab ekstern.¹¹

Masyarakat tidak dilihat sebagai kesatuan organis atau badan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kejamakan (*plurality*), yang terdiri dari banyak individu, yang hanya dalam penampakan merupakan kesatuan. Kesatuan mereka bersifat semu. Sesungguhnya masyarakat terdiri dari kemauan individual yang mampu memilih antara hidup bersama atau hidup sendirian. Bila mereka kebetulan memilih untuk hidup bermasyarakat, mereka tetap memiliki dan mempertahankan individualitas mereka masing-masing. Jadi individu mendahului masyarakat. Otonomi dan kebebasan individu merupakan yang paling asli. Argumentasi yang mendasari teori individualistis ini, berbunyi sebagai berikut, keluarkanlah semua individu dari masyarakat, lalu masyarakat akan berhenti; tetapi bubarkanlah masyarakat serta lembaga-lembaganya, individu masih tetap akan ada.

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) pernah mendefinisikan masyarakat sebagai "kontrak sosial" yang diadakan antara pihak-pihak otonom. Dengan kata lain, tidak ada kaitan sosial batiniah yang dari dalam diri manusia mempersatukan mereka menjadi masyarakat. Tidak ada sosialitas berdasar relasi-relasi batiniah yang menjadikan makhluk sosial. Individu bukan "sel", sebab istilah ini

¹¹ Abu Ahmadi, *Sosiologi*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), hal. 306-307.

mengandaikan adanya suatu antar hubungan dari dalam atau suatu posisi fungsional didalam keseluruhan. Individu adalah atom atau mulekul, yang sudah lengkap dalam dirinya, berkemauan sendiri dan mampu menggabungkan diri sesukanya dengan atom-atom lain. Sama seperti air dan udara tidak lebih dari kombinasi atom-atom tertentu saja, demikian juga masyarakat tidak lebih dari pada individu-individu yang mencari kombinasi-kombinasi. Apabila atom oksigen bergabung dengan zat air, maka hasilnya air; apabila atom oksgen bergabung dengan atom nitrogen, makanya hasilnya udara. Begitu juga orang bergabung entah menjadi masyarakat agraris, entah masyarakat industri, entah menjadi apa. Mereka bersatu dengan orang lain hanya menurut srtuktur lahiriah. Individualitas merupakan sumsum masyarakat.¹²

Vilfredo Pareto (1848-1923) menekankan bahwa hidup bermasyarakat terdiri dari apa yang dilakukan oleh anggota-anggota individual. Mereka merupakan *the material points or molecules* dari sistem yang disebut masyarakat. Perhatikanlah, bahwa Pareto tidak memakai kata “badan” melainkan “sistem”. Suatu sistem dibentuk dari bagian-bagian yang tergantung satu dari yang lain karena dikonstruksi demikian untuk sebagian terbesar kelakuan manusia bersifat *mikanis* atau *otomatis*. Sehubungan dengan hal itu, ia membedakan antara perbuatan logis dan perbuatan non logis. Prilaku disebut *logis*, kalau direncanakan oleh akal budi dengan berpedoman pada tujuan yang mau di capai, dan menurut kenyataan mencapai tujuan itu. Tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh orang

¹² Kes Bertens, *Realitas Sosial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), hal. 66-67.

yang bersangkutan semuanya tepat dan secara obyektif sesuai dengan tuntutan-tuntutan rasional yang perlu dipenuhi demi tercapainya suatu tujuan. Misalnya, dokter yang memberi resep anti biotika untuk membasmi infeksi (tujuannya), lalu pasiennya sembuh karena obat itu, melakukan perbuatan logis. Perilaku lain yang tidak berpedoman secara rasional pada tujuan, atau tidak mencapai tujuannya, disebut *non logis*¹³.

Kelompok-kelompok sosial bukan merupakan kelompok yang statis. Setiap kelompok sosial pasti mengalami perkembangan serta perubahan. Untuk meneliti gejala tersebut perlu ditelaah lebih lanjut perihal dinamika kelompok sosial tersebut. Beberapa kelompok sosial ada yang sifatnya lebih stabil dari pada kelompok sosial lainnya, atau dengan lain perkataan, strukturnya tidak mengalami perubahan-perubahan yang menyolok. Ada pula kelompok sosial yang mengalami perubahan yang cepat, walaupun tidak ada pengaruh dari luar. Akan tetapi pada umumnya, kelompok-kelompok sosial mengalami perubahan sebagai akibat proses formasi ataupun reformasi dari pola-pola didalam kelompok tersebut, karena pengaruh dari luar. Keadaan yang tidak stabil dalam kelompok sosial terjadi karena konflik antara individu-individu dalam kelompok tersebut atau karena adanya konflik antara bagian-bagian kelompok tersebut sebagai akibat tidak adanya keseimbangan antara kekuatan-kekuatan didalam kelompok itu sendiri. Seperti telah disinggung diatas, bahwa masyarakat dan manusia itu tumbuh dan berkembang terus menerus kearah kemajuan, jadi ada gerak dan ada

¹³ *Ibid*, hal. 71-72.

dinamika. Perubahan-perubahan didalam pola tingkah laku masyarakat tidak selalu berjalan lancar, tetapi seringkali terdapat hambatan-hambatan, misalnya adanya gejala-gejala *vested interest* baik sebagai pribadi maupun kelompok sampai memuncak maka timbullah persaingan interes, public opini, atau undang-undang untuk mengubah suatu kebijaksanaan.¹⁴

Kedua : Pendidikan nasional adalah merupakan satu keseluruhan *kegiatan* dan *satuan pendidikan*, yang dirancang, dilaksanakan dan dikembangkan untuk ikut berusaha mencapai tujuan nasional. Dalam khasanah pendidikan terdapat dua istilah penting dan populer, yaitu: pedagogi dan pedagogic. Kata “pedagogi” berarti pendidikan, sedang pedagogic ilmu pendidikan.¹⁵

Pedagogik atau ilmu pendidikan adalah ilmu yang dan merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik. Kata pedagogik berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*pedagogia*” yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Di kalangan masyarakat Yunani kata *pedagogia* tidak begitu masyur, yang masyur adalah kata “*paedagogos*” yang berarti seorang pelayan bujang pada zaman Yuanani kuno yang kerjanya mengantar dan menjemput anak ke dan dari sekolah.¹⁶

Dalam Kamus Bahasa Inggris, pendidikan tertulis *education*.¹⁷ Kata *edugation* ini berasal dari *educate* yang dalam bahasa Indonesia berarti mendidik. Mendidik berarti memberi peningkatan dan mengembangkan. Sedangkan pendidikan

¹⁴ Abu Ahmadi, *Sosiologi* (Surabaya : Bina Ilmu, 1985), hal. 107-109.

¹⁵ Choirul Mahfudz, *Pendidikan Multikultural*, hal. 75

¹⁶ Paedagos berasal dari kata “*paedos*” yang berarti anak dan “*agoge*” yang berarti saya membimbing atau memimpin.

¹⁷ Jhons M. Echol & Hassan Shadly, *Kamus Inggris Indonesia*, cet ke-XIX (Jakarta: PT Gramedia, 1993), hal. 207

diartikan sebagai sebuah perbuatan atau proses perbuatan untuk memperoleh pengetahuan.¹⁸

Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia, pendidikan adalah sebuah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Soergarda Poerbakawatja mengartikan pendidikan merupakan segala usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh generasi tua untuk mengalihkan pengetahuan, kegakapan, dan ketrampilan yang dimilikinya kepada generasi muda dengan maksud agar mereka (generasi muda) mampu melaksanakan fungsi hidupnya dengan sebaik-baiknya.¹⁹

Pendidikan menurut Kihajar Dewantara adalah usaha kebudayaan yang dimaksudkan untuk memberi tuntunan di dalam tumbuhnya jiwa raga anak-anak, agar kelak di dalam garis-garis kodrad pribadinya dan keadaan yang mengelilinginya, anak dapat kemajuan dalam hidupnya lahir dan batin menuju kearah adab kemanusiaan.²⁰ Di samping rumusan pendidikan itu ada ahli yang merumuskan pendidikan sebagai bentuk kegiatan bimbingan yang dilakukan secara sadar dari pendidik secara perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya manusia yang memiliki kepribadian utama.²¹

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan Kebudayaan (Jakarta: Balai Pustaka, t.t), hal. 204

¹⁹ Soergarda Poerbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Kemerdekaan Indonesia merdeka*, (Jakarta: Gunung Mulia), hal. 11

²⁰ Pendidikan Taman Siswa 30 Tahun, cet 2. (Bandung: Alfabeta, 2004), hal. 56

²¹ Jalaluddin & Abdullah, *Pengantar Filsafat Pendidikan*, cet. 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hal. 14

Pendidikan merupakan suatu proses berkesinambungan yang mengandung unsur-unsur pengajaran, latihan, bimbingan, dan kepemimpinan dengan tujuan tertentu untuk melakukan transformasi ilmu, agama, dan budaya serta kemahiran yang berguna untuk diaplikasikan oleh individu (pengajar atau pendidik) kepada individu yang memerlukan pendidikan itu. Justru, pendidikan itu merujuk kepada manusia sebagai objek utama dalam proses pendidikan. Dalam hal ini berbagai definisi diberikan untuk istilah pendidikan itu sendiri, di antaranya, John Dewey,²² Horne,²³ Herbert Spencer,²⁴ Jean Jacques Rousseau,²⁵ dan Confucius.²⁶ Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan ialah proses melatih intelektual dan moral manusia untuk melahirkan warga negara yang baik serta menuju ke arah kesempurnaan bagi mencapai tujuan hidup.

Hasan Langgulung, merumuskan pengertian pendidikan sebagai menambah dan memindahkan nilai kebudayaan kepada individu dalam masyarakat. Pada

²² Jhon Dewey berpandangan pendidikan ialah satu proses membentuk kecenderungan asas yang berupa akhlak dan prasaan terhadap alam dan manusia. Lihat Muhaemin el-Ma'hady, *Pendidikan Islam Skop dan Matlamatnya*, <http://216.239.59.104/search?q=cach:RtXjr SL23sMJ>: artikel. Muhaemin el-Ma'hady, di ambil tanggal 20-juli2009, jam 20:30 wib, lihat juga Jhon Dewey, 1910. *Democracy and Education*, Mac Millan & Co., New York, hal. 1-2.

²³ Dia adalah salah satu tokoh pendidikan di Amerika. Dia berpendapat bahwa pendidikan merupakan proses abadi bagi menyesuaikan perkembangan diri manusia yang merangkum aspek jasmani, alam, akhlak, kebebasan dan prasaan manusia terhadap Tuhan sebagaimana yang nyata akhlak, prasaan dan kemauan manusia. Lihat Hermen Harrel Horne, 1939. *The Democratic Philosophy of Education*, Mac Millan & Co., New York, hal. 6. Lihat juga Mook Soon Sang, 1998. *Pendidikan di Malaysia*, Kumpulan Budiman, Kuala Lumpur, hal. 414

²⁴ Dia merupakan ahli filsafat Inggris (820-903 M). dia berpendapat bahwa pendidikan ialah mempersiapkan manusia supaya dapat dengan kehidupan yang sempurna. Lihat Herbert Spencer, 1906. *Education: Intellectual, Moral and Physical*, William and Nongete, hal. 84

²⁵ Dia merupakan seorang tokoh pendidikan di Eropa. Dia berpandangan bahwa pendidikan merupakan satu proses yang berkesinambungan dan bermula dari masa kanak-kanak. Dalam proses ini, segala kemampuan awalnya lahir dengan sendirinya. Lihat Mook Soon Sang, 1988. *Pendidikan di Malaysia*, Kumpulan Budiman, Kuala Lumpur, hal. 414.

²⁶ Dia merupakan seorang tokoh pendidikan serta ahli filsafat Cina. Dia berpendapat pendidikan ialah proyek untuk memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia.

hakekatnya dapat dipahami bahwa pendidikan dapat diperoleh melalui proses yang terdapat di dalam masyarakat dan individu yang ada di dalamnya. Akibat dari proses tersebut, pendidikan dapat dikategorikan dalam dua bentuk utama yaitu dalam formal²⁷ dan bentuk non formal.²⁸

Pengertian pendidikan di dalam UU Sisdiknas No 20 tahun 2003, dikemukakan, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.²⁹

Mengutip pandangan Shipman, Azyumardi Azra menyatakan ada tiga fungsi pendidikan, yaitu: (1) *Sosialization*, artinya pendidikan sebagai sarana bagi integrasi anak didik ke dalam nilai kelompok-kelompok atau nasional dominan, (2) *schoooling*, yaitu mempersiapkan anak didik untuk mencapai dan menduduki posisi ekonomi tertentu, dan (3) *education*, yaitu untuk menciptakan kelompok elit yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi besar bagi program

²⁷ Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan perguruan tinggi. Penyelenggara pendidikan formal adalah sekolah. Lihat Undang-Undang Sisdiknas Th 2003, (Jogjakarta: Media Wacana, 2003) Bab I Pasal I ayat 11

²⁸ Pendidikan non-formal ialah jalur pendidikan yang ada di luar jalur pendidikan non-formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan ini diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan. Lihat Undang-Undang Sisdiknas Th 2003, (Jogjakarta: Media Wacana, 2003) Bab VI Pasal 26 ayat 1.

²⁹ Undang-Undang Sisdiknas Th 2003, (Jogjakarta: Media Wacana, 2003) Bab I Pasal I ayat I

pembangunan.³⁰ Berdasarkan berbagai pengertian pendidikan di atas, pendidikan merupakan sebuah proses berkesinambungan yang dilalui oleh manusia dengan cara bimbingan, latihan dan latihan khususnya berkaitan dengan perkembangan intelektual, kerohanian, jasmani, sosial dan estetika. Dengan kata lain, pendidikan juga dipandang sebagai proses pewarisan kebudayaan dan pengembangan potensi pada diri manusia yang berilmu, berakhlak, berbudaya, berseni, berguna dan bertanggung jawab.

Di negara Indonesia ini pendidikan sudah diatur dan dimasukkan dalam sistemnya yaitu pendidikan sebagai suatu hak yang asasi bagi masyarakat Indonesia dan Negara harus bisa menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakatnya. Hal ini tercantum dalam UUD 45 pasal 31 yang berbunyi

Pasal 31

- (1) Tiap-tiap Warganegara berhak mendapat pengajaran
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang.³¹

Selain itu sistem pendidikan di Indonesia sendiri diatur dalam sebuah Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) yang disahkan oleh Presiden Megawati pada tahun 2003 yang lalu. Bertolak dari tujuan pendidikan nasional tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan merupakan tujuan akhir yang harus diterjemahkan lebih konkret melalui sebuah proses. Proses yang

³⁰ Azyumardi Azra, *Pembaharuan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Amisco, 1996), hal. 3

³¹ Undang-Undang Dasar 1945, (Jogjakarta: Media Wacana, 2003) Pasal 31, hal. 15

dimaksud adalah usaha yang terpola, terencana, dan tersistematisasi melalui proses pendidikan. Keinginan luhur bangsa Indonesia itu lahir dari tatanan nilai yang dianut dan terakumulasi dari dalam kesadaran dirinya sebagai bangsa dan kesadaran terhadap dunia di sekitarnya.

Dilihat dari tridomain pendidikan (domain kognitif, afektif, psikomotorik), tatanan nilai yang tertuang dalam pembukaan UUD'45 khususnya yang tertuang dalam UU No 2/1989 dan UU No. 20/2003 lebih banyak didominasi oleh domain afektif atau cenderung kepada pembentukan sikap. Hal ini menunjukkan bahwa tatanan nilai (kepribadian yang luhur) berfungsi sebagai pengayom domain lainnya. Artinya, kecerdasan dan keterampilan harus beraskan nilai-nilai luhur yang dianut bangsa. Di antara sekian banyak nilai-nilai luhur tersebut, beriman, berakhlakul karimah, dan beramal saleh adalah bagian dari nilai luhur itu.³²

Pendidikan nasional mempunyai tugas utama agar tiap-tiap warga negara mendapat pengajaran. Untuk membuka kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya, pendidikan nasional mencakup baik jalur pendidikan sekolah. Dalam bahasa pendekatan sistem, sistem pendidikan nasional terdiri atas subsistem pendidikan sekolah dan subsistem pendidikan luar sekolah.

Ketiga: Multikulturalisme merupakan suatu paham atau situasi-kondisi masyarakat yang tersusun dari banyak kebudayaan. Multikulturalisme sering merupakan prasaan nyaman yang dibentuk oleh pengetahuan. Pengetahuan dibangun oleh keterampilan yang mendukung suatu komunikasi yang efektif,

³² Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 199.

dengan setiap orang dari sikap kebudayaan yang ditemui dalam setiap situasi kebudayaannya. Rasa aman adalah suasana tanpa kecemasan, tanpa mekanisme pertahanan diri dalam pengalaman dan perjumpaan antarbudaya.³³

Pendidikan Multibudaya dalam Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial (Kuper, 2000) dimulai sebagai gerakan reformasi pendidikan di AS selama perjuangan hak-hak kaum sipil Amerika keturunan Afrika pada tahun 1960-an dan 1970-an. Perubahan kemasyarakatan yang mendasar seperti integrasi sekolah-sekolah negeri dan peningkatan populasi imigran telah memberikan dampak yang besar atas lembaga-lembaga pendidikan. Pada saat para pendidik berjuang untuk menjelaskan tingkat kegagalan dan putus sekolah murid-murid dari etnis marginal, beberapa orang berpendapat bahwa murid-murid tersebut tidak memiliki pengetahuan budaya yang memadai untuk mencapai keberhasilan akademik.

Banks (1993) telah mendiskripsikan evolusi pendidikan multibudaya dalam empat fase. Yang pertama, ada upaya untuk mempersatukan kajian-kajian etnis pada setiap kurikulum. Kedua, hal ini diikuti oleh pendidikan multietnis sebagai usaha untuk menerapkan persamaan pendidikan melalui reformasi keseluruhan sistem pendidikan. Yang ketiga, kelompok-kelompok marginal yang lain, seperti perempuan, orang cacat, homo dan lesbian, mulai menuntut perubahan-perubahan mendasar dalam lembaga pendidikan. Fase keempat perkembangan teori, triset

³³ Ngainun Naim & Ahmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 126. lihat juga: Alo liwari, *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antarbudaya*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hal. 16

dan praktek, perhatian pada hubungan antar-ras, kelamin, dan kelas telah menghasilkan tujuan bersama bagi kebanyakan ahli teoritis, jika bukan para praktisi, dari pendidikan multibudaya. Gerakan reformasi mengupayakan transformasi proses pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan pada semua tingkatan sehingga semua murid, apapun ras atau etnis, kecacatan, jenis kelamin, kelas sosial dan orientasi seksualnya akan menikmati kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan.

Nieto (1992) menyebutkan bahwa pendidikan multibudaya bertujuan untuk sebuah pendidikan yang bersifat anti rasis; yang memperhatikan ketrampilan-ketrampilan dan pengetahuan dasar bagi warga dunia; yang penting bagi semua murid; yang menembus seluruh aspek sistem pendidikan; mengembangkan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang memungkinkan murid bekerja bagi keadilan sosial; yang merupakan proses dimana pengajar dan murid bersama-sama mempelajari pentingnya variabel budaya bagi keberhasilan akademik; dan menerapkan ilmu pendidikan yang kritis yang memberi perhatian pada bangun pengetahuan sosial dan membantu murid untuk mengembangkan ketrampilan dalam membuat keputusan dan tindakan sosial.

Wacana multikulturalisme untuk konteks di Indonesia menemukan momentumnya ketika sistem nasional yang otoriter-militeristik tumbang seiring dengan jatuhnya rezim Soeharto. Saat itu, keadaan negara menjadi kacau balau dengan berbagai konflik antarsuku bangsa dan antar golongan, yang menimbulkan keterkejutan dan kengerian para anggota masyarakat. Kondisi yang

demikian membuat berbagai pihak semakin mempertanyakan kembali sistem nasional seperti apa yang cocok bagi Indonesia yang sedang berubah, serta sistem apa yang bisa membuat masyarakat Indonesia bisa hidup damai dengan meminimalisir potensi konflik.

Multikulturalisme adalah konsep yang mampu menjawab tantangan perubahan zaman dengan alasan multikulturalisme merupakan sebuah ideologi yang mengagungkan perbedaan budaya, atau sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai corak kehidupan masyarakat. Multikulturalisme akan menjadi pengikat dan jembatan yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan termasuk perbedaan kesukubangsaan dan suku bangsa dalam masyarakat yang multikultural. Perbedaan itu dapat terwadahi di tempat-tempat umum, tempat kerja dan pasar, dan sistem nasional dalam hal kesetaraan derajat secara politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Menurut Parekh seperti dikutip oleh Azumardi Azra perkembangan dan konsep multikulturalisme dibedakan menjadi lima macam *pertama*, "multikulturalisme isolasionis" yang mengacu pada masyarakat dimana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi minimal satu sama lain, *kedua*, "multikulturalisme akomodatif", yakni masyarakat plural yang memiliki kultur dominan, yang membuat penyesuaian akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas, *ketiga*, "multikulturalisme otomatis", yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (equality) dengan budaya dominan dan

menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima, *keempat*, "multikulturalisme kritikal" atau "intraktif", yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu concren dengan kehidupan kultural otonom; tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka, *kelima*, "multikulturalisme kosmopolitan", yang berusaha menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat dan comited kepada budaya tertentu dan, sebaliknya, secara bebas terlibat dalam eksprimen-eksprimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.³⁴

Di sisi lain, berkaitan dengan pemahaman dan analisa terhadap pendidikan, persoalan yang paling mendasar adalah metodologinya. Pembahasan metodologi sama artinya dengan pembahasan filsafat pengetahuan (epistemologi).³⁵ Suatu ilmu pengetahuan ditentukan oleh obyeknya, dan obyek itu memastikan pemakaian metode. Oleh Karena itu, kajian-kajian terhadap aspek metodologis pada dasarnya adalah satu sumbangan yang berharga bagi perkembangan dan

³⁴ Bikhu Parekh, *National Cultur And Multikulturalism*, dalam Kennet Thomson (ed.), *Media And Cultural Regulation*, London : Sage Publication, 183-185, dapat dilihat juga pada Azyumardi Azra, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*, Yogyakarta: Impulse, Penerbit Kanisius

³⁵ Kata epistemologi yang diambil dari kata Yunani yang berarti *pengetahuan*. Kata epistemologi dipilih oleh Foucault untuk menunjukkan pengandaian-pengandaian yang terjadi pada tiap-tiap zaman, berupa pengandaian tertentu, prinsip-prinsip tertentu, syarat-syarat kemungkinan tertentu, cara-cara pendekatan tertentu, yang semuanya itu mempunyai suatu *appriori historis* tertentu. Pengandaian tersebut membentuk suatu sistem yang teguh. Semua itu tidak diinsyafi dengan jelas oleh orang-orang yang menjalankan sistem, tetapi secara sembunyi menentukan pikiran, pengamatan dan pembicaraan mereka.

kemajuan obyek yang dikaji itu sendiri, termasuk pendidikan nasional dalam aspek pemahaman dan analisisnya.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kepustakaan murni (*library research*) dengan metode diskriptif analitik. Adapun dalam pengumpulan data peneliti mengambil sumber-sumber yang berbentuk buku-buku, artikel-artikel maupun karya ilmiah lainnya. *Machdhoero* data bisa dibedakan menjadi dua menurut sumbernya. Pertama, data primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya,³⁶ data yang kedua adalah data sekunder yaitu data yang diambil tidak dari sumbernya langsung melainkan sudah dikumpulkan oleh pihak lain dan sudah diolah.³⁷ Sumber kedua ini penulis mengambil dari buku-buku, artikel-artikel, karya-karya ilmiah orang lain yang membahas pemikiran yang bisa menunjang penelitian tesis Ini.

2. Metode Analisa Data

Tahap analisa data merupakan tahap terpenting dari sebuah penelitian. Sebab pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfakan sedemikian rupa sehingga berhasil menyampaikan kebenaran-kebenaran yang bisa dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam penelitian ini³⁸. Secara definitif analisa data

³⁶ Machdhoero, *Metode Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Ekonomi* (UMM Press Malang, 1993), hal. 80.

³⁷ *Ibid*, hal. 80.

³⁸ Kuntjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1984), hal. 328.

merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang dirumuskan oleh data.³⁹

Metode analisa pada tahap ini merupakan pengembangan dari metode diskriptif. Adapun fokus utama metode analisa dari penelitian ini adalah mendeskripsikan, membahas dan mengkritisi gagasan atau pemikiran-pemikiran pokok kebijakan pemerintah dalam upaya elaborasi penelitian. Selanjutnya metode yang dipakai oleh penulis adalah dengan menggunakan metode analisis konten, analisis konten berangkat dari aksioma bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi itu merupakan dasar bagi semua ilmu social.⁴⁰ Ada berbagai definisi analisis konten, yang pokoknya dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah definisi yang mengandung pengertian analisis konten sebagai analisis “isi”, yang dapat disebut sebagai *analisis konten deskriptif*. Sedang kelompok kedua adalah definisi yang memuat pengertian analisis konten sebagai analisis “makna”, yang mensyaratkan pembuatan inferensi, sehingga disebut *analisis konten inferensial*.⁴¹ Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis konten deskriptif eksploratif, mendeskripsikan gagasan primer tersebut dengan memberikan penafsiran terhadap gagasan yang telah dideskripsikan,

³⁹ Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, Rosda Karya, 2000), hal. 56.

⁴⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi III*, (Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasen, 1998), hal. 49

⁴¹ Darmiyati Zuchdi, *Panduan Peniltian Analisis Konten*,(Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP,1993), hal. 67

memberikan kritik terhadap gagasan-gagasan dan memberikan analisis terhadap serangkaian gagasan primer serta diakhiri dengan penyimpulan hasil penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika bahasan di dalam penyusunan tesis ini dapat dideskripsikan sebagai berikut, yakni bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Pada bagian awal, penulis menyajikan halaman judul, halaman sampul luar, halaman sampul dalam, halaman pengesahan, halaman tim penguji ujian tesis, halaman nota dinas, halaman persetujuan pembimbing, halaman motto, halaman persembahan, halaman abstrak, kata pengantar dan daftar isi.

Bagian isi pada tesis ini berisi uraian penelitian mulai bagian pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam bentuk bab-bab satu- kesatuan. Pada tesis ini penulis menuangkan hasil penelitian dalam empat bab. Bab I tesis ini berisi gambaran umum penulisan tesis, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, telaah pustaka kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II penulis akan membahas tentang multikultural dan multikulturalisme, sejarah dan pergerakannya, nilai-nilai pendidikan multikultural, pendidikan multikultural, pandangan Islam tentang pendidikan multikultural

Selanjutnya pada bab III berisi tentang transformasi sosial, yang terdiri dari dua bahasan, yakni : pola perubahan sosial dan teori-teori modern mengenai perubahan sosial, di bab ini penulis juga menjelaskan tentang pendidikan sebagai

transformator sosial. Selanjutnya pada bab IV penulis akan membahas, menguraikan, konsep pendidikan, sistem pendidikan nasional Indonesia, pendidikan demokratis, dan manifesto pendidikan nasional

Bab V pada tesis ini adalah berisi penutup dan saran-saran, penutup memuat kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan. Akhirnya, bagian akhir dari tesis ini terdiri dari daftar pustaka dan berbagai lampiran yang terkait dengan penelitian ini.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

1. Multikultural dan Multukulturalisme

A. Multikultural

Dalam kamus sosiologi yang di susun oleh Soerjono Soekanto, secara sederhana multikultural berarti berkenaan lebih dari dua kebudayaan.⁴² Menurut Kimlicka, multikultural adalah keberagaman budaya di dalam komunitas atau masyarakat.⁴³ Dengan demikian masyarakat yang di dalamnya terdapat beraneka ragam budaya di sebut dengan masyarakat multukultural.

Jenis kebudayaan yang dimaksud dalam kajian disini adalah kebudayaan kemasyarakatan. Kebudayaan kemasyarakatan adalah kebudayaan yang memberikan kepada anggotanya berbagai cara hidup yang penuh arti dalam segala kegiatan manusia, termasuk kehidupan sosial, pendidikan, agama, hiburan, dan ekonomi, yang mencakup baik bidang publik maupun pribadi. Kebudayaan-kebudayaan tersebut terkonsentrasi secara teritorial, berdasarkan bahasa yang sama.⁴⁴

Keragaman dalam suatu bangsa (negara) timbul oleh beberapa sebab. Menurut Kimlicka, *pertama*, akibat dari kehadiran bersama lebih dari satu bangsa dari

⁴² Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, cet 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hal. 324.

⁴³ Willy Kimlicka, *Kewarganegaraan Multikultural*, (Jakarta: LP3S, 2002), hal. 13.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 114.

negara tertentu kewilayah tertentu.⁴⁵ Bangsa yang masuk kewilayah tertentu tersebut membawa kebudayaan sendiri, sehingga menambah jumlah budaya bagi wilayah baru yang dihuni tersebut.

Fenomena keragaman budaya yang ditimbulkan oleh kedatangan bangsa-bangsa lain dengan identitas budayanya masing-masing pernah terjadi di beberapa negara Eropa setelah Perang Dunia (PD) II.⁴⁶ Pada masa itu banyak pekerja-pekerja dari bangsa-bangsa luar Eropa masuk ke beberapa negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Jerman.

Kedua, timbulnya keragaman budaya oleh imigrasi perorangan maupun keluarga. Setelah datang, mereka kemudian berintegrasi dan melebur bersama dengan masyarakat. Namun bila mereka membuat suatu perkumpulan sendiri yang lepas dalam suatu teritorial tertentu, para imigran ini disebut kelompok etnis.⁴⁷

B. Multikulturalisme

1). Pengertian

Multikulturalisme merupakan paradigma baru dalam upaya merajut hubungan antar manusia yang belakangan ini selalu hidup dalam nuansa konflik. Wacana ini lahir dan tumbuh dari kesadaran manusia akan perbedaan-perbedaan yang kadang

⁴⁵ *Ibid*, hal. 14

⁴⁶ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan*, (Magelang: Indonesia Tera, 2003), hal. 124

⁴⁷ Willy Kimlicka, *Kewarganegaraan Multikultural*, (Jakarta: LP3S, 2002), hal. 14.

tampil secara bertentangan.⁴⁸ Secara etimologi, multikulturalisme⁴⁹ dibentuk oleh tiga kata, yaitu *multi* (banyak;lipat ganda)⁵⁰, *kultural* (kebudayaan) dan *isme* (paham/ ideologi).⁵¹ Dengan demikian maka multikulturalisme berarti ideologi/paham tentang banyak kebudayaan. Multikulturalisme adalah pengakuan atas beberapa kultur berbeda. Namun demikian, pengertian multikulturalisme tidak sebatas hanya pengakuan atas kultur yang berbeda-beda, tetapi multikulturalisme juga di dalamnya terkandung semangat memelihara perbedaan atas dasar ras, waena kulit, jenis kelamin, agama, status sosial dan kelompok kepentingan.⁵² Selanjutnya dalam pengertian Suparlan, multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan.⁵³ Oleh karena itu menurutnya, multikulturalisme tidak bisa disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa (ethnik). Sebab multikulturalisme menekankan keanekaragaman budaya dalam kesederajatan.

⁴⁸ Abdul Munir Mul Khan, *Kesalahan Multikultural*, (Jakarta:PSAP,2005), hal. 7.

⁴⁹ Istilah multikulturalisme terkadang dipakai untuk menggambarkan sebuah kondisi yang di dalamnya terdapat beranekaragam budaya, kadang juga menggambarkan sebuah komunitas (masyarakat maupun bangsa) yang beraneka ragam, tapi merupakan sebuah sikap mengakui, menghargai, menghormati keadaan budaya yang bersifat beragam baik dari pemerintah yang berkuasa maupun dari masyarakat sendiri.

⁵⁰ Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Pupuler*, (Surabaya : Penerbit Arkola, 1994), hal. 495

⁵¹ Choirul Mahfudz, *Pendidikan Multikultural*, cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 75

⁵² Sulistiyowati Irianto, “*Multikulturalisme dalam Perspektif Hukum: Tragedi Perempuan Tionghoa*”, *Jurnal Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu-ilmu Sosial LIPPI*, Jilid XXIX, No.I, (2003), hal. 60

⁵³ Parsudi Suparlan, *Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia*, tulisan ini merupakan Keynote Address yang disampaikan dalam sesi pleno symposium internasional jurnal Antropologi Indonesia ke-2:” Globalisasi dan Kebudayaan: Suatu Dialektika Indonesia Baru”, Kampus Universitas Andalas, Padang, 18-21 Juli 2001.

Contoh perlakuan keanekaragaman kelompok-kelompok budaya dalam kesederajatan dapat dilihat di dalam kehidupan masyarakat Amerika Serikat dan Eropa Barat, di Amerika Serikat terdapat kumpulan bangsa-bangsa yang sangat beragam secara rasial, asal etnis atau suku bangsa, kebudayaan dan keagamaannya. Oleh Amerika Serikat keadaan bangsa yang multi etnis, suku budaya dan agama ini telah dibangun dengan menggunakan prinsip-prinsip demokrasi.

Sementara itu Multikulturalisme menurut Yana Syafrie adalah sikap kesediaan untuk menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa ataupun agama.⁵⁴

Menurut Yana Syafrie, multikulturalisme memiliki tujuan berupaya membangun paradigma baru manusia dalam memandang perbedaan dalam kehidupannya. Dengan paradigma yang baru ini harapannya adalah tumbuhnya kesadaran sikap untuk menghargai dan menerima perbedaan-perbedaan itu. Menurut Taylor, ide multikulturalisme ini adalah gagasan untuk mengatur keragaman dengan prinsip dasar pengakuan akan keberagaman itu sendiri.⁵⁵

Dari berbagai pengertian multikulturalisme di atas dapat disimpulkan Multikulturalisme adalah sebuah ideologi dan sebuah alat untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Untuk dapat memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan yang berupa bangunan konsep-konsep yang

⁵⁴ Yana Syafrie, "Multikulturalisme dan Agenda Kemanusiaan", www.waspadaonline.com, hal. 2 diambil tanggal 22 Juni 2009, jam 20:20 wib.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 2

relevan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah, demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan sukubangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komuniti, dan konsep-konsep lainnya yang relevan.

C. Sejarah dan Pergerakannya.

Pemikiran multikulturalisme muncul pertama kali di negara-negara maju. Menurut Bikhu Parekh, pertama kali gerakan multikulturalisme muncul di Kanada dan Australia, baru setelah itu muncul di Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan lainnya.⁵⁶

Menurut Tilaar, setelah Perang Dunia II, gerakan multikulturalisme semakin menonjol akibat lahirnya negara-negara baru yang bebas dari penjajahan.⁵⁷ Bentuk dari gerakan multikulturalisme di negara-negara yang baru merdeka itu adalah perlawanan terhadap dominasi kebudayaan kulit putih (*white culture*) dan imperialisme Eropa.

Sementara untuk konteks Indonesia, menurut Muhaemin el-Ma'hady, wacana ini mulai ramai diperbincangkan di kalangan akademisi, praktisi budaya dan

⁵⁶ Zubaedi, *Pendidikan berbasis Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 73

⁵⁷ *Ibid*, hal. 74

aktifis di awal tahun 2000.⁵⁸ Tahun-tahun setelah jatuhnya presiden Soeharto ini kondisi bangsa dalam keadaan kacau balau, konflik antar suku, agama, dan antar golongan terjadi disejumlah daerah. Keadaan demikian lantas membuat berbagai pihak mempertanyakan kembali sistem nasional seperti apa yang cocok bagi bangsa yang sedang berubah, serta sistem apa yang bisa membuat suku bangsa dan golongan, hidup damai dengan meminimalkan potensi konflik.⁵⁹ Multikulturalisme menurut Tilaar bukan sekedar pengenalan terhadap berbagai jenis budaya di dunia ini,⁶⁰ tetapi multikulturalisme merupakan gerakan tuntutan dari kelompok imigran terhadap pemerintah baru yang ditempatinya agar diakui identitas kulturalnya serta diperlakukan adil. Gerakan ini muncul pertama kalinya di negara-negara maju (Barat), seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Jerman.⁶¹

Gerakan multikulturalisme setelah Perang Dunia II semakin menonjol. Tidak hanya di negara-negara yang baru merdeka dari penjajahan.⁶² Bentuk dari gerakan multikulturalisme di negara-negara yang baru merdeka ini adalah perlawanan terhadap imperialisme Eropa dan dominasi kebudayaan kulit putih.

⁵⁸ Muhaemin el-Ma'hady, *Multikulturalisme dan pendidikan Multikultural*, <http://216.239.59.104/search?q=cach:RtXjr SL23sMJ>, di akses tanggal 20-juli2009, jam 20:30 wib

⁵⁹ Zubedi, *Pendidikan Berbasis*, hal. 61

⁶⁰ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan*, hal. 73

⁶¹ Ada sebagian menganggap bahwa multikulturalisme merupakan gerakan arus balik gelombang globalisasi, globalisasi yang telah melahirkan kecenderungan kearah monokulturalisme karena akibat imperialisme kebudayaan barat, tidak mengherankan bila multikulturalisme mendapat baju baru, yaitu melalui gerakan politik.

⁶² H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa*, hal. 74

D. Pendidikan Multikultural.

Pendidikan multikultural ini merupakan fenomena baru dalam dunia pendidikan.⁶³ Sebelum Perang Dunia II pendidikan multikultural belum dikenal, pendidikan menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan oleh kelompok tertentu.

Secara sederhana pendidikan multikultural adalah pendidikan yang didesain untuk masyarakat yang multicultural.⁶⁴ Sementara itu menurut James A. Bank, pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk kebebasan (*education for freedom*) sekaligus penyebaran gerakan inklusif dalam rangka mempererat hubungan antar sesama.⁶⁵

Pendidikan multikultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang “interkulturalisme” seusai Perang Dunia II.⁶⁶ Gagasan serta kesadaran interkultural muncul karena perkembangan politik yang menyangkut HAM, munculnya negara-negara yang terbebas dari penjajahan, diskriminasi sosial, meningkatnya pluralitas masyarakat di negara-negara barat akibat adanya gelombang migrasi besar-besaran dari negara-negara yang baru merdeka ke Amerika dan Eropa.

Pada tahap pertama pendidikan interkultural ditujukan untuk mengubah tingkah laku individu-individu agar tidak meremehkan, apalagi melecehkan

⁶³ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan*, hal. 123

⁶⁴ Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan*, hal. viii.

⁶⁵ Zubaedi, *Pendidikan berbasis*, hal. 70.

⁶⁶ Azyumardi Azra, *Identitas dan Krisis Budaya Membangun Multikulturalisme Indonesia*, Kompas, 14 desember 2004, hal. 6

terhadap budaya orang atau kelompok lain, khususnya dari kalangan minoritas.⁶⁷ Selain itu pendidikan interkultural ditujukan untuk menumbuhkan sikap toleransi dalam diri individu terhadap berbagai perbedaan rasial, etnis, agama, dan lain sebagainya.

Namun apa yang terjadi setelah pendidikan interkultural dipraktekkan, konflik dalam skala luas terjadi, dan konflik yang terjadi ini bukan pada tingkat individu, melainkan pada tingkat masyarakat. Dari kenyataan inilah maka pendidikan interkultural dipandang kurang berhasil dalam mengantisipasi terjadinya konflik antar golongan di masyarakat.

Tilaar mencatat beberapa tipologi pendidikan multikultural yang berkembang dewasa ini, antara lain: *Pertama*: mengajar peserta didik yang memiliki budaya berbeda (*culture difference*), terutama peserta didik yang berada dalam proses transisi dari kelompok budaya tertentu kedalam budaya mainstream. *Kedua*, hubungan manusia (*human relation*), sebuah upaya membantu peserta didik dari kelompok-kelompok tertentu untuk dapat belajar bersama-sama dengan kelompok yang berbeda sehingga membentuk hubungan yang sehat antar mereka. *Ketiga*, single group studies, yaitu proses yang bertujuan memajukan pluralism tetapi tidak menekankan pada adanya perbedaan stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat. *Keempat*, pendidikan multikultural yang merupakan langkah reformatif di dunia pendidikan dengan menyediakan kurikulum serta materi-materi pembelajaran yang menekankan adanya perbedaan peserta didik dalam

⁶⁷ *Ibid*, hal.6

semua aspek budaya yang disandang. *Kelima*, Pendidikan multikultural yang bersifat rekonstruksi sosial. Program ini merupakan program baru yang bertujuan menyatukan perbedaan-perbedaan kultural dan menantang ketimpangan-ketimpangan sosial. Pendidikan yang demikian disebut juga dengan *critical multicultural education*.⁶⁸ Dari uraian di atas dapat dirumuskan bahwa pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang menyiapkan anak didik “melek warga negara” sehingga dapat berperan secara efektif baik dalam lingkungan budayanya sendiri maupun di luar lingkungan budayanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada lima hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan, (1) integrasi, (2) proses pembentukan pengetahuan, (3) reduksi prasangka, (4) keadilan pendidikan dan (5) pemberdayaan kultur sekolah.⁶⁹ Kelima hal tersebut merupakan satu rangkaian yang harus terkait antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisah-pisahkan dalam pelaksanaannya.

Indonesia adalah sebuah bangsa yang multikultural. Ada banyak kelompok, suku, agama, dan budaya. Dalam penelitian etnologis mengungkapkan bahwa Indonesia terdiri atas 600 suku bangsa dengan identitas serta kebudayaannya yang berbeda-beda.⁷⁰ Dengan melihat konteks bangsa Indonesia yang masyarakatnya bersifat multikultural, maka pendidikan multikultural menjadi kebutuhan penting untuk di realisasikan oleh semua lembaga pendidikan di seluruh Indonesia.

⁶⁸ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan*, hal. 185-190

⁶⁹ *Ibid*, hal. 129

⁷⁰ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan*, hal. 114.

E. Nilai-nilai pendidikan Multikultural.

Nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan,⁷¹ mengandung arti bahwa nilai adalah sesuatu yang dapat membuat seseorang secara penuh menyadari kebermaknaannya dan menganggapnya sebagai panutan dalam pengambilan keputusan serta mencerminkannya dalam perilaku tindakan. Menurut P. Hariyono, nilai adalah segala sesuatu yang dijunjung tinggi serta memiliki makna dan dijaga keberadaannya. Nilai bisa berbentuk abstrak maupun konkret.⁷² Nilai yang semula bersifat abstrak dapat berubah konkret (nyata) karena terwujud dalam perbuatan manusia.⁷³ Nilai menurut penulis di sini adalah sesuatu yang berwujud abstrak maupun konkret yang terdapat dalam semangat pendidikan multikultural, nilai yang berwujud abstrak akan berwujud konkret jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang mencerminkan pada amanat yang terkandung dalam pendidikan multikultural tersebut.

Tilaar, menjelaskan pendidikan multikultural adalah konsep, ide atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan (*set of beliefs*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara.⁷⁴ Ada empat hal yang menjadi nilai-nilai inti (*core values*) di dalam pendidikan multikultural yaitu: *pertama*, apresiasi

⁷¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal. 667

⁷² P. Hariyono, *Pemahaman Kontekstual tentang IBD*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hal. 93

⁷³ S. Purnomo, *Nilai dan Norma Masyarakat*, Jurnal Filsafat, No. 23 (November 1995), hal. 23.

⁷⁴ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan*, hal. 181

terhadap adanya kenyataan pluralitas dalam masyarakat. *Kedua*, pengakuan terhadap harkat manusia dan hak asasi manusia. *Ketiga*, pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia. *Keempat*, pengembangan manusia terhadap manusia terhadap planet bumi.⁷⁵

Ainul Yakin mengatakan bahwa pengertian pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada siswa seperti perbedaan etnis, agama, bahasa gender, kelas sosial, ras, kemampuan dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah.⁷⁶ Sedangkan pendidikan multikultural menurut Zakiyuddin Baidhawiy:

“Pendidikan multikultural adalah suatu cara untuk mengajarkan keragaman (*teaching diversity*) yang menhendaki rasionalisasi etis, intelektual, sosial dan pragmatif secara inter-relatif, yaitu mengajarkan ideal-ideal inklusivisme, pluralisme, dan saling menghargai semua orang dan kebudayaan merupakan imperatif humanistik yang menjadi prasyarat bagi kehidupan etis dan partisipasi sipil secara penuh dalam demokrasi multikultural dan dunia manusia yang beragam-mengintegrasikan studi tentang fakta-fakta, sejarah, kebudayaan, nilai-nilai, struktur, perspektif, dan kontribusi semua kelompok dalam kurikulum sehingga dapat membangun pengetahuan yang lebih kaya, kompleks, dan akurat tentang kondisi kemanusiaan di dalam dan melintasi konteks waktu, ruang, dan kebudayaan tertentu.”⁷⁷

Model pendidikan multikultural, khususnya dalam konteks pendidikan agama, Zakiyuddin juga menjelaskan terdapat beberapa karakteristik. Karakteristik-

⁷⁵ H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan Perspektif Studi Kultural*, (Magelang: Indonesia Tera, 2003), hal. 171

⁷⁶ M. Ainul Yakin, *Pendidikan Multikultural, Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hal. 25

⁷⁷ Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hal. 8

karakteristik tersebut adalah sebagai berikut: belajar hidup dalam perbedaan, membangun saling percaya (*mutual trust*), memelihara saling pengertian (*mutual understanding*), menjunjung sikap saling menghargai (*mutual respect*), terbuka dalam berfikir, apresiasi dan interdependensi, resolusi konflik dan rekonsiliasi nir kekerasan⁷⁸

Berdasarkan beberapa definisi penulis sebutkan di atas, maka dapat ditarik benang merah, bahwa pendidikan multikultural merupakan salah satu bagian dari paradigma dan metode untuk menggali potensi keragaman etnik dan kultural masyarakat, mewadahi dalam suatu manajemen konflik yang memadai. Pendidikan multikultural merupakan kearifan dalam merespon dan mengantisipasi dampak negative globalisasi yang memaksakan homogenisasi dan hegemoni pola dan gaya hidup. Jika homogenisasi terjadi, maka tentunya hal itu akan membrangus keanekaragaman budaya bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya. Keberagaman bangsa Indonesia merupakan suatu realitas sosial yang tidak bisa dipungkiri, harus dipupuk dan dilestarikan dengan nilai-nilai multikultural, agar tercipta harmoni sosial dalam kehidupan sehari-hari. Adapun strategi yang paling ampuh untuk terus melestarikan nilai-nilai multikultural adalah melalui pendidikan.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan tempat bagi peserta didik untuk menggali ilmu pengetahuan harus dapat mengakomodir keragaman yang ada dalam setiap peserta didik. Setiap peserta didik mempunyai potensi sendiri-sendiri

⁷⁸ Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama*, hal. 78-85

yang harus di tumbuh kembangkan menjadi pribadi yang berkarakter karena pendidikan bukan hanya sebagai sarana homogenisasi. Dalam aktivitas pendidikan, peserta didik merupakan subyek pendidikan. Oleh karenanya itu, dalam memahami hakekat peserta didik, para pendidik perlu dilengkapi pemahaman tentang ciri-ciri peserta didik. Setidaknya secara umum peserta didik memiliki empat ciri yaitu:⁷⁹

1. Peserta didik dalam keadaan berdaya, maksudnya ia dalam keadaan berdaya untuk menggunakan kemampuan, kemauan dan sebagainya.
2. Mempunyai keinginan untuk berkembang ke arah yang lebih dewasa.
3. Peserta didik mempunyai latar belakang yang berbeda-beda.
4. Peserta didik melakukan penjelajahan terhadap alam sekitarnya dengan potensi-potensi dasar yang dimiliki secara individual.

Seorang pendidik harus dapat memahami perbedaan individual peserta didik, dalam arti seorang pendidik tidak menganggap semua peserta didiknya seragam dalam hal apapun baik suku, agama, bahasa maupun budaya dan lainnya. Jika keragaman peserta didik dapat dipahami oleh pendidik, niscaya potensi yang dimiliki oleh siswa akan berkembang secara optimal. Paradigma berfikir majemuk merupakan modal dasar dalam menyelenggarakan pendidikan multikultural. Terlebih lagi seorang pendidik yang dituntut untuk menyeimbangkan antara taraf ide atau gagasan dengan realitas praktis dalam proses belajar-mengajar.

⁷⁹ Chirul Mafud, *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 170

Dalam pendidikan sendiri, sumber daya pertama yang harus dibenahi adalah pendidik. Pendidik merupakan ujung tombak terjadinya perubahan, sebab mereka selalu terlibat langsung dengan peserta didik dan yang mengimplementasikan kurikulum. Berhasil tidaknya sebuah rumusan dan konsep kurikulum dalam konteks praktis sangat ditentukan oleh faktor pendidik. Semakin berkualitas pendidik, semakin berhasil membawa perubahan.⁸⁰ Seorang pendidik harus mengikuti dan menguasai perkembangan isu-isu aktual di masyarakat seperti demokrasi, hak asasi manusia, masyarakat madani, pluralisme dan kesetaraan gender. Selain pendidik, komponen untuk merubah paradigma pembelajaran di sekolah adalah kurikulum dan strategi pembelajaran.⁸¹ Ketiga komponen tersebut harus dipersiapkan secara terpadu karena komponen-komponen tersebut merupakan faktor penting dalam pembentukan dan karakter peserta didik.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas pemeluk agama Islam, multikultural dapat dipahami melalui basis pemahaman agama. Predikat Islam sebagai agama yang *Rahmatan Lil-A'lam* (rahmat bagi seluruh isi alam) akan dapat terwujud dengan menumbuhkan kesadaran multikultural yang selalu menghargai nilai-nilai perbedaan. Impian untuk menciptakan situasi sosial yang harmonis, tentunya tidak semudah membalik telapak tangan, di sinilah peran

⁸⁰ Muqowim, “*Epistemologi Pendidikan Islam dalam Konteks Masyarakat Majemuk*” dalam Subkhi Ridho, (ed.), *Belajar dari Kearifan Sahabat: Ikhtiar Pengembangan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: JIMM bekerjasama dengan Yayasan TIFA, 2007), hal. 34

⁸¹ *Ibid*, hal. 38

pendidikan mengimplementasikan nilai-nilai multikultural menjadi sangat signifikan.

F. Pandangan Islam tentang Pendidikan Multikultural.

Pengakuan bahwa budaya adalah beragam bukan hal yang asing dalam agama Islam. Islam telah mengajarkan kepada pemeluknya untuk tidak memaksakan agama Islam kepada pemeluk agama lain, untuk tidak mengolok-ngolok,⁸² menjauhi prasangka buruk,⁸³ serta tidak memanggil kepada orang lain dengan nama yang tidak baik.⁸⁴ Islam juga memerintahkan pada umatnya untuk bersikap lemah lembut, mencintai kepada orang lain seperti menyayangi dan mengasihi diri sendiri.

Islam adalah agama yang universal, karena itu seluruh ajaran-ajaran yang diturunkan melalui wahyu maupun pesan-pesan hadis memiliki cakupan universalitas dalam penerapannya. Pernyataan tentang universalitas Islam ini dengan jelas terdapat dalam surat al-Hujurat ayat 13 berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa

⁸² Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung : PT Syaamil Cipta Media, 2004), hal. 517

⁸³ *Ibid*, hal. 517

⁸⁴ *Ibid*, hal. 517

*diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.*⁸⁵ (QS. Al-Hujarat: 13)

Secara eksplisit (jelas) ayat di atas menunjukkan adanya kesadaran yang tertuang dalam Al-Qur'an bahwa manusia sejak awal penciptaannya memang sengaja dirancang oleh Allah terdiri dari beragam suku dan bangsa.

Tujuannya adalah agar terjadi interaksi dan komunikasi di antara mereka (*taaruf*) serta berkompetisi menjadi yang terbaik di sisi Allah, yaitu orang yang bertakwa. Sehingga dapat pula dipahami adanya pesan di balik ayat tadi yang menunjukkan bahwa Islam mengakui adanya pluralitas dalam masyarakat.

Jika berpijak pada ayat di atas dikatakan konsep pendidikan terutama pendidikan Islam, maka pendidikan multikultural dalam Islam dapat dipahami sebagai suatu pendidikan yang diselenggarakan oleh orang (lembaga/instansi) Islam, atau menjadikan Islam sebagai basis pengajarannya yang mempunyai karakter mengakui keragaman kebudayaan. Pengertian ini sejalan dengan rumusan Azyumardi Azra yang mengatakan bahwa pendidikan (Islam) multikultural adalah "pendidikan untuk/tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan".⁸⁶

⁸⁵ *Ibid*, hal. 517

⁸⁶ Azyumardi Azra, " *Pendidikan Multikultural (Membangun Kembali Indonesia Bhineka Tunggal Ika)*", SKH. Republika, 03 september 2003. Diakses dari www.republika.co.id, tanggal 13 juni 2009, jam: 20:17. WIB.

Pengakuan terhadap pluralitas masyarakat dalam pendidikan juga dapat dilihat dalam beberapa hadis populer, antara lain:

اطلبوا العلم ولو بالصين⁸⁷

Artinya : “ tuntutlah ilmu meskipun sampai kenegeri Cina”.

Hadis di atas dapat dipahami sebagai kesadaran akan adanya pluralitas dan perlunya kesadaran multikultural yang diserukan Nabi Muhammad SAW dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat di mengerti mengingat bahwa antara Islam (Arab) dengan Cina adalah dua negara yang secara kultur (budaya), geografis bahkan agama ketika itu sangat berbeda. Tetapi perbedaan tersebut bukan dijadikan alasan untuk tidak menuntut ilmu bagi umat Islam. Selain itu, kesadaran multikultural dalam pendidikan Islam juga tercermin dalam istilah-istilah yang menunjukkan konsep pendidikan itu sendiri. Konsep keragaman yang tercakup dalam manusia dan semua potensi serta perbedaannya, masyarakat dengan keanekaragaman budaya, etnis, suku dan sebagainya, pendidikan tidak dapat berjalan sesuai arah yang benar untuk mendidik dan “memanusiakan” peserta didik.

Dengan uraian singkat di atas, dapat ditegaskan bahwa Islam sejak semula mengakui dan memiliki konsep yang jelas tentang pendidikan multikultural, baik

⁸⁷ Hadis ini di riwayatkan oleh Anas. Menurut Baihaqi hadis tersebut sangat terkenal di kalangan umat islam, akan tetapi sanad (jalur periwayatannya) lemah. Lihat catatan kaki dalam al-Imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din, juz. I*, (Semarang: Syirkah Nur Asia, t.t.), hal. 9

konsep-konsep yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, pemikiran tokoh serta praktek pendidikan yang telah berjalan.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

TRANSFORMASI SOSIAL DAN PENDIDIKAN

Pendidikan ternyata merupakan sumber transformasi sosial dalam masyarakat modern. Dengan kata lain, pendidikan dan kekuasaan mempunyai hubungan yang erat. Sebagai salah satu contoh, betapa pendidikan mengubah wajah dunia ialah meledaknya tuntutan pendidikan setelah perang dunia II.⁸⁸ Ketika muncul negara-negara baru akibat hapusnya kolonialisme, orang melihat betapa besar kekuasaan pendidikan dalam mengubah cara hidup atau kebudayaan suatu bangsa. Pada masa penjajahan tampak sekali betapa pendidikan dijadikan sebagai alat penguasa untuk meredam keinginan dari bangsa terjajah. Sistem pendidikan kolonial merupakan alat dari kekuasaan kolonial untuk meredam nasionalisme. Apabila di negara-negara bekas jajahan di selenggarakan pendidikan maka pendidikan itu terbatas untuk segolongan anggota masyarakat yang di anggap oleh pemerintah kolonial dapat membantu untuk mencapai cita-citanya di negara koloni. Tapi sejarah perkembangan nasionalisme menunjukkan bahwa justru dari golongan yang mendapatkan pendidikan Barat tumbuh anasir-anasir yang menjadi biang hancurnya kekuatan kolonial.

⁸⁸ Sejarah Perang Dunia II yang diawali dengan agresi Jerman Nazi pimpinan Adolf Hitler terhadap tetangga-tetangganya, terlebih dengan invasinya terhadap Polandia pada 1 September 1939, barulah berakhir dengan jatuhnya Berlin, Hitler bunuh diri, dan menyerahnya sisa pasukan Jerman pada Sekutu dan Unisoviet pada 8 Mei 1945. P.K. Ojong, *Perang Eropa Jilid II* (Jakarta: Kompas, 2004), hal. ix.

Transformasi sosial dan pendidikan bukan hanya terjadi di negara-negara berkembang tetapi juga di negara maju. Sebagai contoh, pemberontakan kaum muda yakni revolusi mahasiswa di Prancis pada tahun 1968. Boleh dikatakan, transformasi sosial budaya mengacu kepada gerakan mahasiswa di Paris yang kemudian menyebar di seluruh Prancis menuntut perubahan dalam politik kolonialisme Prancis pada waktu itu. Akibat dari pemberontakan mahasiswa bukan hanya dirasakan oleh dunia akademik tetapi oleh seluruh masyarakat Prancis dan mengubah wajah kehidupan sosial budaya Prancis.⁸⁹ Keadaan yang hampir bersamaan dapat juga kita lihat dalam transformasi politik sosial budaya di Indonesia dengan lahirnya era reformasi yang di pelopori oleh para mahasiswa.

Hubungan antara perubahan sosial dan pendidikan di dunia pemikiran tokoh-tokoh Barat dapat ditelusuri sejak Renaisans, yaitu dengan munculnya unsur individu dalam kehidupan bersama.⁹⁰ Renaisans merupakan suatu era yang menentang keterkungkungan kehidupan manusia dari kekuasaan raja dan gereja dan memberikan kebebasan individual sampai kepada perubahan pemerintah yang menentang kekuasaan raja yang absolut. Dalam pemikiran politik, terkenal

⁸⁹ Dalam sistem pendidikan Prancis filsafat diajarkan di beberapa seksi dari Lycee, tipe sekolah menengah yang mempersiapkan siswa untuk masuk perguruan tinggi, khususnya seksi A yang mempunyai spesialisasi di bidang sastra dan filsafat. Sejak pembaruan sistem pendidikan yang berlangsung di Prancis dalam dasawarsa 70-an, kedudukan filsafat di sekolah menengah tidak aman lagi. Mula-mula kementerian pendidikan cenderung mengurangi jam pelajaran filsafat secara drastis. Rencana itu menimbulkan diskusi yang cukup hebat. Dalam diskusi-diskusi itu kelompok yang menamakan diri *Greph (Groupe de recherche sur l'enseignement de philoshopie*, Kelompok penelitian tentang pengajaran filsafat) memainkan peran penting. Kelompok itu dibentuk pada tahun 1974 dan dipimpin oleh filosof terkemuka, Jacques Derrida. Kess Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Jilid II Prancis* (Jakarta: Gramedia, 2001), hal. 2

⁹⁰ Kess Bertens, *Inggris-Jerman* (Jakarta: Gramedia, 2002), hal. 2

pemikiran-pemikiran dari Hobbes yang memberikan pengaruh yang sangat besar di dalam pedagogik. Sejak pemikiran Hobbes dalam bidang politik diluncurkan, dalam dunia pendidikan lahirlah dua aliran besar yang mengenai wacana transformasi sosial.⁹¹ Arus yang pertama menekankan pada paham liberalisme. Paham ini menekankan kepada berlangsungnya kehidupan budaya melalui apa yang di formulasikan oleh Talcott Parsons, yaitu melalui konsensus dalam berbagi lembaga-lembaga sosial unsur-unsur kebudayaan dilanjutkan. Aliran lain yaitu yang mengikuti tradisi Marxisme yang menekankan kepada konflik kelas menggantikan proses sosialisasi dari Talcott Parsons. Menurut pemikiran ini, apa yang disebut sosialisasi oleh Talcott Parsons adalah sebenarnya penyerahan atau sub-ordinasi dari kelas tertentu kepada ideologi hegemoni dari kaum borjuis. Di sinilah kita lihat peranan pendidikan dalam reproduksi kebudayaan transmisi ilmu pengetahuan. Pada aliran yang dirumuskan oleh proses sosialisasi kita lihat proses pendidikan atau kekuasaan pendidikan ditekankan kepada sistem nilai yang dipaksakan oleh orang dewasa kepada anak-anak. Sedangkan dalam teori konflik Marxisme, tekanan diberikan kepada proses sosialisasi nilai-nilai dari kelas yang

⁹¹ Hobbes mendasarkan filsafat politiknya atas analisa tentang watak manusia. Ia berpendapat bahwa pada dasarnya manusia itu bersaing, agresif, loba, anti sosial dan bersifat kebinatangan. Jika dibiarkan sendiri, sekelompok manusia akan melakukan peperangan yang terus-menerus, satu terhadap lainnya. Hobbes menyerang filsafat politik idealis Plato dan Aristoteles sebagai filsafat yang tidak realistis, yang menganggap secara keliru bahwa manusia itu mempunyai watak mampu untuk mendapat keutamaan dan kebijaksanaan. Hobbes mengesampingkan akal dan memperhatikan hasrat khususnya hasrat untuk mempertahankan diri. Oleh karena itu persetujuan manusia dengan negara (*social contract*) merupakan suatu persetujuan antara orang-orang yang sama mencintai dan mementingkan diri sendiri, yakni persetujuan untuk tidak melakukan pembunuhan massal dan membinasakan jenis manusia. Richard T. Nolan, *Persoalan-Persoalan Filsafat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hal. 46.

dominan. Dengan kata lain, proses pendidikan atau transmisi nilai-nilai budaya dan ilmu pengetahuan mengikuti struktur kekuasaan dalam masyarakat.⁹²

A. Transformasi Sosial

Sebagai mana dikemukakan oleh Aguste Comte, sosiologi mempelajari statika sosial dan dinamika sosial. Hingga kini perhatian kita lebih tertuju pada segi statika struktur sosial pada pokok-pokok bahasan seperti kelompok-kelompok, hubungan antar kelompok, institusi-institusi, stratifikasi⁹³. Meskipun pembahasan kita terpusat pada aspek statika masyarakat, namun di sana sini kita telah mulai menyentuh masalah perubahan sosial. Dalam kenyataan statika sosial dan dinamika sosial memang sukar dipisahkan, meskipun secara analitik kita berusaha melakukannya. Kita telah melihat bahwa stratifikasi sosial dapat berubah melalui mobilitas sosial; institusi sosial dapat berubah karena terjadinya perubahan pada institusi lain atau karena terjadinya gerakan sosial. Kitapun telah mulai menyinggung beberapa teori perubahan sosial, seperti teori Marx mengenai sistem feodal menjadi kapitalis dan kemudian sosialis, teori Weber mengenai munculnya kapitalisme dalam masyarakat feodal, teori Durkheim mengenal solidaritas mekanik menjadi organik. Sekarang pusat perhatian kita akan beralih pada segi dinamika masyarakat pada perubahan sosial.

⁹² H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan* (Magelang: Indonesiatara, 2003), hal. 66

⁹³ Struktur sosial dalam perspektif Weber didefinisikan dalam istilah-istilah yang bersifat probabilistik dan bukan sebagai suatu kenyataan empirik yang ada terlepas dari individu-individu. Jadi misalnya, suatu hubungan sosial seluruhnya dan secara eksklusif terjadi karena adanya probabilitas di mana akan ada suatu arah tindakan sosial dalam suatu pengertian yang dapat dimengeti secara berarti. Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1986), hal. 222

B. Pola Perubahan Sosial

Pola linier : Etzioni-Halevy mengemukakan bahwa pemikiran para tokoh sosiologi klasik mengenai perubahan sosial dapat digolongkan kedalam beberapa pola. Pola pertama ialah pola linear, menurut pemikiran ini perkembangan masyarakat mengikuti suatu pola yang pasti. Pemikiran mengenai perkembangan linear kita temukan dalam karya Comte. Menurut Comte kemajuan progresif peradaban manusia mengikuti suatu jalan yang alami, pasti, sama dan tak terelakkan. Dalam teorinya yang dikenal dengan nama hukum tiga tahap, Comte mengemukakan bahwa sejarah memperlihatkan adanya tiga tahap yang dilalui peradaban. Pada tahap pertama yang diberinya nama tahap Teologis dan Militer, Comte melihat bahwa semua hubungan sosial bersifat militer; masyarakat senantiasa bertujuan menundukkan masyarakat lain. Semua konsepsi teoritik dilandaskan pada pemikiran mengenai kekuatan-kekuatan adikodrati. Pengamatan dituntun oleh imajinasi; penelitian tidak dibenarkan.⁹⁴

Tahap kedua, tahap metafisik yuridis, merupakan tahap antara, yang menjembatani masyarakat militer dengan masyarakat industri.⁹⁵ Pengamatan masih dikuasai imajinasi tetapi lambat laun semakin berubah dan menjadi dasar bagi penelitian.

Pada tahap ketiga dan terakhir, tahap ilmu pengetahuan dan industri, industri mendominasi hubungan sosial dan produksi menjadi tujuan dalam masyarakat.

⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Baru Keempat 1990)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), hal. 341

⁹⁵ *Ibid*, hal. 346

Imajinasi telah digeser oleh pengamatan dan konsepsi-konsepsi teoritik telah bersifat positif.⁹⁶

Pola siklus: menurut pola kedua, pola siklus masyarakat berkembang laksana suatu roda: kadang kala naik ke atas, kadang kala turun ke bawah. Contoh yang dikemukakan oleh Etzioni-Halivy mencerminkan pandangannya bahwa kebudayaan tumbuh, berkembang dan pudar laksana perjalanan gelombang, yang muncul mendadak, berkembang dan kemudian lenyap, ataupun laksana tahap perkembangan manusia melewati masa muda, masa dewasa, masa tua, dan akhirnya punah. Sebagai contoh Spencer mengacu pada kebudayaan-kebudayaan besar yang kini telah tiada, seperti kebudayaan Yunani, Romawi, dan Mesir⁹⁷.

Pandangan mengenai siklus kita jumpai pula dalam karya Vilfredo Pareto. Dalam tulisannya mengenai sirkulasi kaum elite Pareto mengemukakan bahwa dalam tiap masyarakat terdapat dua lapisan, lapisan bawah atau nonelite dan lapisan atas, yang terdiri atas kaum Aristokrat dan terbagi lagi dalam dua kelas: elite yang berkuasa dan elite yang tidak berkuasa. Menurut Pareto Aristokrasi senantiasa akan mengalami transformasi; sejarah menunjukkan bahwa Aristokrasi hanya dapat bertahan untuk jangka waktu tertentu saja dan akhirnya akan pudar untuk selanjutnya diganti oleh suatu aristokrasi baru yang berasal dari lapisan bawah. Sejarah, menurut Pareto merupakan tempat pemakaman bagi aristokrasi. Aristokrasi yang menempuh segala upaya untuk mempertahankan kekuasaan

⁹⁶ *Ibid*, hal. 346

⁹⁷ *Ibid*, hal. 344

akhirnya akan digulingkan melalui gerakan dengan disertai kekerasan atau revolusi.⁹⁸

Untuk mempelajari perubahan masyarakat, perlu diketahui sebab yang melatari terjadinya perubahan itu. Apabila di teliti lebih mendalam sebab terjadinya suatu perubahan masyarakat, mungkin karena adanya sesuatu yang dianggap sudah tidak lagi memuaskan. Mungkin saja karena ada faktor baru yang lebih memuaskan masyarakat sebagai pengganti faktor yang lama itu. Mungkin juga masyarakat mengadakan perubahan karena terpaksa demi untuk menyesuaikan suatu faktor dengan faktor lain yang sudah mengalami perubahan terlebih dahulu. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial antara lain:

Kekuasaan dan tekanan sosial, di dalam kehidupan masyarakat seseorang tidak dapat bergerak bebas, meskipun menurut teori Rousseau bahwa orang itu bebas bergerak. Jelas bahwa hipotesis Rousseau tersebut ternyata hanya teori saja. Tetapi yang sebenarnya bahwa manusia dalam masyarakat betul-betul menghadapi beberapa kekuasaan dalam masyarakat. Dengan demikian berarti banyak mengalami atau menderita tekanan sosial, baik yang berupa politik, ekonomi, fisik dan sebagainya. Kekuasaan adalah suatu pengaruh atau tekanan yang dapat menyebabkan orang lain secara terpaksa atau bebas untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu yang sesuai dengan suatu keinginan.

⁹⁸ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2000), hal. 213-215.

Sebenarnya tekanan sosial itu mungkin dirasakan sebagai paksaan, namun oleh karena dirasakannya bukan sebagai paksaan. Karena dengan adanya paksaan itu ternyata dapat dirasakan manfaatnya. Itulah sebabnya, maka setiap orang taat pada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, baik yang meliputi bidang politik, dan lain-lain.

Dengan adanya tekanan dan kekuasaan, maka terjadilah perubahan dalam masyarakat dan kebudayaan. Tiap-tiap kelompoknya dan tiap-tiap lembaganya mengalami perubahan dan segala perubahan itu mengakibatkan perubahan lain secara timbal balik.⁹⁹

Pengaruh kebudayaan masyarakat lain, apabila sebab-sebab perubahan bersumber pada masyarakat lain, maka itu mungkin terjadi karena kebudayaan dari masyarakat lain melancarkan pengaruhnya. Hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik. Artinya, masing-masing masyarakat mempengaruhi masyarakat lainnya, tetapi juga menerima pengaruh dari masyarakat yang lain itu.

Namun apabila hubungan tersebut berjalan melalui alat-alat komunikasi masa, maka ada kemungkinan pengaruh itu hanya datang dari satu pihak saja yaitu dari masyarakat pengguna alat-alat komunikasi tersebut. Sedang lain pihak hanya menerima pengaruh tanpa mempunyai kesempatan memberikan pengaruh balik. Apabila pengaruh dari masyarakat tersebut diterima tidak karena paksaan, maka

⁹⁹ Abu Ahmadi, *Sosiologi*, hal. 114-115.

hasilnya dinamakan *demonstration effect*. Proses penerimaan pengaruh kebudayaan asing di dalam antropologi budaya disebut akulturasi.¹⁰⁰

Di dalam pertemuan dua kebudayaan tidak selalu akan terjadi proses saling mempengaruhi. Kadang kala pertemuan dua kebudayaan yang seimbang akan saling menolak. Keadaan semacam itu dinamakan *cultural animosity*. *Cultural animosity* yang ada hingga kini adalah antara Surakarta dengan Yogyakarta yang dapat dikembalikan pada 1755 dan kemudian perjanjian sala tiga pada 1757. Pertemuan kedua kebudayaan ini mula-mula diawali dengan pertentangan fisik yang kemudian dilanjutkan dengan pertentangan-pertentangan dalam segi-segi kehidupan lainnya. Sampai sekarang corak pakaian kedua belah pihak tetap berbeda, demikian pula tari-tariannya, seni musik tradisional, dan seterusnya, padahal mereka berasal dari sumber dan dasar yang sama, yaitu kebudayaan khusus Jawa.¹⁰¹

Apabila salah satu dua kebudayaan yang bertemu mempunyai taraf teknologi yang lebih tinggi, maka yang terjadi adalah proses imitasi yaitu peniruan terhadap unsur-unsur kebudayaan lain. Mula-mula unsur tersebut ditambahkan pada

¹⁰⁰ Antropologi berasal dari bahasa Yunani *antropos (manusia)*, *logos (ilmu)*. Jadi ilmu antropologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari makhluk antropos, merupakan suatu integrasi dari beberapa ilmu yang masing-masing mempelajari suatu kompleks masalah-masalah khusus mengenai makhluk manusia. Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi* (Jakarta: UI-Press, 1987), hal. 1

¹⁰¹ Aan Kumar telah menarik beberapa perbandingan eksplisit antara tatanan sosial rural yang berkembang di Jawa dan Prancis sepanjang abad ke-18. Di situ ia telah mencapai kemajuan dengan secara sadar memasukkan sejarah Jawa Kuno kedalam sejarah dunia modern yang lebih luas. Benedict Anderson, *Hantu Komparasi* (Yogyakarta: Qalam, 2002), hal. 191

kebudayaan asli. Akan tetapi lambat laun unsur kebudayaan aslinya diubah dan diganti oleh unsur-unsur kebudayaan asing tersebut.¹⁰²

Menurut Emile Durkheim masyarakat mentransendensi kesadaran individu. Ia secara materiil berada di atas individu karena ia merupakan kualisi dari semua kekuatan individu. Keunggulan materi ini, jika berdiri sendiri, tidak ada gunanya. Individualitasnya dihayati manusia dalam tindakannya yang sadar dan disengaja. Ia adalah bebas dan harus menentukan sendiri apa yang harus dilakukannya dan apa yang tidak. Mau tak mau ia harus mengambil sikap terhadap alam dan masyarakat dan sekelilingnya.¹⁰³ Alam semesta juga lebih tinggi dari individu tetapi bukan pada masalah moral.¹⁰⁴ Masyarakat lebih dari sekedar kekuatan materi ia adalah sebuah kekuatan moral. Masyarakat mengungguli kita secara fisik, materi dan moral. Peradaban adalah hasil kerjasama manusia yang berlangsung dari generasi ke generasi, ia pada hakikatnya adalah suatu produk sosial.

Masyarakat melahirkan peradaban, melestarikannya dan mewariskannya kepada individu. Peradaban merupakan kumpulan dari segala sesuatu yang kita pandang memiliki nilai tertinggi, ia merupakan kongregasi dari nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi. Sebab ia sekaligus merupakan sumber dan pelindung peradaban, saluran melalui mana ia tiba pada kita, masyarakat tampak

¹⁰² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hal. 325

¹⁰³ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hal. 15

¹⁰⁴ Moral berasal dari bahasa latin *mos* (Jamak: *mores*) yang berarti juga: kebiasaan, adat. Dalam bahasa Inggris dan banyak bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia (pertama kali dimuat dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1988), kata *mores* masih dipakai dalam arti yang sama. Kess Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia, 2004), hal. 4

mempunyai realitas yang jauh lebih kaya dan jauh lebih tinggi dari realitas yang kita miliki. Peradaban adalah suatu realitas dari mana segala sesuatu yang penting bagi kita mengalir. Namun demikian, ia berada di atas kita dalam segala hal, sebab dari gudang intelek dan kekayaan moral ini, dan ia juga sekaligus pelindungnya, kita hanya bisa menerima paling banyak beberapa serpihan saja. Semakin kita maju dalam waktu semakin kompleks dan luaslah peradaban kita, dan karenanya ia semakin mentransendensi kesadaran individu dan semakin kurang individu merasakan keterikatannya pada masyarakat.¹⁰⁵

C. Teori-Teori Modern Mengenai Perubahan Sosial

Teori-teori modern yang terkenal ialah antara lain, teori-teori modernisasi para penganut pendekatan fungsionalisme seperti Neil J. Smelser dan Alex, teori ketergantungan Andre Gunder Frank yang merupakan pendekatan konflik, dan teori mengenai sistem dunia dari Wallerstein.

Diantara teori-teori klasik dan teori modern kita dapat menjumpai benang merah. Sebagaimana halnya dengan pandangan mengenai perkembangan masyarakat secara linear yang dikemukakan oleh tokoh klasik seperti Comte dan Spencer, maka teori-teori modernisasipun cenderung melihat bahwa perkembangan masyarakat Dunia Ke Tiga berlangsung secara evolusioner dan linear dan bahwa masyarakat bergerak ke arah kemajuan dari tradisi kemodernitas. Para penganut teori konflik, dipihak lain, melihat bahwa

¹⁰⁵ Emile Durkheim, *Sosiologi dan Filsafat* (Jakarta: Erlangga, 1989), hal. 57-58.

perkembangan yang terjadi di Dunia Ke Tiga justru menuju keterbelakangan dan pada ketergantungan pada negara-negara industri maju di Barat.

Teori modernisasi. Teori modernisasi menganggap bahwa negara-negara terbelakang akan menempuh jalan sama dengan negara industri maju di Barat sehingga kemudian akan menjadi negara berkembang pula melalui proses modernisasi. Teori berpandangan bahwa masyarakat yang belum berkembang perlu mengatasi berbagai kekurangan dan masalahnya sehingga dapat mencapai tahap tinggal landas kearah perkembangan ekonomi. Menurut Etzioni transisi dari keadaan tradisional ke modernitas melibatkan revolusi demografi yang ditandai menurunnya angka kematian dan angka kelahiran, menurunnya ukuran dan pengaruh keluarga, terbukanya sistem stratifikasi, peralihan dari stuktur feodal atau ke sukuan kesuatu birokrasi, menurunnya pengaruh agama, beralihnya fungsi pendidikan dari keluarga dan komunitas ke sistem pendidikan formal, munculnya kebudayaan masa, dan munculnya perekonomian pasar dan idustrialisasi.¹⁰⁶

Dunia modern menimbulkan keterasingan pengalaman atau proses yang berkaitan dengan penyembunyian yang memisahkan rutinitas kehidupan sehari-hari dari fenomena-fenomena sebagai berikut: kegilaan, kriminalitas, penyakit dan kematian dan seksualitas.¹⁰⁷ Keterasingan terjadi sebagai akibat dari

¹⁰⁶ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, hal. 217

¹⁰⁷ Bahwa istilah modern dan post-modern terus menjadi perdebatan menunjukkan kompleksitas persoalan yang dicakup didalamnya. Menurut Jurgen Habermas kedua istilah itu lalu menjadi suatu aliran pemikiran atau kecendrungan berpikir tertentu, maka menjadi modernisme untuk mereka yang mendukung kompleksitas fenomena modenitas dan post-modenisme untuk mereka yang menyatakan bahwa telah lahir kompleksitas fenomena baru yang boleh diberi nama post-modernitas. Di tengah-tengah kompleksitas perdebatan dalam dunia arsitektur dan estetika ini keadaan menjadi

meningkatnya peran sistem abstrak dalam kehidupan sehari-hari keterasingan membawa kita kepada keamanan ontologis yang makin besar, tetapi dengan risiko, mengesampingkan kehidupan sosial dari masalah eksistensial fundamental yang menimbulkan delima moral utama bagi umat manusia.

Meninjau sejumlah persepektif teoritis yang melihat kehidupan kontemporer dari sudut pandang modern. Anthony Giddens melihat modernitas sebagai sebuah panser raksasa yang menawarkan sejumlah keuntungan, namun juga memunculkan berbagai ancaman bahaya. Diantara bahaya yang ditekankan Giddens adalah risiko yang berkaitan dengan gerakan panser raksasa modern. Bahaya ini menjadi masalah kunci dalam karya Beck tentang masyarakat berisiko. Kehidupan modern menurutnya ditandai oleh risiko dan kebutuhan dipihak masyarakat untuk mencegah risiko dan untuk melindungi diri mereka dari risiko. Ridzer melihat rasionalitas sebagai ciri utama masyarakat kontemporer, meski diperkeras dengan berbagai cara, termasuk McDonaldisasi. Sementara Ridzer melihat restoran cepat saji sebagai paradigma rasionalitas dan modernitas itu. Penekanan terhadap restoran cepat saji, dan lebih ekstrem lagi terhadap Holocaust, menunjukkan irasionalitas dan lebih umum lagi terhadap bahaya yang berkaitan dengan modernitas dan peningkatan rasionalisasi. Kemudian, dibahas karya Habermas pun memusatkan perhatian pada modernitas, rasionalitas, tetapi ia menekankan pada dominasi rasionalitas sistem dan proses pemiskinan

makin tidak sederhana kritikan tema post-modernitas masuk kedalam alam pemikiran filosofis. F. Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hal. 179-180.

rasionalitas kehidupan dunia. Modernitas menurut Habermas dapat diselesaikan dan disempurnakan dengan saling memperkaya rasionalitas sistem dan rasionalitas kehidupan dunia.¹⁰⁸

Teori ketergantungan. Menurut teori ketergantungan yang didasarkan pada pengalaman negara-negara Amerika Latin perkembangan dunia tidak merata, Negara-negara industri menduduki posisi dominan sedangkan negara-negara Dunia Ketiga secara ekonomis tergantung padanya. Perkembangan negara industri dan keterbelakangan negara-negara Dunia Ketiga, menurut teori ini, berjalan bersamaan: dikala negara-negara industri mengalami perkembangan, maka negara-negara Dunia Ketiga yang mengalami kolonialisme dan neokolonialisme, khususnya di Amerika Latin, tidak mengalami tinggal landas tetapi justru menjadi terbelakang.¹⁰⁹

Marx memandang adanya serangkaian tahap dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang kompleksitas teknologinya semakin meningkat dari tahap masyarakat pemburu primitif kemasyarakat industrialis moderen setiap tahap memiliki *mode produksi* yang cocok untuk tahap tersebut. Menurut Marx dalam setiap tahap terkandung benih perusak dirinya sendiri, karena setiap tahap tidak dapat menghindarkan terciptanya kondisi yang merusakkan tahap itu untuk menuju ketahap selanjutnya. Menurut Marx, disetiap masyarakat terdapat kekuatan yang bertentangan dan bersintesis yang lain adalah kekuatan ekonomi

¹⁰⁸ Douglas J. Goodman, George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 599

¹⁰⁹ *Ibid*, hal. 218

atau material, sejarah, dengan demikian, adalah sebuah gerakan kontradiksi dan penyelesaian atas faktor-faktor ekonomis. Produksi sarana-sarana penopang kehidupan adalah dasar segala struktur sosial, konflik sosial dan karenanya juga dasar dari semua transformasi sosial.

Dalam konteks demikian ini Marx memandang kapitalisme sebagai salah satu dari perkembangan dan perubahan masyarakat. disatu sisi ia menilai kapitalisme sebagai sesuatu yang kejam dan eksploitatif, namun disisi lain kapitalisme merupakan persiapan yang memang diperluca dalam peralihan menuju komunisme. Banyak orang secara intuitif percaya bahwa kapitalisme buruk bagi kehidupan orang.¹¹⁰ Ia berkeyakinan bahwa pada akhirnya keruntuhan kapitalisme dan kemunculan komunisme akan menjadi kenyataan yang sama sekali tidak bisa ditolak, terlepas dari adanya upaya apa pun yang dilakukan oleh para kapitalis untuk menghindari kenyataan tersebut.

Marx, dalam persoalan ini mengkhhususkan perhatiannya terhadap sistem produksi dan perkembangan teknologi yang menurutnya bahwa perkembangan demikian itu menimbulkan dua kelas masyarakat, yaitu kelas yang terdiri dari sejumlah kecil orang yang memiliki modal sehingga menguasai alat-alat produksi yang disebut kelas borjuis, dan kelas yang terdiri dari orang tidak memiliki modal atau alat-alat produksi disebut kelas ploreter.¹¹¹

¹¹⁰ Francis Fukuyama, *The Great Disruption* (Yogyakarta: Qalam, 2004), hal. 401

¹¹¹ Zainuddin Maliki, *Tiga Teori Sosial Hegemonik* (Surabaya: LPAM, 2003), hal. 158-159

Teori sistem dunia. Menurut teori yang dirumuskan Immanuel Wallerstein ini perekonomian kapitalis dunia ini tersusun atas tiga jenjang: negara-negara inti, negara-negara semi-periferi, dan negara-negara periferi. Negara-negara inti terdiri atas negara-negara Eropa Barat yang sejak abad 16 mengawali proses industrialisasi dan berkembang pesat, sedangkan negara-negara semi-periferi merupakan negara-negara Eropa Selatan yang menjalin hubungan dengan negara-negara inti dan secara ekonomis tidak berkembang. Negara-negara periferi merupakan kawasan Asia dan Afrika yang semula merupakan kawasan eksteren karena berada diluar jaringan perdagangan negara-negara inti tetapi kemudian melalui kolonisasi ditarik kedalam sistem dunia. Kini negara-negara inti yang kemudian mencakup pula Amerika Serikat dan Jepang mendominasi sistem dunia sehingga mampu memanfaatkan sumberdaya negara lain untuk kepentingan mereka sendiri sedangkan kesenjangan yang berkembang antara negara-negara inti dengan negara lain sudah sedemikian lebarnya sehingga tidak mungkin tersusun lagi.¹¹²

Teori sistem dunia kini. Pemikir Marxis mengkritik perspektif sistem dunia karena kegagalannya menjelaskan secara memadai hubungan antara kelas-kelas sosial. Marx melihat masyarakat manusia sebagai sebuah proses perkembangan

¹¹²Selama dua dasawarsa lalu, ekonomi Amerika melakukan serangkaian transformasi terbuka terhadap perusahaan-perusahaan tuanya yang berukuran besar yang mulai mengalami kemerosotan. Amerika pun menjalankan restrukturisasi terhadap beberapa perusahaan yang tersingkir dari bisnis. Restrukturisasi perusahaan adalah upaya terakhir dari serangkaian eufimisme yang digunakan oleh para konsultan manajemen untuk tidak mengatakan program pemecatan besar-besaran pegawai atas nama produktifitas lebih besar. Francis Fukuyama, *Trust* (Yogyakarta: Qalam, 2002), hal. 275

yang akan menyudahi konflik melalui kelas-kelas tertentu (konflik)¹¹³. Menurut pandangan mereka Wallerstein memusatkan perhatian pada masalah yang keliru. Bagi pemikir Marxis, kuncinya bukanlah pembagian kerja internasional antara kawasan pusat dan pinggiran, tetapi adalah masalah hubungan kelas dalam masyarakat tertentu. Bergerr berupaya mendamaikan perbedaan pendapat ini dengan menyatakan bahwa dikedua pihak ada kekuatan dan kelemahannya. Menurut pendapatnya yang berdiri ditengah ini hubungan pertukaran yang timpang ini tak hanya ditemukan dalam hubungan antara kawasan pusat dan pinggiran, tetapi juga dalam hubungan kelas global. Pendirian kuncinya adalah bahwa hubungan pusat pinggiran adalah penting, tak hanya sebagai hubungan pertukaran seperti ditegaskan Wallerstein, tetapi juga, dan lebih penting, sebagai hubungan kekuasaan ketergantungan, yakni hubungan kelas. Belakangan ini teoritisi sistem dunia telah mendorong teori tersebut agar untuk membahas situasi dunia sekarang masa yang akan datang serta masa-masa sebelum modern.¹¹⁴

D. Pendidikan Sebagai Transformator Sosial

Pendidikan adalah memanusiakan manusia sehingga akan mencapai proses kecakapan fundamental secara emosional dan intelektual. Pendidikan juga semacam intisari murni dan mistis yang takkan lekang oleh waktu dan kekal dan tegak selama-lamanya. Menurut pandangan ini, pendidikan sejati mesti

¹¹³ Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial* (yogyakarta: Kanisius, 1994), hal. 134

¹¹⁴ Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, hal. 209-2010

sepenuhnya terceraikan dari politik, sepenuhnya jauh dari percaturan sosial, dan sepenuhnya mengejar tujuan-tujuan sendiri. Pendidikan menjadi metode yang tidak ada urusan apa-apa dengan *melieu* kebudayaan akan sama hebatnya ditiap tempat disegala zaman. Inilah salah sebuah kekeliruan yang paling berbahaya; sumber segala dosa para pendidik Amerika yang sempat keliling dunia. Dari satu tempat ketempat lain, para pendidik itu mengepak sekopor konsep dan panduan yang itu-itu juga membawa bahan yang persis sama buat masyarakat maju ataupun masyarakat terbelakang, buat masyarakat statis maupun masyarakat yang terlibat gejolak perubahan cepat dan mendasar.¹¹⁵

Satu-satunya pendidikan yang sejati datang dari rangsangan terhadap kemampuan-kemampuan seorang anak melalui tuntutan-tuntutan situasi sosial dimana anak itu menemukan dirinya lewat tuntutan-tuntutan itu si anak dirangsang untuk bertindak sebagai anggota dari sebuah kesatuan, untuk berkembang dari kesempatan tindakan dan perasaan semula, dan untuk memahami dirinya dari titik tolak kesejahteraan kelompok dimana ia menjadi bagiannya. Melalui tanggapan-tanggapan yang dibuat oleh orang lain terhadap tindakan-tindakannya ia menjadi tahu apa arti semua tindakan tadi dalam ranah sosial. Nilai yang mereka miliki terpantul kembali kepada mereka umpamanya, lewat tanggapan yang dibuat terhadap celoteh naluriannya, si anak menjadi tahu apa arti celoteh itu, ucapan-ucapan yang tidak dimengerti berubah menjadi bahasa yang

¹¹⁵ Ivan Illich, *Menggugat Pendidikan* (Jogjakarta: Pustaka Belajar, 2006), hal. 358

bermakna, dan dengan begitu maka si anak dikenalkan dengan kekayaan gagasan dan emosi yang menyatu, yang kini telah tersimpul didalam bahasa.

Seluruh pendidikan dilaksanakan melalui peran serta individu didalam kesaran sosial rasnya kesadaran proses itu dimulai sacara tidak disadari nyaris sejak dia lahir dan terus berkelanjutan membentuk kemampuan induvidual memenuhi ksadasarnya, membentuk kebiasaan-kebiasaan, melatih gagasannya, dan membangkitkan perasaan-perasaan dan emosi-emosinya. Lewat pendidikan yang tidak disadari, induvidu secara bertahap mulai berbagi sebagai sumber daya intelektual dan moral yang telah dikumpulkan oleh umat manusia. ia menjadi pewaris simpanan modal peradapan. Pendidikan yang paling formal dan paling teknis didunia tidak bisa menyingkir secara aman dari proses secara umum ini. Ia hanya bisa mengorganisir proses itu atau membuatnya berbeda dengan arah-arrah tertentu saja.¹¹⁶

Sudah kita lihat bahwa proses pendidikan bukanlah suatu proses untuk melestarikan suatu struktur kekuasaan tertentu. Proses pendidikan bahkan sebaliknya menjadi penggerak dari proses demokratisasi. Dengan pendidikan yang demikian, maka individu akan terlepas dari belenggu kekuasaan yang secara tidak sadar ingin dilestarikan melalui sistem biokrasi. Untuk melakukan transformasi, yang paling awal konteks sosial pengajaran, dan kemudian membedakan antara pendidikan yang membebaskan yang tradisional. Sistem

¹¹⁶ Wiliam F.O'neil, *Ideologi-Ideologi Pendidikan* (Yogjakarta: Pustaka Belajar,2002), hal. 380-381

persekolahan diciptakan oleh kekuatan politik yang menjadi inti kekuasaan yang ada jauh diluar ruang kelas.¹¹⁷ Memang ada yang mengatakan bahwa pendidikan bukanlah segala-galanya artinya pendidikan bukan merupakan kunci dari segala perubahan sosial. Memang benar, pendidikan yang kita kenal, yakni pendidikan formal di sekolah-sekolah formal tidak dengan sendirinya dapat mengubah struktur kehidupan sosial. Namun, suatu perubahan biasanya muncul dari para pemimpin dan individu-individu yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan bersama. Individu atau pemimpin-pemimpin yang berpengaruh tersebut adalah hasil pendidikan yang dapat melihat ketimpangan-ketimpangan dalam masyarakat. Kebanyakan masyarakat menjadi tidak berdaya karena sistem kekuasaan yang ada sehingga sukar sekali untuk mendobrak kepentingan-kepentingan dari sekelompok penguasa yang ingin melestarikan kekuasaannya.¹¹⁸

Suatu lembaga pendidikan yang tidak profesional ditandai adanya manajemen pendidikan yang statis yang umumnya bisa dicontohkan dengan, misalnya, bahwa lembaga itu hanya diurus oleh dan dengan menekankan kekuatan kelompok, ikatan darah atau keturunan etnis dan wibawa institusi ideologis keamanan tertentu. Sedangkan lembaga pendidikan yang profesional lebih menekankan kepada manajemen kompetitif dan kreatif serta kompetensi pribadi serta korporasi rasional dan ilmiah sesuai perkembangan zaman.¹¹⁹

¹¹⁷ Paulo Freire, *Menjadi Guru Merdeka* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal. 50

¹¹⁸ H.A.R Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan*, hal. 263

¹¹⁹ Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal. 13

Dalam sistem pendidikan yang membebaskan, maka sistem yang ada menjadi pertanyaan dan menjadi persoalan.¹²⁰ Dengan demikian, kecenderungan untuk melestarikan suatu sistem yang ada menjadi terbuka dan masyarakat akan terlihat hal-hal yang merugikan perkembangan pribadi dan hidup bersama tidak mengherankan apabila negara-negara industri maju juga menempatkan masalah pendidikan sebagai prioritas yang utama dan diberikan tempat yang penting baik dalam sistem penganggaran negara maupun platform perjuangan politik.

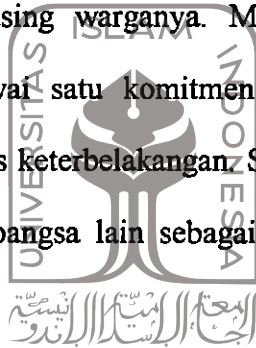
Ketidak berdayaan pendidikan dalam menghadapi krisis manusia modern telah menyebabkan para pemikir kontemporer seperti Derrida, Foucault memformulasikan langkah-langkah dekonstruktif atas tradisi strukturalisme sebagai akar krisis pendidikan yang membelenggu. Bagi kalangan dekonstruksionis, makna tidak inheren dalam teks. Mereka beranggapan bahwa teks hanya akan eksis jika di dalam terdapat dialog dengan sang penafsir. Ini berarti teks sebenarnya bersifat dipenden, oleh sebab itu, konsekuensi dari dipendensi teks tersebut adalah munculnya banyak makna bukan single meaning. Inilah era awal era yang dikenal dengan post-modernisme.¹²¹

Bangsa yang tidak memperhatikan pendidikan akan ketinggalan dalam kehidupan global yang penuh persaingan dan kerjasama. Bangsa-bangsa yang

¹²⁰ Paulo Freire memformulasi filsafat pendidikannya sendiri, yang dinamakannya sebagai pendidikan kaum tertindas, sebuah sistem pendidikan yang ditempa dan dibangun kembali bersama dengan dan bukan diperuntukan bagi, kaum tertindas. Sistem pendidikan pembaharu ini kata Paulo, adalah pendidikan untuk pembebasan-bukan untuk penguasaan. Pendidikan harus menjadi proses pemerdekaan, bukan penjinakan sosial budaya. Paulo Freire, *Politik Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2002), hal. xiii.

¹²¹ Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal* (Yogyakarta: Ircisod, 2004), hal. 09

maju karena pendidikannya yang membebaskan dan mengembangkan daya kreatifitas akan menempatkan bangsa tersebut sebagai bangsa pemenang dalam persaingan bebas. Sedangkan bangsa-bangsa yang tidak mementingkan pendidikan bukan hanya menghasilkan bangsa yang lebeh seperti kata Myrdal, juga bangsa-bangsa yang akan menjadi bahan eksploitasi dari negara-negara maju. Negara-negara miskin hanya dapat mengangkat dirinya dari kemiskinan, baik kemiskinan rohani maupun kemiskinan ekonomi, melalui penyadaran kemampuan dan masing-masing warganya. Masyarakat bersama-sama dengan pemerintahannya mempunyai satu komitmen untuk meningkatkan kesadaran anggotanya dalam mengatasi keterbelakangan. Sudah tentu, hal tersebut meminta kerjasama dengan bangsa-bangsa lain sebagai tanggung jawab moral bersama umat manusia.



Pedagogik (pendidikan) dalam masyarakat demokratis merupakan lahan subur bagi tumbuhnya masalah-masalah baru dalam pengelolaan pendidikan yang bertujuan untuk mentransformasikan masyarakat dari kehidupan tertentu menjadi terbuka, dari kemiskinan menuju kehidupan rakyat yang lebih baik. Pedagogik dengan demikian bukanlah pedagogik yang mati suri, yang tidak berkembang, yang tidak membahas mengenai masalah-masalah rutin tetapi masalah-masalah baru muncul dari tranformasi sosial yang sedang terjadi. Dalam masyarakat terbuka yang demikian tidak ada tempat bagi satu manajemen pendidikan tetapi berbagai bentuk manajemen pendidikan sesuai dengan kondisi setiap masyarakat. Tidak ada dua masyarakat yang sama dalam trasformasi sosial. Oleh sebab itu,

tidak ada satu model manajemen pendidikan yang berlaku untuk seluruh masyarakat dunia ini. Pendekatan studi kultural terhadap manajemen pendidikan merupakan suatu keharusan yang terus menerus dikaji dan dikembangkan termasuk di Indonesia.¹²²

Gramsci memformulasikan bahwa setiap hubungan pedagogis mengandung hubungan hegemonik; dimana hubungan pedagogis tersebut melibatkan hubungan kekuasaan dan dominasi. Tetapi dominasi tidak harus dipahami secara eksklusif, rigid dan kaku atau dipahami sebagai suatu paksaan atau juga dipahami sekedar penggunaan kekuasaan eksternal; tapi dominasi pada dasarnya adalah suatu konsensus atau bentuk penaklukan terhadap keinginan kelas atau masa subordinatif, gagasan Gramsci tersebut nampaknya sejalan dengan optimisme pendidikan sistematis Paulo, yang menurutnya pendidikan sistematis tidak lebih hanya sebagai instrumen reproduksi ideologi kelas dominan, reproduksi kondisi-kondisi untuk memelihara kekuasaan dan yang lebih gila bahwa pendidikan sistematis ternyata merupakan sub sistem dari sistem masyarakat sosial. Jika demikian adanya maka kebebasan pendidikan tentunya akan dibatasi oleh kepentingan suatu sistem sosial tertentu. Oleh karena itu ketika kita berbicara tentang reproduksi sebagai tugas kelas dominan, maka sudah seharusnya ada tugas tandingan terhadap tugas reproduksi kelas dominan tersebut.

Sekolah telah menjadi sesuatu yang sangat istimewa karena kehadirannya dalam jagat praktis bisa digunakan untuk membahasakan kepentingan-

¹²² *Ibid*, hal. 263-264

kepentingan dan ideologi-ideologi dominan. Dengan sekolah, manusia dapat meneruskan dan memuluskan cita-cita kekuasaannya, dalam tingkatan tertentu sekolah menjadi citra yang dapat membedakan kelas-kelas dalam masyarakat. Dalam pandangan kalangan konstruksionis yang dimotori oleh Lukman dan Berrgerr mengasumsikan bahwa sifat pemaksa utama dari masyarakat itu tidak terletak pada instrumen kontrol sosialnya, tetapi pada kekuasaannya untuk membentuk dan menerapkan dirinya sebagai sebuah realitas. Dalam hal ini contoh paradigmatiknya adalah bahasa, sebab bahasa merupakan hasil sejarah yang panjang mengenai kecerdikan, imajinasi dan bahkan kedengkian manusia.¹²³

Poinnya adalah aktifitas pendidikan menjadi penting jika dinyatakan ulang oleh anggota-anggota kelompok pendidikan pada pusat studi budaya kontemporer. Konsekuensinya reproduksi hanya bisa berjalan setelah pertimbangan ideologis. Kuncinya adalah dua fokus antara aktifitas sosialis dan feminis; artinya transformasi budaya, politik, dan pendidikan bentuk reproduksi akan sangat tergantung pada determinasi gender. Peran ideologi sebagai penentu reproduksi lebih disebabkan oleh adanya kekuatan kultural, wacana dan praktek yang dominan.

Solusinya adalah dehumansasi yaitu bentuk ungkapan nyata dari proses alienasi dan dominasi, sedangkan pendidikan yang humanis sebuah proyek oleh kaum tertindas dan terjajah. Jelas keduanya mengimplikasikan sebuah aksi yang dilakukan oleh mereka sendiri dari kehidupan sosial untuk melanggengkan status

¹²³ Ruhendi, *Paradigma Pendidikan*, hal. 172-173

quo, atau untuk mengubah dunia secara radikal. Di sini perlu ditegaskan lagi apa yang sebenarnya terjadi dan keterkaitan antara proses dehumanisasi dan pendidikan yang humanis. Sekali lagi, kedua membutuhkan aksi sosial untuk menjaga atau memodifikasi realitas mereka, masing-masing. Kita menekankan ini untuk membantah ilusi kaum idealis dan angan-angan pendidikan yang humanis yang tidak disertai dengan transformasi dunia yang tidak adil dan menindas. Ilusi semacam ini sebenarnya hanya melayani kepentingan pihak yang diuntungkan saja dan mengekspos ideologi yang menciptakan sindrom kemakmuran dengan cara meminta kaum tertindas untuk bersabar menunggu hari-hari yang lebih cerah, bukan sekarang, tetapi sebentar lagi akan segera datang.¹²⁴

Secara ontologis, pembahasan pendidikan selalu terkait dengan hakikat keberadaan manusia. Dari pembahasan panjang lebar itu, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa tanpa manusia pendidikan itu bukan apa-apa sebaliknya tanpa pendidikan, mustahil manusia mampu mempertahankan kelangsungan dan mengembangkan kehidupannya. Jadi, ontologi pendidikan sepenuhnya mutlak berakar dari dalam diri dan keberadaan manusia.¹²⁵ Secara ontologis, manusia berada dalam tiga tingkatan hakikat, yaitu pada abstrak, tingkat potensi dan tingkat konkret. Karena pendidikan mutlak berlangsung didalam diri dan

¹²⁴ Paulo, *Politik Pendidikan*, hal. 189-190

¹²⁵ Ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada, menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab akibat. Yaitu, ada manusia ada alam, dan ada *causa prima* dalam suatu hubungan menyeluruh, teratur, dan tertip dalam keharmonisan. Jadi, dari aspek ontologi, segala sesuatu yang ada ini berada dalam tatanan hubungan ekstetis yang diliputi dengan warna nilai keindahan. Suparlan Suhartono, *Filsafat Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006), hal. 97.

keberadaan manusia, ontologi pendidikan pun dapat dibahas menurut tingkat-tingkat keberadaan seperti itu. *Esensi abstrak pendidikan*. Maksud ungkapan ini adalah hakikat keberadaan pendidikan pada tingkat abstrak. Pada tingkat ini, pendidikan bernilai universal. Artinya mutlak adanya dan berlaku bagi manusia siapapun yang ada kapan dan dimanapun juga. *Esensi potensial pendidikan*. Pada tingkat keberadaan ini pendidikan adalah suatu daya yang mampu membuat manusia berada di dalam kepribadiannya sebagai manusia, bukan makhluk lainnya. *Esensi konkret pendidikan*. Pada tingkat ini, pendidikan terkait secara langsung dengan manusia individual. Dalam hal ini, pendidikan adalah daya yang mampu membuat setiap manusia individu berkesadaran utuh terhadap hakikat keberadaannya berdasar pada nilai asal mula dan tujuan kehidupannya.¹²⁶

Bertitik tolak dari berbagai macam definisi pendidikan sebagaimana dijelaskan di atas nampak jelas adanya keterkaitan antara apa yang ada di masyarakat dapat dikatakan, antara apa yang terjadi di masyarakat dengan apa yang menjadi kajian dunia pendidikan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Apabila salah satu sisi bergerak kedepan, maka sisi yang lain juga harus bergerak kedepan. Dunia pendidikan sempat mendapatkan kritikan yang tajam dari para pemerhati pendidikan sehubungan dengan kurang serasinya gerak dunia pendidikan dengan sistem masyarakat yang kemudian melahirkan predikat yang dialamatkan pada salah satu institusi pendidikan yang dianggap hanya sebagai menara gading. Terhadap adanya gejala produk pendidikan yang tidak

¹²⁶ *Ibid*, hal. 112-114 .

laku di masyarakat pun, kalau kita renungkan, sebenarnya adalah di sebabkan dari kurang membuminya dunia pendidikan dengan masyarakat.¹²⁷

Maksud utama pendidikan ialah pengembangan pemahaman dan penyadaran peserta didik atas dunia empirik yang mereka alami dan dunianya dimasa mendatang tujuannya ialah kemampuan peserta didik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya hari ini, disaat mereka menjalani pendidikan dan masa hidupnya nanti dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup masyarakatnya secara luas. Dengan demikian maka pendidikan harus mampu mengembangkan kemampuan peserta didik dan memecahkan segala persoalan yang sedang dan akan dihadapi.

Karena itu, pendidikan harus berusaha memperkaya pengalaman peserta didik memahami, memecahkan, dan berperan aktif di dunianya sendiri, bukan dunia guru, penguasa, dan pemilik atau pengelola pendidikan. Proses pembelajaran di kembangkan sesuai dunia peserta didik dan dunia yang diprediksi akan terjadi dan dialami nanti di masa depan.¹²⁸ Pembelajaran bagi anak-anak di kawasan perkotaan harus berbeda dengan mereka yang tinggal di pedesaan dengan mempertimbangkan kesepahaman menyilang bagi kedua pihak atas dunia masing-

¹²⁷ Mimbar, *Madrasah Dan Pemberdayaan Umat* (Surabaya: 2000), hal. 33

¹²⁸ Visi dasar atau tujuan umum dari proses pembelajaran, pengajaran, dan pendidikan, pada esensi nya adalah mendampingi manusia sedini mungkin untuk secara bertahap memanusiawikan dirinya agar menjadi dewasa dan mandiri, dan kemudian membina hubungan saling bergantung, dalam proses mengaktualisasikan seluruh potensinya menjadi manusia seutuhnya. Proses pembelajaran itu dapat dibedakan dalam tiga tahap, maturitiy continuum, yakni bergerak dari tahap bergantung (dependece) menuju tahap mandiri (independence) dan memuncak pada tahap bersaling bertanggung (interpendence). Andrias Harefa, *Menjadi Manusia Pembelajar* (Jakarta: Kompas, 2005), hal. 67

masing.¹²⁹ Dalam teori pendidikan lama, yang dikembangkan di dunia barat dikatakan bahwa perkembangan seseorang hanya dipengaruhi oleh pembawaan sebagai lawannya berkembang pula teori yang mengajarkan bahwa perkembangan seseorang hanya ditentukan oleh lingkungannya. Sebagai sintesisnya dikembangkan teori ketiga yang mengatakan bahwa perkembangan seseorang ditentukan oleh pembawaan dan lingkungannya.¹³⁰ Pendidikan tidak mempunyai sasaran puncak diluar pendidikan itu sendiri. Tujuannya berasal dari prosesnya sendiri dan istilah terbaik untuk menyebutnya adalah pemahaman. Konsep kunci dalam pemikiran Leo Toolstoy adalah kebudayaan. Konsep ini merangkum nilai-nilai masyarakat beradab yang tetap bertahan meski dihujani kritik dan dijadikan ajang klaim-klaim yang bertentangan. Kebudayaan tampil sebagai lumbung nilai-nilai yang besar, luas hedrogen yang disatukan secara longgar oleh kemampuan kebutuhan-kebutuhan masa kini suatu masyarakat, dan oleh kemampuan untuk memupuk petualangan untuk mencari modus-modus pelaku yang baru dan lebih baik.

Disini kembali kita teringat akan Raousseau. Bagi Raousseau, pendidikan adalah jalan pembebasan individu dari prasangka-prasangka dan cara melepaskan individu dari dampak tradisi yang memandekkan. Guru idealnya Raousseau mungkin sangat permisif, namun tetap saja akan menyuguhkan, secara halus, arah

¹²⁹ Abdul Munir Mulkhan, *Nalar Spiritual Pendidikan* (Yogyakarta: Tiara Wacarna, 2002), hal. 215

¹³⁰ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Persepektif Islam* (Bandung: Rosda Karya, 2004), hal. 34

yang pasti yang menentukan arah ini adalah kehendak masyarakat umum yang terungkap dalam serangkaian nilai yang universal ataupun final seperti kata plato, melainkan objektif, konserfatif dan stabil.¹³¹ Tolstoy tak henti menyatakan penolakannya atas pandangan seperti itu. Ia tidak menyangkal pentingnya nilai-nilai utilitarian yang secara tak disengaja akan muncul dari pendidikan, namun ia bersikeras menganggap pendidikan sebagai proses membebaskan individu supaya bisa berimprovisasi secara kreatif, melalui pemahaman.¹³²

Perkembangan masyarakat akan membawa pengaruh terhadap perkembangan nilai, prinsip, dan prosedur dalam pendidikan. Dahulu, misalnya, nilai yang dianggap baik adalah *patuh* tanpa mempertanyakan alasan dan tujuan; distribusi normal dalam tiap kelompok dianggap sebagai prinsip yang harus dipegang; dan mengulang-ulang dianggap sebagai prosedur mengajar yang paling baik diterapkan untuk segala macam bidang ajaran.

Berbagai usaha pembaruan (reformasi) memang telah dilakukan, namun kini yang sebenarnya diperlukan adalah *transformasi pendidikan*, dimana hakekat lembaga, dan fungsi pendidikan dikembangkan dengan menggunakan nilai, prinsip, dan prosedur baru secara menyeluruh. Beberapa kecenderungan baru

¹³¹ Konservatif beranggapan bahwa sasaran, sekolah adalah kelestarian dan penerusan pola-pola sosial serta tradisi-tradisi yang sudah mapan. Ada dua ungkapan dasar konserfatif dalam pendidikan, yang pertama adalah konservatisme pendidikan religius, yang menekankan peran sentral pelatihan rohaniah sebagai landasan pembangunan karakter moral yang tepat yang kedua adalah konservatisme pendidikan sekular, yang memusatkan perhatiannya pada perlunya melestarikan dan meneruskan keyakinan-keyakinan dan praktek-praktek yang sudah ada, sebagai cara untuk menjamin pertahanan hidup secara sosial serta efektifitas secara kuat oleh orientasi pendidikan. Wiliam, *Ideologi Pendidikan*, hal. 106

¹³² Ivan Illich, *Menggugat Pendidikan*, hal. 491

berikut ini, menurut pendapat Yusuf Hadi Miarso dapat dijadikan dasar pertimbangan perlunya usaha transformasi itu.

Belajar menyelidik, yaitu meliputi kemampuan seseorang dalam menggunakan proses dan prosedur intelektual untuk memecahkan masalah akademis maupun praktis yang dihadapinya. Dalam kalangan ilmu alamiah kemampuan ini disebut dengan "belajar menemukan" dan dalam kawasan ilmu budaya sering disebut "belajar berkreasi". Prinsip ini dalam pelaksanaannya dicerminkan dengan kekurangannya penjelasan atau ceramah oleh guru, dan dengan meningkatnya kegiatan meneliti-baik secara mandiri maupun kelompok oleh peserta didik. Heathers berpendapat bahwa fungsi pendidikan yang paling penting adalah mengembangkan kemampuan menyelidik tiap orang agar ia dapat memecahkan persoalan hidupnya sendiri, serta merupakan peserta yang efektif dalam memecahkan masalah kelompok. Prinsip ini serasi digunakan dalam masyarakat dimana pengetahuan dan penerapannya mengalami perubahan yang cepat.

Belajar mandiri, prinsip ini sangat erat hubungannya dengan belajar menyelidik, yaitu berupa pengarahan dan pengontrolan diri dalam memperoleh dan menggunakan pengetahuan. Kemampuan ini penting karena keberhasilan dalam kehidupan akan di ukur dari kesanggupan bertindak dan berpikir sendiri, dan tidak tergantung kepada orang lain. Paling sedikit ada dua kemungkinan untuk melaksanakan prinsip ini, yaitu: *pertama*, digunakan program belajar yang mengandung petunjuk untuk belajar sendiri dengan bantuan guru yang minimal;

dan *kedua*, melibatkan siswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajarnya sendiri.

Belajar struktur bidang studi, materi atau informasi dalam bidang studi berkembang sejalan dengan perkembangan pengetahuan. Karena kemampuan manusia terbatas, sedang informasi terus bertambah, maka cara yang lebih bermakna adalah bila kita mampu mempelajari gagasan umum yang dijadikan dasar dalam menyusun, menafsirkan dan memperkirakan gejala yang ada dalam bidang studi itu, atau dengan kata lain dengan mempelajari struktur bidang studi. Mempelajari struktur ini dapat dilakukan melalui pemahaman konsep, prinsip, prosedur, dan model teoritik. Cara ini akan lebih ekonomis dan praktis. Mengingat ada sejumlah informasi dan fakta dasar yang harus dikuasai, namun dengan menguasai struktur tersebut fakta dan informasi dan selanjutnya dapat disimpan dalam berbagai macam sarana bantu yang dapat diambil kembali sewaktu-waktu diperlukan.

Pendidikan untuk perkembangan kepribadian, perkembangan ini merupakan perkembangan segala aspek kepribadian secara utuh bukan hanya menekankan pada aspek kognitif saja, melainkan pula keyakinan, minat, dan nilai yang membentuk pribadi seseorang, dengan ini seseorang akan dapat menentukan tujuan hidupnya, mengembangkan gaya hidupnya dan mampu bertindak yang serasi dan selaras dengan lingkungannya. Perhatiannya juga diberikan pada perkembangan harga diri, disiplin, dan konsep diri yang positif. Prinsip ini dapat

ditunjang pelaksanaannya di sekolah bila sejak dini anak dilatih untuk mampu mengarahkan kegiatan dirinya, dan berdisiplin dalam melaksanakan kegiatan itu.

Pendekatan sistem, sebagai suatu prosedur yang dikembangkan dalam manajemen, telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang pendidikan digunakan dalam proses pemecahan masalah yang berorientasi pada kepentingan peserta didik. Proses ini menurut Kaufman meliputi unsur-unsur identifikasi masalah, penentuan alternatif dan persyaratan pemecahan, pemilihan strategi pemecahan dari alternatif yang ada, pelaksanaan strategi yang dipilih, menentukan efektivitas penyelenggaraan dan refisi pada setiap langkah dalam proses. Proses itu merupakan proses yang berkelanjutan, suatu proses yang senantiasa diperbaiki sesuai dengan adanya masukan baru.

Belajar mencapai penguasaan, prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa tiap peserta didik mampu menguasai apa yang dipelajarinya. Asumsi lama menganggap bahwa derajat pencapaian belajar peserta didik akan terdistribusi secara normal dalam suatu kelompok. Jadi kalau asumsi lama menilai keberhasilan belajar dengan jalan memperbandingkan pencapaian peserta didik dengan tema sekelompoknya, maka asumsi baru membandingkannya dengan penguasaan atas tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Penguasaan atas tujuan ini merupakan standar bagi semua peserta didik, dengan ketentuan bahwa tiap peserta didik mendapat tugas yang sesuai dengan kemampuannya, serta bahwa kepada mereka itu dapat disediakan bahan, waktu, dan bimbingan yang diperlukan untuk keberhasilannya. Dengan prinsip ini maka peranan utama guru

adalah mengelola kegiatan belajar peserta didik dan memberikan bimbingan yang diperlukan.

Persebaran waktu, pendidikan itu berlangsung sepanjang waktu. Terutama waktu jaga setiap orang. Apabila setiap peserta didik perlu waktu tidur tujuh jam sehari, maka tujuh belas jam waktu juga setiap hari merupakan waktu potensial untuk terselenggaranya pendidikan. Berkaitan pula dengan konsep pendidikan seumur hidup, maka pendidikan itu mempunyai waktu yang sangat luwes. Suatu sistem pendidikan hendaknya tidak dibatasi pada waktu sekolah saja, melainkan pula waktu lain baik yang terorganisasikan secara ketat maupun yang longgar.

Ekonomi pendidikan, pendidikan sebagai suatu proses yang menciptakan hasil, tidak mungkin terbebas dari pertimbangan ekonomi. Ditinjau dari segi pembiayaan komponen pembiayaan untuk guru merupakan jumlah yang terbesar, oleh karena itu harus dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Dalam penggunaan sumber-sumber lain pun harus dipertimbangkan biaya yang paling ekonomis. Bila ada sejuta guru SD tentu tidak akan ekonomis untuk menuntut agar masing-masing guru membuat SAP atau SATPEL, belum lagi kalau dipertimbangkan kualitasnya. Biaya penataran guru yang diselenggarakan secara tradisional perlu dipertanyakan aspek ekonominya.

Keanekaragaman sumber, pada awal kebudayaan, manusia memperoleh pendidikan dari alam sekitarnya. Dalam perkembangan kemudian ada orang-orang tertentu yang diberi wewenang khusus untuk memberikan pendidikan yang kemudian kita kenal dengan sebutan “guru”. Namun, guru bukanlah satu-satunya

sumber bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikannya. Guru hanyalah salah satu sumber insani, dan disamping itu masih ada lagi sumber non insani. Sumber-sumber insani ini harus pula dilengkapi dengan sumber non insani berupa lingkungan, alat, media, dan sebagainya. Peranan guru sebagai penyaji informasi tidak lagi tepat dalam perkembangan ini. Karena hal itu dapat dilakukan oleh media.

Diferensiasi peranan, sejalan dengan adanya berbagi macam sumber insani, maka guru harus berbagi peranan dengan orang lain yang mempunyai tugas dan fungsi khusus. Semua orang lain yang mempunyai tugas dan fungsi khusus. Semua orang tergantung kedalam suatu tim intruksional; dan masing-masing orang disamping mempunyai keahlian dalam bidang tanggung jawabnya, juga memahami peranannya. Guru tidak lagi mempunyai kewenangan tunggal dalam proses instruksional.

Persebaran tempat, erat kaitannya dengan persebaran waktu, maka kegiatan pendidikan itu pada dasarnya dapat berlangsung dimana saja. Namun, bila mana dikehendaki, agar pendidikan itu terarah dan terawasi perlu ditata terlebih dahulu bentuk kelembagaan dan tata caranya. Penataan ini tidak harus dilakukan secara formal dalam suatu bentuk perundangan khusus, melainkan dapat pula berkembang sebagai suatu kebiasaan dalam masyarakat. Apabila penataan ini telah terselenggara, terdapatlah jaringan belajar di dalam masyarakat, atau yang disebut Husen “masyarakat belajar”.

Perkembangan teori dan prinsip, ilmu pendidikan bukan disiplin yang mati, melainkan berkembang sesuai dengan perkembangan daya pikir, keadaan, dan kebutuhan manusia. Sebagai ilmu terapan pendidikan pada mulanya banyak mengambil ajaran dari ilmu-ilmu murni, seperti filsafat, sosiologi, psikologi, dan sebagainya. Ajaran itu kemudian diramu dan dikembangkan lebih lanjut untuk digunakan dalam mensistematisasikan pengamatan, memberikan penjelasan, membuat prediksi, dan menyusun hipotesis atas gejala yang dipelajarinya. Bentuk teori pendidikan juga mengalami perkembangan, kalau semula kebanyakan bersifat deskriptif, maka teori baru yang bersifat prespektif.¹³³



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹³³ Yusuf Hadi Miarso, *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 594-598

BAB IV

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

1. Pendidikan Nasional.

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang secara historis dapat disebut sebagai *Indonesian Declaration Of Independence* menunjukkan dengan tegas pengungkapan keyakinan bangsa Indonesia (kemerdekaan adalah hak semua bangsa), visi kesejarahan (negara adalah hasil perjuangan bangsa), landasan fundamental kenegaraan (Pancasila), dan alasan ideologis berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Alasan negara didirikan sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan itu adalah untuk: mempertahankan bangsa dan tanah air, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam penciptaan perdamaian dunia yang abadi dan berkeadilan.¹³⁴

Bisa dikatakan bahwa setiap negara atau bangsa selalu menyelenggarakan pendidikan demi cita-cita bangsa yang bersangkutan. Beranjak dari sinilah nantinya dikenal pendidikan nasional yang didasarkan kepada filsafat bangsa dan cita-cita nasionalnya.

Pendidikan nasional merupakan pelaksanaan pendidikan suatu negara yang berdasarkan pada sosio kultural, psikologis, ekonomis dan politis, di mana dengan

¹³⁴ Malik Fadjar, *Platform Reformasi Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Logos, 2001), hal. ix.

jalan pendidikan tersebut ditujukan untuk membentuk ciri khusus atau watak bangsa yang bersangkutan, yang sering juga disebut dengan kepribadian nasional.

Pada umumnya pendidikan nasional ditujukan sebagaimana yang tersimpul dan dilukiskan oleh Wilds, yaitu nasionalisme dalam pendidikan bertujuan, terutama memelihara dan memuliakan negara.¹³⁵ Negara biasanya diartikan sebagai suatu masyarakat yang disusun demi tujuan utamanya melindungi warga negara dari bahaya serangan dari luar dan dis-integrasi yang terjadi di dalam negara itu.

Melalui proses pendidikan, suatu bangsa berusaha untuk mencapai kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang kehidupannya, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, dan dalam bidang-bidang kehidupan budaya lainnya. Melalui proses pendidikan pula, suatu bangsa berusaha untuk mencapai tujuan tertentu yang direncanakan.

Proses pendidikan yang diselenggarakan dan dilaksanakan suatu bangsa, dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan watak atau kepribadian bangsa, memajukan kehidupan bangsa dalam berbagai bidang kehidupannya, serta mencapai tujuan nasional bangsa yang bersangkutan, itulah yang disebut dengan sistem pendidikan nasional, yang biasanya tumbuh dan berkembang dari sejarah

¹³⁵ Pada permulaan abad ke-19 istilah nasionalisme dicetuskan oleh filsuf Jerman, Herder serta Uskup Prancis, Augustin De Barruel. Dalam khazanah bahasa Inggris sendiri istilah nasionalisme baru mulai dipakai pada tahun 1836 meskipun didalam pengertian yang bersifat tiologis, yaitu doktrin yang mengatakan bahwa bangsa-bangsa tertentu dipilih oleh Tuhan. Istilah nasionalisme cenderung diartikan sebagai egoisme nasional. Pengertian ini terus berkembang dan dewasa ini nasionalisme cenderung diartikan sebagai kebangsaan (*nationality*), kenasionalan (*nationalness*) yang semuanya berarti sebagai semangat nasional atau individualitas nasional.

bangsa yang bersangkutan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan sumberdaya serta potensi-potensi yang ada dikalangan bangsa itu disamping faktor-faktor luar lainnya.¹³⁶

Pendidikan sebagaimana juga ilmu pengetahuan itu sendiri adalah selalu berubah dan berkembang secara progresif.¹³⁷ Sejauh mana pendidikan nasional sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, itulah sebenarnya perkembangan suatu bangsa.

Ernest Renang dalam *Qu'est qu'une nation?* (Apakah Bangsa Itu?) Menegaskan bahwa bangsa adalah jiwa, suatu asas rohani, bangsa adalah suatu asas rohani yang timbul dari keadaan *historis* yang tersusun-susun secara mendalam, suatu keluarga yang mempunyai jiwa, bukan golongan yang ditentukan oleh keadaan pembentukan bumi. Asas rohani yang dimaksud Renang adalah *kehendak untuk hidup bersama* yang terbentuk dalam sejarah yang berliku-liku dan mewariskan kenangan kehendak masa lampau yang mendorong terciptanya persetujuan dalam bentuk untuk terus mempergunakan warisan yang diterima secara tidak terbagi. Jadi bangsa adalah suatu solidaritas besar, yang terbentuk karena adanya kesadaran bahwa orang telah berkorban banyak, dan bersedia untuk berkorban lagi. Bangsa-bangsa di dunia merupakan hasil tenaga

¹³⁶ Hasbullah, *Dasar-Dasar*, hal. 121-122.

¹³⁷ Hal ini terutama didasarkan kepada pandangan salah satu aliran dalam filsafat pendidikan, yaitu progresivisme yang menganggap pendidikan sebagai cultural transition, berarti pendidikan dianggap mampu berubah dalam arti membina kebudayaan baru yang dapat menyelamatkan manusia bagi hari depan yang makin kompleks dan menentang progresif artinya berkembang maju, suatu perubahan kearah kemajuan dari sebelumnya.

hidup dalam sejarah, karena itu merupakan golongan-golongan yang beraneka ragam dan tidak dapat dirumuskan secara pasti karena bersifat dinamis.¹³⁸

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan bangsa yang cerdas adalah kehidupan bangsa dalam segala sektornya, politik, ekonomi, keamanan, kesehatan, dan sebagainya, yang menjadi kuat dan berkembang dalam memberikan keadilan dan kemakmuran bagi setiap warga negara dan negara, sehingga mampu menghadapi gejolak apapun, baik yang bersifat domestik maupun internasional.

Pendidikan nasional mengatur secara terpusat, namun penyelenggaraan kegiatan dan satuan pendidikan dilaksanakan secara tidak terpusat. Dalam bahasa pendekatan sistem, dalam transformasi administratif atau pengelolaan sistem diselenggarakan secara sentralistis, sedangkan transformasi edukatif di satuan-satuan pendidikan di sekolah dan luar sekolah dilaksanakan secara desentralistis; penyelenggaraan satuan dan kegiatan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian ada satuan-satuan pendidikan negeri dan swasta. Pendidikan nasional mengatur bahwa satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat berkedudukan serta diperlakukan dengan penggunaan yang sama.¹³⁹

¹³⁸ Redja, *Pengantar Pendidikan*, hal. 191-192.

¹³⁹ *Ibid*, hal. 200

2. Sistem Pendidikan Nasional Indonesia

Dalam pengertian umum, yang di maksud dengan sistem adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya yang saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan. Setiap sistem pasti mempunyai tujuan, dan semua kegiatan dari semua komponen atau bagian-bagiannya yang akan dari tercapainya tujuan tersebut. Karena itu, proses pendidikan merupakan sebuah sistem yang disebut sebagai sistem pendidikan.

Secara teoretis, suatu sistem pendidikan terdiri dari komponen-komponen atau bagian-bagian yang menjadi inti dari proses pendidikan. Adapun komponen atau faktor-faktor tersebut terdiri dari: *Tujuan, Peserta didik, Pendidik, Alat pendidikan, Lingkungan.*

Maksud sistem pendidikan nasional disini adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan aktivitas pendidikan yang berkaitan dengan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, sistem pendidikan nasional tersebut merupakan suatu supra sistem, yaitu suatu sistem yang besar dan kompleks, yang didalamnya tercakup beberapa bagian yang juga merupakan sistem-sistem.

Satuan dan kegiatan pendidikan yang ada juga merupakan sistem pendidikan yang tersendiri, dan sistem pendidikan tersebut bergabung secara terpadu dalam sistem pendidikan nasional yang secara bersama-sama berusaha mencapai tujuan pendidikan nasional.

Tujuan sistem pendidikan nasional berfungsi memberikan arah pada semua kegiatan pendidikan dalam satuan-satuan pendidikan yang ada. Tujuan pendidikan nasional tersebut merupakan tujuan umum yang hendak dicapai oleh semua satuan pendidikannya. Meskipun setiap satuan pendidikan tersebut mempunyai tujuan sendiri, namun tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional.

Dalam sistem pendidikan nasional, peserta didiknya adalah semua warga negara. Artinya, semua satuan pendidikan yang ada harus memberikan kesempatan menjadi peserta didiknya kepada semua warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan kekhususannya, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, suku bangsa, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) berbunyi: Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 5 disebutkan ayat (1) setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; dan ayat (5) setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Dengan ketentuan dan sampai batas umur tertentu, dalam setiap sistem pendidikan nasional biasanya ada kewajiban belajar.¹⁴⁰ Setiap warga negara harus menjadi peserta didik, paling tidak biasanya pada jenjang pendidikan tingkat

¹⁴⁰ Untuk Indonesia Wajib Belajar mulai dicanangkan sejak tanggal 2 Mei 1994 oleh Presiden Soeharto, yang menetapkan bahwa setiap WNI minimal berpendidikan setingkat SLTP (Pendidikan Dasar).

dasar. Lamanya kewajiban menjadi peserta didik secara formal ini bervariasi antara sistem pendidikan nasional bangsa yang satu dengan yang lainnya.

Umumnya, bangsa-bangsa yang telah maju memberi kewajiban belajar kepada warga negaranya lebih lama dibandingkan bangsa-bangsa yang sedang berkembang. Sebenarnya, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, sistem pendidikan kita tampaknya cukup bagus meskipun bukan tanpa kekurangan. Pada jenjang pendidikan dasar di Indonesia dibagi dalam dua satuan pendidikan yaitu sekolah dasar yang dilaksanakan selama enam tahun dan sekolah lanjutan tingkat pertama selama tiga tahun. Jadi kalau persyaratan masuk SD/MI adalah anak yang sudah memenuhi usia tujuh tahun, pada waktu lulus pendidikan dasar setidaknya anak sudah berusia enam belas tahun karena harus melampaui pendidikan dasar selama sembilan tahun.

Berkaitan dengan pendidikan guru, dikenal dua istilah, yaitu *Teacher Training* (latihan guru) seperti KPG dan PGSD, dan *Educational for teachers* (pendidikan guru). Latihan guru, persiapan untuk suatu kejuruan (persiapan untuk menjadi guru), sedangkan pendidikan guru berarti persiapan menuju keahlian atau sebagai guru profesional. Untuk Indonesia kita mengenal adanya FKIP, Fakultas Tarbiyah, STIKIP, STIT, dan sebagainya yang merupakan perguruan tinggi yang khusus mempersiapkan tenaga ahli kependidikan dan keguruan.

Baik di dalam UU No. 2 Tahun 1989 maupun UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kedudukan guru dan tenaga kependidikan diatur sedemikian rupa. Menurut UU No. 2 Tahun 1989: Pasal 27 ayat (1), Tenaga

kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Sedangkan pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang tenaga kependidikan ini disebutkan pada Pasal 39 ayat (1), Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.¹⁴¹

Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang di atur dengan undang-undang. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah harus menyusun undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam rangka menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang dimaksudkan.

Ungkapan masyarakat mengenai Sistem Pendidikan Nasional kita yang mengatakan, Ganti Menteri Pendidikan, pasti bakal ganti peraturan, agaknya mengandung kebenaran. Kenyataan yang muncul setiap ganti menteri biasanya adalah berubahnya orientasi, alokasi anggaran, kurikulum baik mengenai volume kurikulum muatan nasional dan kurikulum muatan lokal, atau mengenai prosentase jam mata pelajaran, dan atau mengenai penekanan-penekanan khusus orientasi kurikulum yang dibangun dan aturan-aturan kependidikan lainnya, seperti kepangkatan guru atau dosen, karakteristik kelulusan, akreditasi, dan

¹⁴¹ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 124-128.

kelayakan sistem sekolah. Kebijakan yang dikeluarkan tak pelak mengundang kritik dan sekaligus harapan bagi keberadaan sistem pendidikan yang lebih baik.

UU Sisdiknas 2003, misalnya, adalah salah satu undang-undang yang syarat kontroversi. Hal ini terlihat dari proses pengesahan rancangan undang-undang tersebut. Masyarakat pendidikan terbelah: antara yang pro dan yang kontra. Reaksi atas RUU Sisdiknas cukup massif, tidak saja di Jakarta, tetapi juga di beberapa daerah di Indonesia. Semua civitas akademika perguruan tinggi dan sekolah-sekolah berdemonstrasi berkenaan dengan RUU Sisdiknas itu sebagai usaha memperjuangkan aspirasinya baik yang pro maupun kontra yang sesuai dengan visi, misi dan tradisi yang dianutnya. Bahkan para pemuka agama dan masyarakat khususnya Islam dan Kristen tampil kepermukaan untuk menyuarakan apa yang seharusnya dilakukan dalam RUU Sisdiknas. Jika dipetakan secara terbuka akan tersibak dua kubu yang kontroversial demikian: mayoritas penganut agama Islam cenderung menyetujui dan sedang penganut agama Kristen cenderung tidak setuju.

Pluralisme dan multikulturalisme adalah keniscayaan yang tak bisa ditolak di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara-bangsa di dunia yang meniscayakan multietnik dan agama tumbuh dalam masyarakat yang pluralis. Karena itu, pendidikan yang mengacu pada antar etnik dan agama harus diusung sedemikian rupa agar tercipta relasi yang dinamis dan harmonis. Ketetapan UU Sisdiknas, sebagai usaha politik kearah cita-cita bersama yang mulia, ternyata menuai kontroversi dan kritik. Gelombang reaksi pro dan kontra begitu memanas dari

kependidikan. Peranan tenaga pendidik di dalam pembentukan masyarakat baru yang pluralistik di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat penting.¹⁴⁵

Sejarah pendidikan Indonesia telah menjalani suatu masa yang panjang dengan berbagai pengaruh dari luar. Penelitian beberapa pakar seperti Denis Lombard mengatakan mengenai Nusantara (Jawa) sebagai silang budaya. Kita lihat pada zaman kerajaan Shi Fo Li Shi (Sriwijaya) pada abad ke tujuh yang sebenarnya telah mulai lebih dahulu pada abad-abad permulaan Nusantara telah memperoleh pengaruh-pengaruh dari kebudayaan dari China, Hindu-Budha. Selanjutnya kebudayaan Islam menggantikan kebudayaan Hindu-Budha dan seterusnya datanglah kolonialisme Barat yang berboncengan dengan kebudayaan Barat serta Kristiani.

Sistem pendidikan Indonesia harus diakui telah tumbuh dari sistem Barat yang dibawa oleh penguasa Kolonial. Jika ada perbaikan-perbaikan selama ini maka upaya tersebut tidak lebih dari sistem tambal sulam dari pendidikan kolonial. Seperti kita ketahui pendidikan kolonial tidak terlepas dari konsep kekuasaan kolonial yaitu membangun suatu sistem yang hanya menguntungkan penguasa dan pada zaman kemerdekaan ini hanya menguntungkan kekuatan politik yang berkuasa pada suatu saat tertentu. Tidak mengherankan apabila sistem-sistem yang dikenal selama ini tidak memberikan tempat sewajarnya terhadap tradisi. Secara tidak sadar sistem pendidikan yang berlaku adalah pengejawantahan dari

¹⁴⁵ H.A.R Tilaar, *Multikulturalisme* (Jakarta: Grasindo, 2004), hal. 209-212

kepentingan sekelompok kecil masyarakat yaitu kelompok elit yang mempunyai kemampuan ekonomi yang kuat.

Selain dari pada itu, tradisi pendidikan yang dikenal dalam beberapa suku bangsa kita ialah berakar dari keperluan lingkungannya. Kebutuhan lingkungan adalah kebutuhan rakyat banyak dan sistem pendidikan diabdikan untuk kepentingan orang banyak ini. Lembaga-lembaga pendidikan dengan demikian merupakan lembaga-lembaga yang dimiliki oleh dan untuk rakyat dan bukan seperti dewasa ini lembaga-lembaga pendidikan telah mengabdikan kepada kepentingan uang.

Jelas kiranya bahwa sistem pendidikan yang demikian haruslah diperkuat oleh pengetahuan mengenai tradisi itu sendiri artinya risert dan pengembangan tradisi itu sendiri dari budaya lokal hendaknya merupakan dasar proses pendidikan. Risert dan pengembangan merupakan suatu proses dan terus-menerus dan berkesinambungan apalagi di dalam dunia yang terbuka dewasa ini. Dengan sikap ini kita tidak perlu mempersoalkan apakah menerima atau menolak globalisasi tetapi bagaimana kita bersikap untuk dapat mengarahkan proses globalisasi tersebut. Pengetahuan kita mengenai tradisi pendidikan kita boleh dikatakan sangat minim. Hal ini sangat berbahaya sebab kita mudah jatuh kepada sikap tradisional karena kita tidak mempunyai bahan-bahan untuk menilai praksis pendidikan kita itu sendiri. Tanpa penelitian atas tradisi budaya lokal maka sistem pendidikan kita kembali kepada sistem kolonial yang secara tidak sadar merupakan landasan dari pendidikan nasional kita dewasa ini. Kita perlu

mengambil sikap orientalis yang sadar bahwa sistem pendidikan yang kita inginkan adalah sistem yang didasarkan kepada tradisi yang terus-menerus berubah ke arah yang lebih relevan dengan kebutuhan lingkungan baik lokal maupun masyarakat Indonesia umumnya bahkan dengan lingkungan global.¹⁴⁶

Setelah kita jajaki berbagai konsep yang pernah hidup di dalam dunia pendidikan nasional, maka dapatlah kita rumuskan bahwa manusia Indonesia yang berpendidikan adalah sekaligus manusia yang berbudaya. Oleh sebab itu praksis pendidikan nasional haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Praksis pendidikan nasional harus dan perlu mengembangkan potensi intelektual manusia Indonesia secara umum serta kaitan kemampuan tersebut dengan kehidupan nyata dalam lingkungan yang semakin meluas dan mendalam yaitu lingkungan keluarga, masyarakat lokal, lingkungan pekerjaan, lingkungan kehidupan nasional dan global.
2. Pendidikan nasional berperan dalam mengembangkan potensi yang spesifik dan individu sesuai dengan potensi kepribadiannya. Dengan demikian sistem pendidikan nasional haruslah mempunyai spektrum yang luas sehingga dapat menampung kebutuhan pengembangan pribadi peserta didik secara individual.
3. Pendidikan nasional harus dan perlu mengembangkan sikap sopan santun dalam pergaulan bermasyarakat. Nilai-nilai kebudayaan yang mengatur sikap sopan santun tersebut perlu dikenal dan dilaksanakan oleh peserta didik mula-mula di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan sekolah dan di

¹⁴⁶ H.A.R. Tilaar, *Manifesto*, hal. 206-210

dalam masyarakat luas. Di dalam kaitan ini pendidikan budi pekerti dilembaga-lembaga pendidikan perlu digalakkan. Selain dari pada itu lingkungan kehidupan sekolah merupakan suatu lingkungan dan suasana yang dihidupi oleh nilai-nilai sopan santun yang di junjung tinggi dalam kebudayaan nasional.

4. Praksis pendidikan disemua lembaga pendidikan ialah mengembangkan manusia Indonesia yang bermoral dalam tingkah laku yang bersumber dari kebudayaan nasional serta iman dan taqwanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam kehidupannya sehari-hari.
5. Praksis pendidikan di semua jenis dan jenjang pendidikan harus dan perlu mengembangkan rasa kebangsaan Indonesia, rasa bangga menjadi orang Indonesia yang berbudaya kebangsaan Indonesia, tanpa terperangkap dalam chavinisme yang sempit.¹⁴⁷

3. Standar Nasional Pendidikan

Di tetapkannya peraturan pemerintah republik Indonesia No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diantaranya dimaksudkan sebagai acuan dasar oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan yang antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan.

Standar Nasional Pendidikan merupakan acuan dasar yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat

¹⁴⁷ H.A.R. Tilaar, *Pendidikan Kebudayaan*, hal. 139-140

meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu selain itu, Standar Nasional Pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.¹⁴⁸

Era reformasi yang dimulai sejak 1998 merupakan suatu transisi dengan tumbuhnya proses demokratisasi di dalam masyarakat Indonesia. Proses demokratisasi juga memasuki dunia pendidikan nasional antara lain dengan lahirnya UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Undang-undang ini telah menangkap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam masyarakat Indonesia dewasa ini. Desentralisasi sistem pendidikan dari sistem yang sentralistis menjadi suatu sistem yang desentralistis. Pendidikan bukan lagi merupakan tanggung jawab pemerintah pusat tetapi diserahkan pada pemerintah daerah. Sebagaimana yang diatur di dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, hanya beberapa fungsi yang tetap berada di tangan pemerintah pusat. Perubahan dari sistem yang sentralistis ke desentralistis tentunya mempunyai konsekuensi yang jauh di dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Memang kita masih berada pada masa transisi, banyak hal yang masih harus diatur seperti yang diminta oleh UU No 20. Tahun 2003. Banyak PP yang mengatur mengenai wewenang daerah belum dilahirkan. Demikian pula yang

¹⁴⁸ LeKDIS, *Standar Pendidikan Nasional PP No 19 Tahun 2005* (Jakarta: LeKDIS, 2005), hal. 5

sangat serius adalah komitmen dan kemampuan daerah untuk menyelenggarakan pendidikan bagi rakyatnya.

Sesuai dengan tuntutan era globalisasi Indonesia tidak lepas dari kewajibannya untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusianya dalam menghadapi persaingan bebas dalam dunia yang terbuka abad ke 21, kebutuhan ini telah ditampung oleh adanya UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta pentingnya tenaga guru dan dosen sebagai ujung tombak dari reformasi pendidikan nasional. Lahirnya UU No.14 Tahun 2005 di dalam segala kekurangannya merupakan suatu tonggak yang berarti di dalam reformasi pendidikan nasional.¹⁴⁹

Dalam sistem pendidikan kita yang sentralistis kita mengenal berbagai standar untuk melaksanakan dan mengokohkan sistem yang sentralistis tersebut segala sesuatu ditentukan oleh kekuasaan negara yang ditopang oleh biokrasi yang kaku, peraturan-peraturan yang pusat atau dipegang oleh pemerintah pusat dan tidak memberikan kebebasan di daerah-daerah untuk melaksanakan peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan daerah. Pendek kata, tidak ada otonomi kelembagaan maupun otonomi daerah untuk menentukan standarnya sendiri sesuai dengan kemanapun daerah. Maka tumbuh dan berkembanglah suatu sistem yang kaku statis, dengan manajemen yang terpusat. Mekanisme kontrol dari pusat dibangun begitu rupa sehingga tidak ada ruang gerak untuk pengambilan keputusan pada tingkat sekolah juga tidak pada tingkat kabupaten dan provinsi. Seluruh Indonesia

¹⁴⁹ H.A.R.Tilaar, *Standar Nasional Pendidikan*, hal. 75-76

diselimuti dengan satu sistem satu standar sehingga tidak mengherankan apa yang diajarkan di Jakarta sama dan sebangun dengan apa yang diajarkan di pelosok-pelosok hutan Kalimantan maupun di Papua. Sistem pendidikan seperti suatu mesin yang besar yang digerakkan dari pusat dan lembaga-lembaga pendidikan di daerah merupakan skrup-skrup kecil yang berputar sesuai dengan keinginan pemerintah pusat.¹⁵⁰

Dunia pendidikan di Indonesia, masyarakat luas terutama para orang tua, digegerkan dengan keputusan pemerintah pada tahun 2006 melaksanakan ujian negara. Padahal berkali-kali pemerintah menjanjikan bahwa ujian negara tidak akan dilaksanakan lagi pada tahun 2006 ini. Janji tersebut pada tahun 2005 telah dikemukakan bahkan sejak tahun 2004 ketika undang-undang sistem pendidikan disetujui pada tahun 2003. Tentunya pemerintah mempunyai alasan untuk melaksanakan ujian nasional tersebut. Menurut pemerintah ujian nasional perlu dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2006 yang mengatakan antara lain; pendidikan nasional perlu ditentukan standarnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan ialah menentukan standar, menaikan standar setiap tahun melalui ujian nasional.

Sejak disahkannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mestinya telah disiapkan atau mulai disiapkan suatu grand design pembangunan pendidikan sesuai dengan cita-cita reformasi. Namun demikian hal ini tidak terlaksana. Malahan sejak tahun 2003 telah menjadi polemik mengenai

¹⁵⁰ H.A.R.Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan*, hal. 229

apakah perlu tidaknya diadakan ujian akhir nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Meskipun sejak semula telah diperingatkan bahwa ujian negara dalam bentuknya yang tradisional tidak sesuai lagi dengan jiwa UU No. 20 Tahun 2003. Tetapi ternyata UAN atau yang kemudian menjadi ujian nasional tetap dilaksanakan. Malahan hasil UN tersebut merupakan penentu dari kelulusan dari peserta didik. Bahkan tidak kurang dari wakil presiden menyatakan bahwa UN itu perlu dan akan menaikkan mutu pendidikan serta akan memacu kegiatan belajar peserta didik. Selain dari pada itu pendapat-pendapat politik seperti itu terlalu dangkal dan tidak melihat kepada tujuan jangka panjang yaitu untuk apa sebenarnya tujuan pendidikan nasional atau manusia Indonesia macam apa yang dicita-citakan untuk masa depan. Inilah yang dikenal didalam kosa kata pedagogik sebagai *dosemologi* yaitu studi tentang ketidak akuratan dalam menilai hasil pendidikan.¹⁵¹

Kita telah mempunyai UU Sistem Pendidikan Nasional yaitu UU No.20 Tahun 2003 sebagai pengganti UU No. 2 Tahun 1989. Demikian pula berdasarkan UU pendidikan yang baru itu kita telah mempunyai UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Demikian pula beberapa peraturan pemerintah yang diminta oleh UU No. 20 Tahun 2003 sudah mulai dikeluarkan. Salah satu peraturan pemerintah yang terkenal adalah PP No 19 Tahun 2005 mengenai

¹⁵¹ Pedagogik adalah yang lahir dari pandangan-pandangan post-modernisme dan pedagogik liberratian. Pedagogik melihat masyarakat, pendidikan, persekolahan, merupakan arena-arena dimana terjadi kontekstasi kekuasaan dan kontrol dalam masyarakat. Pedagogik tidak bersifat netral didalam kontekstasi tersebut tetapi mempunyai komitmen untuk memperdayakan yang tertindas atau kelompok-kelompok yang disubordinasikan.

Standar Pendidikan Nasional. Namun demikian masih banyak hal lagi yang perlu diatur oleh UU dan PP seperti kesiapan daerah untuk melaksanakan otonomi pendidikan sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Perubahan yang radikal mengenai pendidikan daerah memang memerlukan dana yang sangat besar pelaksanaan wajib belajar 9 Tahun misalnya yang perlu diatur oleh PP memerlukan dana dan persiapan yang matang mengingat ada perbedaan kemampuan daerah untuk melaksanakannya dan tersedia sarana serta prasarana yang memadai. Hal tersebut sudah mesti dipersiapkan sebelum kita memperoleh dana pendidikan yang cukup besar.

Lembaga pendidikan nasional merupakan suatu institusi publik untuk mewujudkan suatu tujuan bersama ialah mencerdaskan kehidupan manusia Indonesia. Sebagai suatu lembaga publik tentunya lembaga haruslah akuntabel, berarti transparan, terbuka, dapat dinilai oleh anggota masyarakat. Dengan kata lain performance lembaga pendidikan tersebut haruslah mempunyai indikator-indikator akan keberhasilan atau kegagalannya lahirnya PP No. 19 Tahun 2005 sebagai penjabaran dari UU No. 20 Tahun 2003 mengupayakan standar nasional. Sebagai negara kesatuan kita memerlukan suatu penilaian dari kinerja sistem pendidikan nasional. Undang-undang dasar kita mengatakan bahwa pemerintah menyusun dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional telah di rumuskan di dalam UU No. 20 Tahun 2003. Sebagai suatu sistem tentunya diperlukan suatu patokan atau ukuran sampai dimana sistem tersebut berhasil atau

tidak adanya satu sistem pendidikan nasional termasuk di dalam evaluasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kohesi sosial.

Fungsi standar nasional pendidikan adalah *untuk pengukuran kualitas pendidikan*. Standar tersebut tentunya bukan ukuran yang statis yang tidak berubah, tetapi semakin lama semakin ditingkatkan. Kita bedakan antara standar ideal dan standar operasional temporal. Standar ideal dapat kita tentukan setiap lima atau sepuluh tahun sedangkan standar operasional temporal dapat ditentukan setiap tahun. Standar ideal juga bertahap untuk dicapai seperti standar isi yaitu kurikulum sekolah perlu direvisi setiap sekurang-kurangnya 5-10 tahun standar nasional pendidikan adalah standar yang bergerak maju. Pemetaan masalah pendidikan, hal ini banyak kali dilupakan di dalam suatu sistem nasional. Standar Pendidikan Nasional seakan-akan telah milik monopoli dari birokrasi pendidikan sehingga peserta didik semata-mata menjadi objek dari kekuasaan birokrasi. Akibatnya sangat jauh oleh karena proses belajar dapat terarah kepada hanya mempersiapkan ujian yang telah ditentukan oleh birokrasi pendidikan dan bukan merupakan suatu proses belajar yang berkesinambungan yang diadakan berkala oleh guru di depan kelas. Penyusunan strategi dan rencana pengembangan sesudah diperoleh data-data dari evaluasi belajar secara nasional seperti ujian nasional, standar adalah patokan. Sewaktu-waktu tingkat pencapaian standar tersebut perlu diketahui sampai dimana efektifitasnya, untuk pengetahuan itu diperlukan sarana-sarana seperti ujian atau evaluasi nasional. Ujian nasional atau evaluasi nasional tentunya tidak perlu meliputi seluruh standar isi, sebab hal

tersebut meminta biaya dan tenaga yang luar biasa,. Karena sifatnya sekedar memberikan gambaran peta permasalahan pendidikan secara nasional. Maka dipilihlah beberapa mata pelajaran yang esensial.¹⁵²

Pasal 13 UU No.20 Tahun 2003 menyatakan jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal non formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan saling memperkaya. Ketiga jalur pendidikan itu komplementer dalam Sistem Pendidikan Nasional. Apabila satuan pendidikan yang disebut sekolah berjenjang dan berkesinambungan maka satuan pendidikan luar sekolah tidak harus berjenjang dan berkesinambungan, meliputi keluarga, kelompok belajar, dan dan satuan pendidikan yang sejenis. Dalam pengertian jalur pendidikan ini terselip konsep pendidikan yang tidak terbatas pada usia dan ruang sekolah yang formal. Inilah konsep pendidikan berkelanjutan. Artinya pendidikan itu berlangsung sepanjang hayat dan didalam pengertian ini berbagai bentuk latihan sesudah pendidikan sekolah formal juga pada hakikatnya adalah bentuk pendidikan.¹⁵³

Mengumpulnya permasalahan pendidikan dari pendanaan, besarnya campur tangan pemerintah hingga ketidak jelasan tujuan sangat besar pengaruhnya terhadap sekolah-sekolah yang seharusnya menjadi alat untuk mencerdaskan, memberi ketrampilan, bahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, tidak lebih dari tempat indoktrinasi. Sekolah hanya menjadi pewarisan dan pelestarian

¹⁵² *Ibid*, hal. 105-109

¹⁵³ H.AR Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional* (Bandung:: Rosda Karya, 2006), hal. 16

nilai-nilai resmi yang berlaku dan direstui oleh pemerintah. Tak aneh jika terjadi penyelenggaraan mulai dari pakaian hingga mata pelajaran.

Malah menyitir pendapat Romo Mangun, menyamakan sekolah dengan penjara. Tempat kaum muda yang kreatif dan kritis dibijs kesadarannya diajarkan cara membuat proyek proposal yang dana bisa dikorupsi sehingga memunculkan generasi sarimin yang bermental budak kuli babu. Sakolah cuma melahirkan generasi-generasi tidak mandiri, melahirkan generasi cengeng, penakut, yang tidak siap menghadapi ganasnya gelombang zaman melahirkan generasi yang hanya bisa membeo tidak kreatif, picik, egois, dan mementingkan diri dan kelompoknya sendiri.

Padahal menurut Tilaar proses pendidikan yang tidak mengembangkan identitas manusia adalah pendidikan yang otoriter, represif dan mematikan kreatifitas peserta didik. Demikian yang tidak pula mengakui partisipasi adalah pendidikan yang satu arah monolog dan menindas perkembangan peserta didik. Proses pendidikan yang mengabaikan proses individualisasi adalah pengungkungan atau pemenjaraan proses perkembangan manusia. Proses pendidikan yang akan mematikan kebudayaan dan berarti dan berakhirnya hidup bersama manusia.¹⁵⁴

Ada tiga pilar yang berkaitan dengan pendidikan, yakni: orang tua, sekolah, dan masyarakat. Orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama. Faktanya,

¹⁵⁴ Ade Irawan. dkk, *Mendagangkan Sekolah*, (Indonesia corruption watch: 2004), hal. 16-17

sebagian besar waktu hidup anak ada di dalam keluarga dan orang tua adalah pihak yang paling bertanggung jawab.

Institusi masyarakat yang makin berkotak-kotak dalam sangkar spesialisasi dan diferensiasi rupanya memberi sumbangan besar bagi terjadinya kudeta atau pengambil alihan peran sentral pendidikan dari orangtua ke sekolah. Pendidikan dikotak-kotak ke dalam sangkar formal, informal, dan non formal. Pendidikan formal yang berlangsung disekolah dicirikan adanya kurikulum, pembatasan usia wajib belajar, dan pemberian sertifikat tanda kelulusan. Pendidikan non formal lebih berorientasi ke dunia praktis dunia kerja. Pendidikan ini dijalankan oleh lembaga-lembaga kursus keterampilan. Pendidikan informal diindentikkan dengan keluarga. Pendidikan disini berlangsung seumur hidup.

Asas-asas pendidikan formal yang diterapkan di sekolah seperti kemandirian, uniferalisme, prestasi, dan spesifikasi- berseberangan dengan asas-asas informal yang berlangsung di rumah.¹⁵⁵ Di sekolah para siswa dididik menjadi manusia mandiri. Kerja sama dalam mengerjakan tugas dibenarkan sejauh tidak mengandung unsur penipuan dan kecurangan. Itu sebabnya sekolah menerapkan larangan mencontek dan menjiplak. Kebalikannya pendidikan di rumah diam-diam membuat anak kurang mandiri. Makanan disiapkan orang tua. Mencuci

¹⁵⁵ Menurut sejarah, sekolah berasal dari bahasa latin *skole*, *scola* atau *scolae*, yang berarti waktu luang atau waktu senggang. Artinya sekolah adalah waktu luang yang digunakan secara khusus untuk belajar. Pemahaman ini bermula dari kebiasaan orang yunani tempo dulu yang mengisi waktu luang dengan mengunjungi para cerdik pandai untuk emmpertanyakan atau mempelajari hal-hal yang memang layak intuk di ketahui. Dan disitulah anak-anak bisa bermain, berlatih melakukan sesuatu, belajar apa saja yang mereka anggap memang patut dipelajari.

pakaian dikerjakan pembantu rumah tangga. Kesulitan dalam belajar bisa dipecahkan dengan mengundang guru les privat.

Sekolah sangat menekankan prestasi akademik peserta didik. Prestasi akademik terlanjur dianggap menentukan berhasil tidaknya seseorang kelak bila terjun ditengah masyarakat sebagai kaum profesional. Di sekolah para siswa diajari kerja keras dan menghindari kegagalan. Tanpa disadari pola pengasuhan orang tua di rumah membuat anak-anak kurang menghargai *achievement*. Anak-anak di zaman sekarang nyaris bergelimang fasilitas dan kemudahan.

Ketidak seimbangan asas pendidikan di sekolah dengan asas pengasuhan anak di rumah acap menjadi batu sandungan kerja sama orang tua dengan sekolah. Secara eksplisit memang kurikulum yang dirancang birokrasi pendidikan di Indonesia tidak memberikan penunjuk orang tua dengan sekolah bersinergi untuk mengatasi dilema tersebut. Kendati demikian banyak sekolah yang secara sistematis dan terencana merancang keterlibatan orang tua dengan sekolah dalam urusan kurikulum dan pendampingan kepribadian.

Peraturan menteri pendidikan nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang selama ini diperbincangkan karena tidak segera disosialisasikan memberi peluang keterlibatan orang tua dalam pelaksanaan kurikulum. Struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diatur dalam permen diatas dibagi menjadi tiga komponen, yakni: mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Pada

komponen pengembangan diri dinyatakan bahwa komponen ini bukan merupakan mata pelajaran yang harus diampu oleh guru.¹⁵⁶

Dalam sejarah pembangunan pendidikan kita kurikulum mempunyai konotasi yang negatif. Ungkapan yang sering terdengar ialah kurikulum sering berubah namun hasil pendidikan tetap diragukan kualitasnya. Memang kurikulum semata-mata merupakan sarana untuk mencapai program pendidikan yang dikehendaki. Sebagai sarana, kurikulum tidak mempunyai arti apa-apa apabila tidak ditunjang oleh sarana atau prasarana yang diperlukan seperti sumber-sumber belajar dan mengajar yang memadai, kemampuan tenaga pengajar, metodologi yang sesuai, serta kejernihan arah serta tujuan yang akan dicapai.

Apabila kita berbicara mengenai kurikulum maka kita tidak terlepas dari politik. Memang kurikulum tidak lain dari sarana yang mengatur berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kaitan yang erat antara pendidikan dan politik pada masa kolonial dirumuskan sebagai berikut: bahwa pendidikan sebagai alat revolusi dalam suasana berdikari mengharuskan pembantingan setir dalam segala bidang khususnya bidang pendidikan.¹⁵⁷ Dengan kebijakan ini maka tujuan pendidikan nasional dari pendidikan prasekolah sampai pendidikan tinggi ditujukan untuk melahirkan apa yang disebut warga negara sosialis Indonesia yang susila, bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis, pendidikan dengan lembaga-lembaganya biasanya dilihat sebagai suatu lembaga

¹⁵⁶ *Basis*, Edisi Filsafat Pendidikan, (Yogyakarta: Juli-Agustus 2006), hal. 48-51

¹⁵⁷ H.A.R Tilaar, *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995* (Jakarta: Grasindo, 1995), hal. 251-255

non profit karena menyanggah tujuan-tujuan nasional.¹⁵⁸ Oleh sebab itu, sejak lama dunia pendidikan ditabukan dari analisis-analisis ekonomis dan profit. Seperti misalnya, di dalam masyarakat Indonesia lembaga-lembaga pendidikan dan para pengelolanya mempunyai status yang khusus di dalam masyarakat. Namun keadaan ini, terutama di negara-negara maju mulai berubah. Apabila pendidikan sekarang merupakan suatu kebutuhan untuk dunia modern masyarakat menuntut kualitas pendidikan yang tinggi. Lembaga-lembaga pendidikan dituntut melahirkan tamatannya yang menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dengan kata lain, lembaga-lembaga pendidikan tersebut mulai dituntut akuntabilitasnya oleh masyarakat.

Tuntutan pengelolaan pendidikan tinggi agar supaya lebih efisien dan efektif juga disebabkan karena perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Krisis ekonomi, otonomi daerah, penyetaraan pendidikan, gejala semakin meningkatnya jumlah rakyat miskin sehingga tidak dapat membiayai pendidikannya, semuanya merupakan tekanan untuk melihat kembali pola-pola pembiayaan pendidikan. Bagaimana pun juga pola yang akan dirumuskan, misalnya pola yang sesuai dengan UU desentralisasi dan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah, yang pasti ialah kita memerlukan prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang baik.¹⁵⁹

¹⁵⁸ H.A.R Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 12

¹⁵⁹ *Ibid*, hal. 12-13

Winarno Surakhmad, pakar pendidikan di Indonesia menyatakan betapa kekacauan pendidikan kita telah berada pada titik akhir. Artinya selama 61 tahun merdeka belum pernah dicapai suatu arah yang tegas mengenai tujuan pendidikan nasional. Barang kali keterpurukan pendidikan nasional kita ini semakin diperparah dengan lahirnya seekor gurita kekuasaan pendidikan ialah Badan Standarisasi Nasional Pendidikan. Seperti kita ketahui di dalam heboh ujian nasional tahun 2005, lahir polemik yang berkepanjangan mengenai dapat tidaknya diselenggarakan. Meskipun terdapat berbagai reaksi masyarakat maupun pengamat pendidikan mengenai ujian nasional, pemerintah tetap menjalankan pada tahun 2006. Sebenarnya sejak tahun 2003 dengan lahirnya UU No. 20 Tahun 2003, Ujian Nasional sebagai kelanjutan dari EBTANAS ditiadakan karena tidak sesuai dengan undang-undang tersebut. Namun demikian pada tahun 2003 sampai 2006 ujian nasional tersebut tetap dilaksanakan. Pemerintah beranggapan PP No. 19 Tahun 2005 merupakan penjabaran dari UU No. 20 Tahun 2003 antara lain untuk meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan ialah perlunya standar nasional pendidikan. Menurut PP tersebut terdapat delapan standar pendidikan nasional yang digarap oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.¹⁶⁰

Penentuan kedelapan standar ini merupakan salah satu tugas dari BSNP. Selain dari tugas tersebut terdapat tugas lainnya yang tidak kurang luas dan

¹⁶⁰ Standar isi, Standar proses, Standar kompetensi lulusan, Standar pendidik dan tenaga kependidikan, Standar sarana dan prasarana, Standar pengelolaan, Standar pembiayaan, dan Standar penilaian pendidikan.

beratnya yaitu: Menyelenggarakan Ujian Nasional, Memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan, Merumuskan kriteria kelulusan pada satuan pendidikan, dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, Menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikan buku teks pelajaran.

Adapun tujuan dari pengembangan standar nasional pendidikan serta tugas-tugas lainnya dari BSNP ialah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Oleh sebab itu standar nasional pendidikan haruslah dijadikan dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam upaya untuk mencapai pendidikan yang bermutu. Selanjutnya standar pendidikan nasional merupakan upaya untuk mencerdaskan kehidupan rakyat dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Apabila kita simak tugas dan tanggung jawab BSNP alangkah luas krusialnya badan itu di dalam penentuan atau peningkatan mutu pendidikan nasional. Badan ini pulalah yang menyelenggarakan ujian nasional dalam menentukan evaluasi proses pembelajaran peserta didik. Seperti yang kita lihat yang ingin dicapai oleh BSNP sebenarnya merupakan ilusi atau pembohongan kepada rakyat. BSNP bukan menghadapi peserta didik sebagai subjek tetapi menghadapi peserta didik sebagai objek yang perlu dinilai berdasarkan standar-standar yang ditentukannya sendiri. Seperti yang digariskan di dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang berhak dan bertanggung jawab untuk mengadakan penilaian keberhasilan proses pendidikan adalah guru yang bertugas sehari-hari didepan kelas dan di dalam

pergaulan peserta didiknya. Peserta didik adalah subjek dengan keseluruhan perkembangan kepribadiannya yang hanya dapat dikenal dan dihayati oleh guru. Kini tugas mulia tersebut telah diambil alih oleh BSNP misalnya dengan menentukan tingkat kelulusan peserta didik. Seperti kita ketahui timbul kontroversi mengenai apakah hasil UN (Ujian Negara) menentukan atau tidaknya kelulusan seorang peserta didik di dalam segala kehebatannya baik di dalam biaya maupun organisasi penyelenggaraan ujian negara hasil yang dicapai selama ini sulit untuk dipertanggung jawabkan bahwa ujian negara telah meningkatkan mutu pendidikan nasional. Mutu pendidikan di Indonesia yang sangat berdiferensiasi antar daerah adalah tidak mungkin menetapkan satu ukuran untuk kelulusan seorang peserta didik. Ambil saja penelitian-penelitian mengenai keterkaitan antara prestasi akademik peserta didik yang sangat tergantung kepada mutu profesionalisme seorang guru di depan kelas. Mutu guru masih jauh dari yang diharapkan demikian pula sarana yang tersedia sangat beraneka ragam sehingga salah satu unsur yang penting di dalam penentuan standar ialah *opportunity to learn* (OTL) yang merata mungkin dapat menghasilkan hasil evaluasi yang merata pula. Tetapi kenyataannya jauh dari hipotesa-hipotesa abstrak yang digunakan oleh BSNP dalam penyelenggaraan ujian nasional.

Apa yang dilaksanakan oleh BSNP mengukuhkan pendapat bahwa sebenarnya badan tersebut merupakan badan kekuasaan pemerintah untuk menancapkan kekuasaannya melalui pendidikan. Pendidikan merupakan suatu komoditi politik seperti yang kita lihat pada waktu terjadi polemik apakah ujian negara dapat

dilaksanakan tahun 2006 atau tidak. Seperti kita ketahui pada mulanya Menteri Pendidikan Nasional telah menjanjikan bahwa tahun 2006 ujian negara di hapuskan, tetapi ternyata ujian negara tetap dilaksanakan meskipun tidak jelas dari mana sumber pembiayaannya.

BSNP menurut PP No. 19 Tahun 2005 merupakan suatu lembaga independen. Ini artinya lembaga tersebut terlepas dari campur tangan secara langsung atau tidak dari pemerintah. Tetapi kenyataannya kita lihat BSNP merupakan anak kandung dari birokrasi pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional. Di negara-negara maju lainnya lembaga sejenis BSNP dikenal dalam bentuknya sebagai komisi nasional atau lembaga-lembaga yang dibentuk oleh organisasi profesional guru. Para guru inilah yang mengetahui standar apa yang dibutuhkan oleh sekolah dan bukan ditentukan oleh satu badan yang berpretensi sebagai kumpulan para ahli pendidikan yang mengatur berbagi aspek dari proses pendidikan. BSNP telah merupakan gurita kekuasaan pendidikan. Lihat saja bagaimana tugasnya untuk menyelenggarakan ujian nasional yang uniform untuk seluruh Indonesia bagaimana mungkin ujian nasional yang sama diselenggarakan untuk peserta didik yang ada dikota-kota besar dianggap sama dengan ujian nasional untuk sekolah di pedalaman-pedalaman desa tertinggal di seluruh nusantara. Hal ini sebenarnya berarti pemerkosaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dituntut oleh konvensi PBB mengenai hak sosial budaya dalam pembangunan. Selain dari pada itu penentuan tingkat pencapaian proses belajar

peserta didik yang menurut UU merupakan tugas dan tanggung jawab guru sekarang diambil alih oleh BSNP. Secara hukum BSNP yang didirikan dengan peraturan pemerintah berarti melebihi tugasnya yang digariskan oleh UU No. 20 Tahun 2003. Kekacauan di Indonesia merupakan suatu gambaran bagaimana terpuruknya manajemen pendidikan di Indonesia yang nota bene merupakan salah satu tugas dari BSNP. Seharusnya keputusan-keputusan yang direkomendasikan BSNP kepada pemerintah perlu didukung oleh lembaga. Menurut pendapat Tilaar PP No. 19 Tahun 2005 dengan segala badan yang didirikan berdasarkan PP tersebut perlu ditinjau kembali. Sesungguhnya keseluruhan PP No. 19 Tahun 2005 telah mendesak untuk ditinjau kembali. Peranan para guru profesional, peranan organisasi profesional guru, para pengamat bahkan masyarakat luas perlu diikuti sertakan di dalam peninjauan kembali PP No.19 tersebut.¹⁶¹

4. Pendidikan Demokratis

Pendidikan dalam millenium ke tiga tidak terlepas dari suatu gerakan global, yaitu mewujudkan kehidupan bersama yang lebih demokratis. Sebenarnya masyarakat Indonesia tidak asing dengan konsep kehidupan demokrasi. Pada beberapa suku bangsa di nusantara, kehidupan demokrasi merupakan bagian dari kehidupan bersama manusia Indonesia. Memang pada beberapa daerah yang mengenal kehidupan kerajaan mungkin saja kehidupan demokrasi tersebut muali pudar. Dalam sejarah perkembangan kehidupan bernegara di nusantara, sejak

¹⁶¹ H.A.R Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional*, hal. 168-172

Proklamasi kita bercita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis. Namun dalam pelaksanaannya kehidupan bersama yang demokratis tersebut mengalami banyak kendala dan kegagalan. Dalam sejarahnya, perkembangan proses demokratisasi, dapat diidentifikasi dalam empat masa atau gelombang, yaitu: demokrasi dan desentralisasi; demokrasi dan partisipasi; demokrasi dan pemberdayaan; demokrasi dan pemerintahan yang bersih dan terbuka. Keempat perkembangan demokrasi ini mempunyai dampak terhadap proses pendidikan dan manajemen pendidikan.

Pada tahun 70-an saat gencar upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat dan bangsanya. Sebenarnya gerakan partisipasi masyarakat adalah wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi. Di mana-mana di upayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah dengan mengikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Di lingkungan pendidikan juga mulai di upayakan partisipasi masyarakat dalam membangun pendidikannya. Sayang sekali, upaya tersebut terbentur kepada sistem yang sentralistik. Dalam dunia pendidikan dikenal bahwa sistem pendidikan hanya mengenal satu pola atau satu manajemen. Sebagai ilustrasi peranan dan fungsi pendidikan swasta yang dikatakan sebagai mitra pemerintah ternyata merupakan musuh dalam selimut bagi sistem yang sentralistik.¹⁶²

¹⁶² Tilaar, *Kekuasaan*, hal. 276-277

Orde Baru yang runtuh 21 Mei 1998 oleh gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa, menandai era baru kehidupan kebangsaan yang lebih demokratis dan berkeadilan. Gerakan reformasi memang membuka peluang bagi tumbuhnya alam baru kehidupan kebangsaan itu, namun bukan berarti otomatis seluruh dinamika politik nasional berkesesuaian dengan dasar dan pesan etik dan moral reformasi. Perkembangan politik nasional akhir-akhir ini belum menunjukkan arah yang jelas ke arah idealitas reformasi.

Idealitas pemerintahan yang bersih dan transparan, kehidupan politik yang demokratis, penegakkan hukum keadilan sosial-politik-ekonomi bagi rakyat kebanyakan adalah tahap perubahan transformatif. Indonesia Baru yang demokratis dan bermartabat, berkeadilan dan sejahtera, perlu sejumlah prasyarat budaya. Dari sini, reformasi merupakan format transformasi kultural berbasis etika kemanusiaan perennial dan berkearifan tradisional. Namun reformasi bukan *jalan lapang* di mana semua masalah bisa tampak jernih dan terang, *jalan Indonesia Baru* juga bisa berupa *lorong gelap*.

Rumitnya jalan demokrasi sesudah tumbanganya Orde Baru 21 Mei 1998 lalu bisa dijelaskan dari akar budaya negeri seribu etnis ini. Selama masa kemerdekaan, akar budaya bangsa ini hampir tak mempunyai ruang manifestasi di bawah tekanan doktrin nasionalitas dan kebangsaan sebagai norma kesatuan kebangsaan bersumber legenda yang sulit dimengerti warganya sendiri. Ruang manifestasi budaya itu mulai terbuka sesudah gerakan reformasi. Namun karena tidak mempunyai mode manifestasi dan ketika sistem yang ada tidak memberi

cukup toleransi, munculah berbagai bentuk konflik dan kerusuhan massal di berbagai daerah.¹⁶³

UU No. 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas. Pasal 4 ayat (1): Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa.¹⁶⁴

Pendidikan demokratis memiliki landasan yang jelas dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sifat demokratis yang dimaksud bukan tanpa batas, dan bukan tanpa arah. Ada nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi yakni hak asasi manusia. Prinsip ini berlaku umum bagi semua manusia. Selain itu ada nilai-nilai keagamaan yang harus diperhatikan. Ada nilai-nilai keagamaan yang berlaku secara umum, seperti hormat-menghormati, saling mengasihi, kejujuran, dan merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap kegiatan dan sepanjang waktu. Ada juga nilai-nilai keagamaan yang bersifat khusus, berbeda antara agama satu dengan agama lain. Ada nilai-nilai kultural yang mungkin sama maupun berbeda antara satu suku bangsa masyarakat dengan yang lain. Kesemuanya itu harus diperhatikan. Selain itu, kepentingan sebagai suatu bangsa atau kepentingan nasional harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan.

¹⁶³ Mulkhan, *Nalar Spiritual*, hal. 121-123

¹⁶⁴ Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Standar Pendidikan Nasional*, (Bandung: Fokusmedia, 2005), hal. 98

Pendidikan demokratis yang dikehendaki UU Sisdiknas memperhatikan peran orang tua. Pasal 7 ayat (1) menyatakan: Orang Tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya.

Peran masyarakat cukup besar dalam penyelenggaraan pendidikan. Cakupannya dapat di lihat pada Pasal 8, dikatakan: Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Demokrasi pendidikan di Indonesia ditandai pula dengan peran Pemerintah Pusat yang diimbangi dengan peran Pemerintah Daerah. Pasal 10 menyatakan: Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁶⁵

Menurut Tilaar, pada zaman Pra-Orde Baru tampak jelas bahwa pendidikan diarahkan pada kepentingan politik negara, yaitu untuk membangun nasionalisme, persatuan, dan penggalangan kekuatan bangsa. Dalam konteks ini sistem pendidikan lebih diarahkan untuk menolak segala pengaruh asing. Tidak ada kebebasan berpikir, semua diarahkan kenasionalisme sempit itu. Pada zaman Orde Baru, tekanan pada segi ekonomi. Di perlukan untuk kestabilan dan keamanan Negara. Maka pendidikan diarahkan pada *uniformitas, keseragaman,*

¹⁶⁵ *Makalah*, disampaikan oleh Abdurrahman Mas'ud dalam Seminar Pendidikan (Pasuruan: STAIPANA Bangil, 20 Mei 2007), hal. 1-2

baik dalam berpikir maupun dalam bertindak. Asas tunggal, wadah tunggal, organisasi tunggal, tidak boleh ada saingan, semua homogenitas ditekankan. Sampai soal agama pun dibentuk toleransi semua yang hanya di luar saja. Konflik tidak diperbolehkan. Maka demokrasi tidak jalan. Sedangkan pada masa reformasi sekarang ini arahnya lebih mau membangun masyarakat madani, masyarakat yang bercirikan demokrasi, penghargaan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan otonomi. Dalam arah ini maka sistem pendidikan perlu mengarah ke model masyarakat tersebut yang lebih demokratis.¹⁶⁶

Mau tidak mau, pendidikan telah menjadi suatu industri. Sebagai suatu industri pengembangan (sumber daya) manusia, pendidikan itu harus dikelola secara professional. Ketiadaan tenaga-tenaga manajer pendidikan professional ini antara lain yang mengharuskan kita mengadakan terobosan-terobosan untuk membawa pendidikan itu sejalan dengan langkah-langkah pendidikan yang semakin cepat. Di samping itu peta permasalahan pendidikan kita sangat kompleks yang menyangkut bukan saja masalah-masalah teknis pendidikan, tetapi juga meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, pendanaan, dan efisiensi dari sistem itu sendiri. Masalah pengelolaan Sekolah Dasar merupakan contoh klasik dari kesemrautan manajemen pendidikan kita dewasa ini, yang pada gilirannya memberikan efek terhadap setiap usaha untuk meningkatkan mutu keluaran sistem pendidikan. Munculnya Undang-undang mengenai sistem pendidikan

¹⁶⁶ *Basis*, Edisi Paulo freire (Yogyakarta: Januari-Februari 2001), hal. 26

nasional beserta beberapa perturan pelaksanaannya belum banyak menolong mengatasi pembenahan manajemen sekolah dasar itu, selama kita belum sepaham serta adanya ketulusan kita untuk memberi otonomi kepada daerah mengurus pelaksanaan dasar yang merupakan salah satu perwujudan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Pendidikan bukan semata-mata masalah teknis tetapi lebih merupakan masalah politis, karena itu penyelenggaraannya harus merupakan isu politis.

Masalah otonomi pengelolaan pendidikan kita dewasa ini, baik untuk sekolah lanjutan maupun pendidikan tinggi, dalam pengertian otonomi dalam penyelenggaraan masalah akademik dan finansial, memerlukan penyesuaian mengenai kelembagaan Sisdiknas. Lembaga pendidikan kita dibentuk berdasarkan fungsi dan peranan pendidikan yang sudah kadaluarsa. Sebagaimana dengan kebanyakan lembaga sosial yang lain, lembaga-lembaga itu tidak dapat lagi mengikuti cepatnya laju pembangunan. Tidak mengherankan, banyak lembaga sosial itu, termasuk lembaga dalam Sisdiknas perlu ditata kembali atau perlu direstrukturisasi.¹⁶⁷

Ada lima masalah yang dihadapi di dalam demokorasi pendidikan di Indonesia. Kelima masalah itu adalah: pendidikan yang penuh kebohongan, sistem pendidikan yang elitis, proses domestifikasi, proses pembodohan, dan masuknya budaya korporasi dalam Sistem Pendidikan Nasional.⁹⁸ menurut Tilaar

¹⁶⁷ H.A.R. Tilaar, *Manajemen*, hal. 153-154

pendidikan demokrasi adalah proses memberikan kemampuan atau kompetensi untuk mengambil pilihan yang terbaik demi kemaslahatan individu dan masyarakatnya. Manusia bodoh, manusia yang sempit pandangannya, yang terbatas horizon pemikirannya, manusia yang tidak toleran terhadap perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat pluralis bukanlah manusia yang cerdas. Manusia yang cerdas tidak memutlakan pendapatnya sendiri tetap yang menimbang-nimbang pendapat orang lain untuk mencari yang terbaik. Pendidikan demokratis, oleh sebab itu, tidak lain dari pada pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan yang penuh kebohongan, seorang pakar pendidikan, Donaldo Marcedo, mengemukakan bahwa praksis pendidikan juga di negara-negara yang menyebut dirinya negara demokrasi, penuh dengan kebohongan. Dia mengatakan telah lahir *pedagogy of big lies*. Ternyata prinsip-prinsip demokrasi pendidikan banyak yang dilanggar di dalam pelaksanaannya. Coba kita lihat saja bagaimana seorang anak Sekolah Dasar yang menggantung diri baru-baru ini karena orang tuanya yang miskin tidak dapat memberikan Rp 2.500,00 untuk kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini menunjukkan suatu kebohongan bahwa pendidikan telah menolong anak menjadi manusia-manusia yang cerdas. Apabila di dalam undang-undang dikatakan bahwa pendidikan merupakan hak dari setiap warga Negara tetapi dengan adanya korban-korban anak bangsa yang tidak berdaya menunjukkan bahwa pendidikan dari rakyat untuk rakyat merupakan suatu kebohongan besar.

Sistem pendidikan yang elitis, warisan pendidikan masa kolonial di mana pendidikan hanya diperuntukkan bagi golongan elite masyarakat masih nampak hingga kini meskipun angka-angka statistik menunjukkan pertumbuhan yang mengagumkan yang tercapai dalam jumlah yang mendapatkan pendidikan dalam masyarakat, tetapi sebenarnya pendidikan kita hanya menguntungkan bagi manusia yang “berduit”. Lihat saja bagaimana sistem penerimaan siswa dan mahasiswa, hanya yang berduit tebal saja yang dapat langsung menikmati pendidikan yang baik. Kita lihat masih banyak anak bangsa yang terlantar yang tidak mendapatkan pendidikan atau yang putus sekolah karena tidak dapat membiayai pendidikannya.

Proses domestifikasi, kita lihat bahwa suatu demokrasi pendidikan pada hakekatnya untuk pembebasan anggota masyarakat dari kebodohan dan kemiskinan. Demokrasi pendidikan adalah pendidikan yang membebaskan tetapi apa yang terjadi adalah proses menjinakkan anggota masyarakat seperti yang terjadi pada zaman Orde Baru melalui indoktrinasi dan bukan mendidik anak bangsa sebagai manusia yang berdiri sendiri dan kreatif. Pendidikan formal kita, terutama dengan cara-cara yang mematikan inisiatif dan berpikir kreatif sebenarnya merupakan suatu proses penjinakan agar anggota warga negaranya menjadi anggota yang patuh pada sistem kekuasaan yang ada.

Proses pembodohan, apa yang terjadi di dalam ruang kelas atau ruang kuliah kita ialah proses menghafal data tanpa dikunyah atau dianalisa. Dengan demikian, sumber daya manusia kita tergolong yang terendah di Asia oleh karena sistem

pendidikan kita yang sekadar menghafal data-data. Berpikir kreatif sebagai ciri dari masyarakat demokratis tidak berkembang. Inilah proses pembodohan rakyat yang jelas bertentangan dengan amanat Undang-undang Dasar 1945. selama proses pembodohan ini berjalan, tidak mungkin kita dapat bersaing dengan bangsa lain di dunia.

Budaya korporasi, tidak dapat disangkal bahwa di dalam masyarakat modern dewasa ini, dengan adanya proses globalisasi dan pasar bebas maka dasar-dasar *corporate culture* telah memasuki kehidupan masyarakat Indonesia. Termasuk di dalam dunia pendidikan kita, terutama pendidikan tinggi, merupakan suatu komoditas yang diperdagangkan. Inilah yang disebut gejala-gejala *McDonaldisasi* pendidikan, di mana pendidikan telah menjadi sebagai restoran *fast food* yang cepat laku tanpa gizi atau tanpa mempunyai kadar *academic excellence* yang diperlukan, justru oleh masyarakat modern yang menuntut daya saing yang tinggi.

Telah kita lihat betapa demokrasi pendidikan di Indonesia dewasa ini masih jauh dari yang kita harapkan. Praksis pendidikan belum menunjang terwujudnya masyarakat demokrasi yang kita cita-citakan. Oleh sebab itu, perlu langkah-langkah pembenahan untuk mengatasi berbagai kepentingan yang ada di dalam sistem pendidikan formal, non formal, maupun informal. Pekerjaan ini semudah membalikkan telapak tangan. Meskipun demikian, perlu kita mulai baik pada tingkat mikro maupun pada tingkat makro. Pada tingkat makro pendidikan kita lihat berhubungan dengan kehidupan politik bangsa. Harus ada komitmen dari seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia untuk menegakkan demokrasi

pendidikan sebagai sarana utama untuk mewujudkan masyarakat demokrasi. Oleh sebab itu, komitmen yang telah kita rumuskan di dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai dana pendidikan perlu diwujudkan dan bukan hanya merupakan suatu *lip service*. Memang dana bukan segala-galanya karena yang penting ialah komitmen dari seluruh bangsa. Secara makro kita lihat demokrasi pendidikan belum berkembang sebagaimana yang kita harapkan. Salah unsur penting, yaitu perlu adanya kepemimpinan nasional yang merupakan guru bangsa yang dapat menggerakkan seluruh masyarakat untuk melaksanakan demokrasi pendidikan. Kepemimpinan yang taat hukum dan bermoral merupakan satu syarat bagi terwujudnya demokrasi pendidikan. Tidak mungkin kita melaksanakan demokrasi pendidikan apabila masyarakat kita masih dihindangi oleh virus KKN yang sangat berbahaya, karena proses demokrasi pendidikan meminta panutan-panutan dari para pemimpinnya. Masyarakat Indonesia masih merupakan masyarakat peralihan dari masyarakat feodal kepada masyarakat yang demokratis. Oleh sebab itu faktor pemimpin yang bermoral merupakan syarat mutlak dalam pelaksanaan demokrasi pendidikan.¹⁶⁸

Masyarakat demokrasi atau didalam khazanah bahasa kita dinamakan masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang antara lain mengakui akan hak-hak manusia. Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang terbuka dimana setiap anggotanya merupakan pribadi yang bebas dan mempunyai tanggung jawab untuk membangun masyarakatnya sendiri. Pemerintahan di dalam masyarakat

¹⁶⁸ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme*, hal. 297-300

madani adalah pemerintahan yang dipilih dan untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Masyarakat demokrasi memerlukan suatu pemerintahan yang bersih (*goog and clean governance*).

Masyarakat terbuka mengakui akan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakatnya. Perbedaan-perbedaan tersebut justru merupakan kekuatan di dalam suatu masyarakat madani. Perbedaan pendapat diakui dan oleh sebab itu diperlukan suatu sikap toleransi yang tinggi. Tanpa toleransi tidak mungkin terwujud suatu masyarakat demokratis. Toleransi semu memang dapat diciptakan oleh suatu masyarakat yang demokratis dengan dalih untuk stabilisasi dan keamanan, hak-hak manusia dikorbankan.

Di dalam masyarakat demokratis dihormati adanya perbedaan pendapat dan kepatuhan terhadap keputusan bersama yang telah diambil oleh semua anggota, dituntut adanya tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial dari masing-masing anggotanya dalam melaksanakan keputusan bersama itu.

Sikap serta nilai yang telah diuraikan ini yang merupakan ciri khas dari masyarakat demokrasi tidak datang dengan sendirinya tetapi merupakan suatu proses. Proses tersebut adalah proses pendidikan atau dapat juga disebut sebagai proses pemanusiaan. Masyarakat madani tidak lahir dengan sendirinya karena memerlukan suatu sistem nilai yang berbeda dengan masyarakat otoriter. Oleh sebab itu transisi dari masyarakat Orde Baru yang serba otoriter dan sentralistis menuju masyarakat demokratis yang mengakui akan hak-hak asasi manusia dan

menghargai adanya perbedaan antar anggotanya, memerlukan suatu proses pembentukan melalui proses pendidikan.

Pendidikan dasar yang merupakan hak dari semua warga negara merupakan pondasi dari suatu masyarakat demokratis. Oleh sebab itu, pendidikan dasar yang bebas harus dijadikan prioritas utama didalam membangun suatu masyarakat Indonesia baru yaitu suatu masyarakat demokratis.¹⁶⁹

Di dalam membangun masyarakat Indonesia baru tentunya tidak terjadi di dalam sekejap atau semudah membalikkan telapak tangan. Reformasi pendidikan merupakan suatu reformasi tingkah laku yang dengan sendirinya meminta dan usaha yang ulet. Pendidikan yang merupakan aspek dari kebudayaan tidak mudah untuk diubah sebagaimana kebudayaan itu sendiri sulit untuk diubah dalam sekejap mata. Oleh sebab itu, reformasi pendidikan haruslah bertahap dengan memperhitungkan berbagai potensi, kelemahan, kekuatan dan kemungkinan yang terbuka. Dengan demikian reformasi pendidikan menuntut adanya perencanaan yang matang dan persiapan yang cukup serta ditopang oleh sumber-sumber yang memadai, termasuk komitmen politik masyarakat.

Di dalam membangun masyarakat Indonesia baru, masalah-masalah kritis pendidikan yang dihadapi masyarakat dan bangsa Indonesia dalam jangka menengah antara lain sebagai berikut. Pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai demokrasi; Pengembangan hak asasi manusia pemberantasan kemiskinan; Pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

¹⁶⁹ H.A.R. Tilaar, *Membenahi*, hal. 21

Dalam pengembangan nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan berarti bahwa nilai-nilai tersebut harus menjwai di dalam seluruh kegiatan pendidikan termasuk sistemnya, kurikulumnya, dan matodologi yang digunakan. Praktek-praktek pendidikan yang indoktrinatif tidak sesuai dengan tujuan tersebut, juga kurikulum yang sangat sentralistik dan mematikan potensi individu. Proses belajar mengajar yang mematikan inisiatif dan berpikir kreatif peserta didik sudah tidak lagi pada tempatnya.

Pendidikan berarti suatu proses humanisasi, oleh sebab itu perlu dihormati hak-hak manusia. Anak didik bukanlah robot tetapi manusia yang harus dibantu di dalam proses pendewasaannya agar dia dapat mandiri dan berpikir kritis. Selain itu pendidikan merupakan hak-hak asasi manusia, oleh sebab itu pemerataan pendidikan haruslah dilaksanakan secara konsekwen. Pemerataan pendidikan berkatiian dengan kemiskinan, dan oleh sebab itu kemiskinan merupakan prioritas yang perlu ditanggulangi sejalan dengan pelaksanaan pemerataan itu sendiri. Selanjutnya pengelolaan pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan haruslah diserahkan kepada masyarakat sendiri. Oleh sebab itu pelaksanaan otonomi daerah menurut UU No.22 tahun 1989 dan UU No.25 tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah perlu dilaksanakan di dalam pengelolaan pendidikan. Pendidikan adalah sebagian dari kehidupan masyarakat oleh sebab itu masyarakat perlu secara aktif berpartisipasi di dalam pengelolaan pendidikannya sendiri.

Demikianlah pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu proses pemberdayaan yaitu membebaskan individu dari kungkungan suatu struktur kekuasaan yang terpusat, yang menginjak-injak hak asasi manusia, yang membangun suatu struktur kekuasaan yang hanya menguntungkan sekelompok kecil masyarakat dan menyengsarakan rakyat banyak. Pedagogik pembebasan adalah pedagogik yang memberdayakan peserta didik dalam rangka membangun masyarakat Indonesia baru yaitu masyarakat madani Indonesia.¹⁷⁰



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

¹⁷⁰ H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 42-44

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan diatas, maka penulis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Salah satu upaya preventif untuk membangun kesadaran dan pemahaman generasi masa depan akan pentingnya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, demokrasi, kemanusiaan dan pluralisme dalam pergaulan didalam masyarakat yang mempunyai latar belakang kultural yang beragam adalah dengan melalui penerapan pendidikan multikultural. Karena strategi dan konsep pendidikan ini tidak hanya bertujuan agar peserta didik memahami dan ahli dalam disiplin ilmu yang dipelajarinya.

Di dalam undang-undang yang mengatur mengenai kurikulum, khususnya Pasal 37 menjelaskan mengenai muatan kurikulum, antara lain pendidikan Agama dan pendidikan kewarganegaraan. Penjelasan kedua ayat ini sangat umum, luas dan abstrak. Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Di dalam penjelasan ayat ini tidak dikemukakan mengenai pentingnya upaya membangun kerukunan hidup di dalam kenyataan keberagaman agama dan kepercayaan bangsa Indonesia. Hal ini penting sebab konflik yang

hidup dalam kultur dan religi plural di Indonesia telah menyebabkan banyak korban di dalam kehidupan bersama. Di dalam pendidikan agama barangkali perlu di tonjolkan pentingnya teologi inklusif di dalam proses pendidikan di Indonesia dalam masyarakat yang pluralistik.

Berkenaan dengan pendidikan kewarganegaraan pasal ini merumuskan mengenai tujuan pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Rumusan ini juga sangat luas dan mencakup banyak hal. Pendidikan kewarganegaraan adalah sebagian dari pendidikan kewargaan yang perlu dimiliki oleh setiap peserta didik karena dia adalah warga dalam masyarakatnya, dalam kebudayaan lokalnya, dan akhirnya sebagai warga dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kajian bahasa di dalam kurikulum hanya mengatakan sebagai bahasa ibu dan bukan sebagai milik budaya lokal yang dimiliki oleh setiap peserta didik dalam masyarakat yang pluralis.

Akan tetapi pendidikan saat ini belum mempraktekkan nilai-nilai pluralisme, demokrasi, humanisme dan keadilan terkait dengan perbedaan kultural yang ada di lingkungan sekitarnya. Dengan belum diterapkannya konsep dan strategi ini, segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan ketidak adilan yang sebagian besar dilatar belakangi oleh adanya perbedaan kultural seperti perbedaan agama, ras, etnis, bahasa, kemampuan, gender, umur dan kelas sosial-ekonomi mungkin saja akan terus terjadi.

Agar tujuan pendidikan multikultural ini dapat dicapai, maka diperlukan adanya peran serta dan dukungan dari guru atau dosen, institusi pendidikan dan para pengambil kebijakan pendidikan lainnya. Guru atau dosen perlu memahami konsep dan strategi pendidikan multikultural agar nilai-nilai utama yang terkandung dalam strategi dan konsep pendidikan tersebut seperti pluralisme, demokrasi, humanisme, dan keadilan dapat juga diajarkan sekaligus dipraktekkan dihadapan para siswa sedemikian rupa, seorang guru atau dosen tidak hanya bertanggung jawab agar peserta didik mempunyai pemahaman dan keahlian terhadap mata pelajaran yang diajarkannya, akan tetapi juga bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, keadilan dan pluralisme.

Disamping itu, perlu juga dukungan dari sekolah atau kampus sebagai sebuah institusi pendidikan. Dukungan ini dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep dan strategi pendidikan multikultural kedalam tujuan pembelajaran, kurikulum, dan manajemen pendidikan yang diterapkan sekolah.

Dukungan lain yang akan sangat berarti bagi pengembangan pendidikan multikultural adalah dari para pengambil kebijakan baik dari pemerintah tingkat pusat, maupun di daerah ditingkatkan institusi pendidikan itu sendiri, seperti kepala sekolah, komite sekolah maupun kepala administrasi sekolah. Dukungan ini sangat penting meskipun dalam era otonomi daerah sekarang ini para pengambil kebijakan di daerah mempunyai hak berinisiatif, membuat dan menerapkan kebijakan lokal masing-masing. Akan tetapi kerja sama dan kesamaan persepsi, serta tujuan para pengambil kebijakan di daerah dan pusat dapat memaksimalkan

pengembangan pendidikan multikultural ini. Akhirnya, dengan adanya dukungan dari guru atau dosen institusi pendidikan dan para pengambil kebijakan lain, baik dipusat maupun daerah, di harapkan penerapan pendidikan multikultural ini dapat di implementasikan secara maksimal dan efektif.

Harapan dari semua ini adalah bahwa institusi pendidikan kita, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, dapat menghasilkan lulusan sekolah atau universitas yang tidak hanya mempunyai kemampuan kognitif (pengetahuan), dan psikomotorik (keterampilan), melainkan juga mempunyai sikap (afektif) yang demokratis, humanis, pluralis dan adil.

Bangunan Indonesia baru atau perombakan tatanan kehidupan orde baru adalah sebuah “masyarakat multikultural Indonesia” yang didirikan diatas puing-puing tatanan kehidupan orde baru yang bercorak “masyarakat majemuk” (plural society). Sehingga, corak masyarakat Indonesia yang bhineka tunggal ika bukan lagi keanekaragaman suku bangsa tetapi juga keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural yaitu, sebuah ideologi yang mengakui dan mengagumkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual dan secara kebudayaan.

Dari ringkasan diatas, kita bisa mendapatkan gambaran secara umum pendidikan multikultural ”telaah transformasi sosial; pendidikan nasional”. Maka, penulis dapat menyimpulkan dari hasil pemaparan diatas tentang bagaimana

pendidikan multikultural ”telaah transformasi sosial;pendidikan nasional” yang diantaranya adalah:

1. Bahwa yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial adalah: kekuasaan sosial dan tekanan sosial, dengan adanya tekanan dan kekuasaan, maka terjadilah perubahan dalam masyarakat dan kebudayaan. Tiap-tiap kelompoknya dan tiap-tiap lembaganya mengalami perubahan dan segala perubahan itu mengakibatkan perubahan lain secara timbal balik. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain: di dalam proses perubahan dan pertumbuhan itu ternyata berjalan secara akumulatif, yaitu terus menerus. Makin lama makin bertambah jumlahnya, sekalipun ada pula yang hilang. Maka itu mungkin terjadi karena kebudayaan dari masyarakat lain melancarkan pengaruhnya. Hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik. Perubahan kedua ini berjalan terus menerus dan merupakan proses yang sangat luas, meliputi bidang biologis, geografis, teknologis, dan lain-lain. Kebanyakan perubahan sosial biasanya didahului oleh suatu penemuan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknik.
2. fungsi standar nasional pendidikan adalah untuk pengukuran kualitas pendidikan. Standar ini tentunya bukan merupakan ukuran yang statis yang tidak berubah, tetapi semakin lama semakin ditingkatkan. Standar nasional pendidikan dalam masa transisi merupakan suatu keharusan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Standar nasional pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan mutu pendidikan bukannya bertujuan untuk memasung proses

pemberdayaan peserta didik tetapi tetapi yang bertujuan memacu inisiatif belajar yang kreatif. Dengan demikian standar nasional pendidikan haruslah dijadikan dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam upaya untuk mencapai pendidikan yang bermutu.

3. Menciptakan masyarakat multikultural adalah Cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia baru, Dalam Pasal 55 yang mengatur mengenai pendidikan berbasis masyarakat, Ayat (1) dirumuskan sebagai berikut : Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Rumusan ayat ini tentunya sangat luas oleh sebab itu belum diarahkan kepada keperluan yang konkrit mengenai pentingnya penyelenggaraan pendidikan yang berdasarkan kepada kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya. Kepentingan masyarakat tertentu belum berarti mengatur mengenai saling pengertian dan saling apresiasi pada kebudayaan yang beraneka ragam dalam masyarakat Indonesia. Toleransi hidup bersama, kerja sama antara suku belum diketengahkan di dalam ayat ini. Penjelasan pasal ini hanya mengatakan bahwa kekhasan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat tetap dihargai dan dijamin oleh undang-undang ini. Saat ini, pendidikan multikultural belum masuk dalam kurikulum pendidikan di semua tingkatan, kalau pun ada hanya diperguruan tinggi dan menjadi mata kuliah eleksi. Padahal, pendidikan multikultural mempunyai dua tanggung jawab besar: menyiapkan bangsa Indonesia untuk

menghadapi arus budaya luar di era globalisasi dan menyatukan bangsa sendiri yang terdiri dari berbagai budaya.

B. Saran-Saran

Dalam penulisan tesis ini, perlu kiranya penulis memberikan saran kepada berbagai pihak, utamanya para stake holder, praktisi, pemerhati masalah pendidikan dan multikulturalisme di Indonesia, sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah khususnya, supaya merespon arus globalisasi yang secara langsung maupun tidak berdampak pada sendi-sendi dunia pendidikan nasional di Indonesia. Utamanya, menyangkut isu global saat ini yaitu pendidikan multikultural. Maka, pemerintah hendaknya memikirkan secara serius realitas multikultural di Indonesia dengan memasukkan kurikulum pada semua tingkatan dan jenjang pendidikan yang berdasar pada semangat multikulturalisme.

2. Kepada praktisi pendidikan (guru, dosen, staf pengajar, ustadz, dll), hendaknya hendaknya menanamkan nilai-nilai multikulturalisme dalam proses belajar mengajar (PBM) dengan cara memberikan menyangkut realitas multikultural dan mempraktekkan dalam kehidupan nyata, sehingga peserta didik memiliki kompetensi nilai-nilai multikulturalisme.

3. Kepada pengamat dan pemerhati masalah pendidikan, agar terus berusaha membumikan wacana pendidikan multikultural melalui berbagai media, baik media massa maupun media elektronik, atau media-media lain yang lebih efektif dan efisien.

4. Dan kepada semua elemen masyarakat dan civil society, agar bekerja sama dalam mewujudkan masyarakat multikulturalisme (bhineka tunggal ika) sebagaimana telah di perjuangkan oleh para praktisi pendidikan negeri ini.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufiq. 1996. *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ainul Yakin, M. 2005, *Pendidikan Multikultural, Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media.
- Azra, Azyumardi. 2007, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*, Yogyakarta: Impulse, Penerbit Kanisius.
- _____. 14 desember 2004, *Identitas dan Krisis Budaya Membangun Multikulturalisme Indonesia*, Kompas.
- _____. 2007, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*, Yogyakarta: Impulse, Penerbit Kanisius.
- _____. 03 september 2003, “ Pendidikan Multikultural (Membangun Kembali Indonesia Bhineka Tunggal Ika)”, SKH. Republika.
- _____. 1999, *Pendidikan Islam, Tradisi dan modernisasi Menuju Milenium Baru*, cet.I, Jakarta: Logos.
- A Partanto, Pius & Al Barry, M. Dahlan. 1994, *Kamus Ilmiah Pupuler*, Surabaya : Penerbit Arkola.
- Al-Ghazali, Al-Imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad, *Ihya' Ulum ad-Din, juz. I*, (Semarang: Syirkah Nur Asia, t.t.)
- Anderson, Benedict. 2002, *Hantu Komparasi*, Yogyakarta: Qalam.

- Abdullah, & Jalaluddin. 1997 *Pengantar Filsafat Pendidikan*, cet. 1, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ahmadi, Abu. 1985. *Sosiologi*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ade Irawan. Dkk. 2004, *Mendagangkan Sekolah*,; Indonesia corruption watch.
- Barizi, Ahmad . 2004, *Membuka Jendela Pendidikan* , Jakarta: Rajawali Pers.
- Bertens, Kess. 1990. *Realitas Sosial*. Jakarta: Gramedia.
- _____. 2004, *Etika*, Jakarta: Gramedia.
- _____. 2002, *Inggris-Jerman*, Jakarta: Gramedia.
- _____. 2001 *Filsafat Barat Kontemporer Jilid II Prancis*, Jakarta: Gramedia.
- _____. 2001, Edisi Paulo freire, Yogyakarta: Januari-Februari.
- _____. 2006, Edisi Filsafat Pendidikan, Yogyakarta: Juli-Agustus.
- Baidhawi, Zakiyudin. 2005. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Jakarta: Erlangga.
- Cambel, Tom. 1994. *Tujuh Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Depag RI. 2004, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media.
- Durkheim, Emile. 1989, *Sosiologi dan Filsafat*, Jakarta: Erlangga.
- Goodman, J. Douglas; Fitzer, George. 2005. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.

Fadjar, Malik. *Platform Reformasi Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 2001. Jakarta: Logos.

Freire, Paulo. 2001, *Menjadi Guru Merdeka*, Yogyakarta: LkiS

_____. 2002, *Politik Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Fukuyama, Francis. 2004, *The Great Disruption*, Yogyakarta: Qalam.

_____. 2002, *Trust*, Yogyakarta: Qalam.

F.O'neil, Wiliam. 2002, *Ideologi-Ideologi Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Hadi, Sutrisno. 1986. *Metodologi Research*. Yogyakarta

Hariyono, P. 1996, *Pemahaman Kontekstual tentang IBD*, Yogyakarta: Kanisius.

Hadi Miarso, Yusuf. 2005, *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*, Jakarta: Kencana.

Hardiman, F. Budi. 1993, *Menuju Masyarakat Komunikatif*, Yogyakarta: Kanisius.

Hasbullah. 2005, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers.

Harefa, Andrias. 2005, *Menjadi Manusia Pembelajar*, Jakarta: Kompas.

Illich, Ivan. 2006 *Menggugat Pendidikan*, Jogjakarta: Pustaka Belajar.

Irianto, Sulistiyowati. 2003, "Multikulturalisme dalam Perspektif Hukum: Tragedi Perempuan Tionghoa", *Jurnal Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu-ilmu Sosial LIPPI*, Jilid XXIX, No.1.

- J Moleong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Rosda Karya.
- Koentjaraningrat. 1984. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- _____, 1987. *Sejarah Teori Antropologi*, Jakarta: UI-Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan Kebudayaan Jakarta: Balai Pustaka,t.t.
- Kimlicka, Willy. 2002, *Kewarganegaraan Multikultural*, Jakarta: LP3S.
- LeKDIS, 2005. *Standar Pendidikan Nasional PP No 19 Tahun 2005*, Jakarta: LeKDIS.
- Machdhoero. 1993. *Metode Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Ekonomi*. UMM Press Malang.
- Mahfud, Choirul. 2006. *Pendidikan Multikultural*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Mulkhan, Abdul. 2005, *Kesalehan Multikultural*, Jakarta: PSAP.
- _____. 2002, *Nalar Spiritual Pendidikan*, Yogyakarta: Tiara Wacarna.
- Maliki, Zainuddin. 2004. *Tiga Teori Sosial Hegemonik*. Surabaya: LPAM.
- Mimbar, 2000, *Madrasah Dan Pemberdayaan Umat*, Surabaya.
- Magnis Suseno, Franz. 2003, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Makalah. 20 Mei 2007. *Seminar Pendidikan*. Pasuruan: STAIPANA.

Muqowim. 2007 “ *Epistemologi Pendidikan Islam dalam Konteks Masyarakat Majemuk*” dalam Subkhi Ridho, (ed.), *Belajar dari Kearifan Sahabat: Ikhtiar Pengembangan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: JIMM bekerjasama dengan Yayasan TIFA).

Muhadjir, Noeng. 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi III*, Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasen.

M. Echol, Jhons & Shadly, Hassan. 1993, *Kamus Inggris Indonesia*, cet ke-XIX, Jakarta: PT Gramedia.

Mudyahardja, Redja. 2001. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Naim, Ngainun & Sauqi, Achmad. 2008. *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Mudyahardjo, Redja. 2001, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers.

Ojong, P.K. 2004, *Perang Eropa Jilid II*, Jakarta: Kompas.

Parekh, Bikhu. 1997, *National Culture And Multikulturalism*, dalam Kennet Thomson (ed.), *Media And Cultural Regulation*, London : Sage Publication.

Poerwadarminta, W.J.S.1991, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Purnomo, S. November 1995, *Nilai dan Norma Masyarakat*”, Jurnal Filsafat, No. 23.

Poerbakawatja, Soergarda. *Pendidikan dalam Alam Kemerdekaan Indonesia merdeka*, Jakarta: Gunung Mulia.t.t.

- Pendidikan Taman Siswa 30 Tahun. 2004, cet 2. Bandung: Alfabeta.
- Paul Johnson, Doyle. 1986, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Jakarta: Gramedia.
- T. Nolan, Richard. 1984, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Membenah Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2006. *Standarisasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2004. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2006. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Rosda Karya.
- _____. 1995. *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995*. Jakarta: Grasindo.
- _____. 2003. *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan*, Magelang: Indonesia Tera.
- _____. 2003, *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan Perspektif Studi Kultural* , Magelang: Indonesia Tera.
- _____. 2005) *Manifesto Pendidikan Nasional*, Jakarta: Kompas.
- Tafsir, Ahmad. 2004. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Rosda Karya.

- Sindhunata. 2000. *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soekanto, Soerjono. 1993, *Kamus Sosiologi*, cet 3, Jakarta: Rajawali Pers.
- _____ 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2003. (Edisi Revisi) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparlan, Parsudi. 2001, *Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia*, tulisan ini merupakan Keynote Address yang disampaikan dalam sesi pleno symposium internasional jurnal Antropologi Indonesia ke-2.” Globalisasi dan Kebudayaan: Suatu Dialektika Indonesia Baru”, Kampus Universitas Andalas, Padang, 18-21 Juli.
- Syafrie, Yana, 22 Mei. 2007 “ *Multikulturalisme dan Agenda Kemanusiaan*”, Waspada Online.
- Suhartono, Suparlan. 2006, *Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sallis, Edward. 2006, *Total Quaity Managemen In Education*, Yogyakarta: Ircisod.
- Sunarto, Kamanto. 2000, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tim Redaksi Fokus Media. 2005. *Standar Nasional Pendidikan*. Bandung: Fokus Media.

Undang-Undang Sisdiknas Th 2003, Jogjakarta: Media Wacana.

Yunan Ruhendi, Luluk. 2004, *Paradigma Pendidikan Universal*,
Yogyakarta: Ircisod.

Zubaedi. 2005, *Pendidikan berbasis Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.

Zuchdi, Darmiyati. 1993, *Panduan Peniltian Analisis Konten*,
Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

CURICULUM VITEI

Nama : **Ahmad Sopian. S.P.d.I.**
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Lubuk, 01 Januari 1983
Status : Belum Menikah
Alamat Jogja : Apartemen Jomlo, Pedak Baru No.438 karang bendo Bangun Tapan Yokyakarta
No Tlp / HP : 081329373589

Riwayat Pendidikan Formal :

1. SD Negeri 2 Tanjung Lubuk, Tahun 1995
2. MTs Raudhatul Ulum, Sakatiga, Indralaya Kab. Ogan Ilir, Tahun 1999.
3. MA Raudhatul Ulum, Sakatiga, Indralaya Kab. Ogan Ilir, Tahun 2001
4. Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2007
5. Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2009

Pendidikan Non Formal :

No	Nama Kegiatan	Tahun	Sertifikat/Piagam
01	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Perkoperasian	2003	Ada
02	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Koperasi (DIKLATMENKOP)	2004	Ada
03	Seminar Sehari "Menembus Dunia Kerja"	2004	Ada
04	Training For Success Trainer II 2006 Se-DIY & JATENG	2006	Ada
05	Pelatihan Manajemen Event Organizer Pendidikan Kader Masjid Syuhada	2006	Ada
06	Seminar Nasional Ketenagakerjaan "Menjawab Liberalisasi Ketenagakerjaan Indonesia"	2005	Ada

07	Training Ustadz/ustazah dan Manajemen TPA	2003	Ada
08	Training Jurnalistik	2003	Ada
09	Pemateri Training For Success Trainer HMI –Wati Cabang Yogyakarta	2006	Ada
10	Intermediate Training tingkat nasional HMI Cabang Bogor	2006	Ada
11	Senior Cours HMI Cabang Yogyakarta	2006	Ada
12	Seminar Nasional Rekonstruksi Madrasah Sebagai Sekolah Unggulan Menghadapi Persaingan Global	2008	Ada

KARIR ORGANISASI

No	Nama	Jabatan	Tahun
01	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas .Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Sekretaris	2003
02	Koperasi Mahasiswa UIN Sunan kalijaga Yogyakarta,	Ketua Bidang	2004-2005
03	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta	Pengurus	2006
04	Badan Pengelola Latihan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta,	Ketua Bidang	2007
05	Insan Cita Training Yogyakarta	Direktur Utama	2007
06	Pengawas Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,	Ketua	2007